

P. R. S. MANI

JEJAK REVOLUSI 1945

SEBUAH KESAKSIAN SEJARAH



P. R. S. Nawi

JEJAK REVOLUSI 1945

NOMOR RELASI

DISERTAI SALAM DARI PENERBIT

Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

MANI, P.R.S., 1915-

Jejak revolusi 1945 : sebuah kesaksian sejarah /
P.R.S. Mani ; penerjemah, Lany Kristono. -- Jakarta :
Pustaka Utama Grafiti, 1989.
viii, 192 hlm. : ilus. ; 19 cm.

ISBN 979-444-062-0.

1. Indonesia - Sejarah - Revolusi, 1945-1949
I. Judul. II. Kristono, Lany

959.8

JEJAK REVOLUSI 1945
Sebuah Kesaksian Sejarah
Dari Judul Asli

The Story of Indonesian Revolution 1945-1950

© P.R.S. Mani

Terjemahan Indonesia oleh PT Pustaka Utama Grafiti

Penerjemah: Lany Kristono

No 097/89

Kulit Muka: Abdul Azis

Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti
Kelapa Gading Boulevard TN-2 No. 14-15
Jakarta 14240

Anggota Ikapi

Cetakan Pertama, 1989

Percetakan PT Temprint, Jakarta

Pengantar Penerbit

Karya tulis P.R.S. Mani yang sekarang berada di tangan Anda tidak bermaksud berteori muluk-muluk atau mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang tinggi-tinggi. Pada dasarnya ia hanya menuturkan suatu kisah belaka, kisah tentang sebagian masa lampau kita sebagai suatu bangsa, yang kebetulan secara pribadi ia saksikan. Namun agaknya, justru di sinilah letak nilai buku ini, yakni sebagai suatu kesaksian sejarah yang diberikan oleh orang asing.

Semula P.R.S. Mani datang ke Indonesia sebagai perwira penerangan tentara India, yang bersama pasukan Sekutu mendarat di Surabaya menjelang akhir tahun 1945. Tugas-tugasnya kemudian di dunia jurnalistik dan diplomatik di Indonesia sampai tahun 1950-an memungkinkan Mani melihat dari dekat banyak peristiwa penting sepanjang kurun masa Revolusi Kemerdekaan.

Sebagai koresponden *Free Press Journal of Bombay*, Mani-lah yang pertama kali menyiarkan pada dunia tawaran barter beras Perdana Menteri Syahrir sebanyak setengah juta ton kepada India, yang pada waktu itu mengalami kesulitan pangan. Apa yang kemudian dikenal sebagai "diplomasi beras" Syahrir, memang merupakan "pukulan telak bagi blokade ekonomi Belanda" di samping "mengakibatkan meluasnya pengakuan internasional kepada Republik". Aspek politik diplomasi tersebut, oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dirumuskan,

"Dengan satu pukulan kita telah memberikan 'coup de grace' kepada klaim-klaim Belanda bahwa Republik kita sedang berada di ambang keruntuhan dan rakyat berkeliaran dengan perut kosong".

Hampir setiap halaman buku ini berisi kesaksian Mani terhadap Revolusi Fisik di tanah air. Ia menuturkan pengalamannya di tengah kancah revolusi Indonesia dengan suatu 'jarak', setelah selang empat puluh tahun kemudian. Dengan begitu, kendati tidak bisa menyembunyikan simpatinya, Mani tetap dapat menjaga nalar obyektifnya. Sebaliknya, ia leluasa memberi komentar di sana-sini seraya menyiratkan sentuhan-sentuhan pribadi, yang menyebabkan uraiannya tidak berhenti pada suatu deskripsi yang kering dan kaku.

Harus diakui, dalam buku aslinya terdapat sejumlah kekeliruan, baik yang bersangkutan dengan fakta sejarah maupun tata ejaan dalam penulisan nama. Atas petunjuk Bapak Subadio Sastrosatomo — untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepadanya — dalam edisi Indonesia ini kami berharap sebagian besar kekeliruan tersebut telah dapat diluruskan.

Jakarta, Mei 1989

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Pengantar Penerbit | v |
| Prakata | 1 |
| Kata Pengantar | 3 |
| Bab I | |
| Kegemparan Revolusi | 13 |
| Bab II | |
| Latar Belakang Terjadinya Revolusi | 29 |
| Bab III | |
| Tokoh-tokoh | 46 |
| Bab IV | |
| Sila-sila Luhur Pancasila | 56 |
| Bab V | |
| Proses Revolusi | 61 |
| Bab VI | |
| Proklamasi Kemerdekaan | 82 |
| Bab VII | |
| Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan | 90 |
| Bab VIII | |
| India dan Indonesia | 111 |
| Bab IX | |
| Saksi Keadaan Darurat | 129 |
| Bab X | |
| India Mengerahkan Dukungan Internasional | 154 |
| Refleksi | 182 |
| Indeks | 187 |

PRAKATA

Dalam tahun-tahun terakhir ini muncul sejumlah besar karya ilmiah yang membicarakan revolusi dan gerakan kaum nasionalis Indonesia. Meskipun pemimpin-pemimpin nasionalis, seperti Sukarno, Hatta, dan Syahrir, berulang kali mengakui sumbangan penting India kepada Revolusi Indonesia, para penulis Barat pada umumnya cenderung merendahkan peranan India.

Monografi ini merupakan usaha untuk meluruskan catatan sejarah yang ada dan menganalisa berbagai perkembangan selama tahun-tahun revolusi yang mengemparkan di Indonesia, dari sudut pandang seorang Asia. Shri P.R.S. Mani jelas memenuhi syarat untuk melakukan pengkajian ini. Selama 5 tahun, ia menjadi saksi berbagai peristiwa yang dengan luar biasa cepatnya terjadi di Indonesia; pertama sebagai pengamat ketenteraan bersama pasukan India, kemudian sebagai wartawan perang, dan akhirnya sebagai diplomat. Sebagai sahabat pribadi tiga serangkai nasionalis Indonesia — Sukarno, Hatta, dan Syahrir — Shri Mani tidak hanya memberikan sentuhan pribadi, tetapi juga wawasan-wawasan langka ke dalam perjuangan kaum nasionalis Indonesia.

Monografi ini didasarkan pada ceramah-ceramah yang disampaikan Shri Mani kepada staf pengajar dan mahasiswa Pusat Pengkajian bulan Februari 1981. Saya

percaya penerbitan buku ini akan menarik bukan hanya bagi para mahasiswa yang mempelajari Asia Tenggara dewasa ini, melainkan juga bagi semua orang yang tertarik pada masalah-masalah internasional.

Saya ingin menambahkan bahwa tanggung jawab atas fakta dan pemikiran yang tercantum dalam buku ini semata-mata ada di tangan penulis.

Pusat Pengkajian Masalah-masalah Asia Selatan dan
Tenggara University of Madras

V. Suryanarayan

KATA PENGANTAR

Karena dilahirkan dan dibesarkan pada masa-masa revolusi, saya kagum mendengar berbagai kisah perjuangan yang dipimpin oleh Garibaldi dan Bolivar. Revolusi tanpa kekerasan Mahatma Gandhi yang bersifat kontemporer sangat mengobarkan rasa patriotisme saya. Tetapi, karena merupakan teknik baru, tidak seperti revolusi klasik, revolusi ini tidak membangkitkan tanggapan aktif di dalam diri saya. Hasrat saya untuk berperan serta dalam revolusi di negara-negara lain seperti para pahlawan dalam bayangan saya, tetap tidak terpuaskan. Nasib membawa saya, bersama pasukan India, ke Indonesia di tengah berkecamuknya revolusi pada akhir Perang Dunia II.

Saya mendapat kesempatan istimewa dan bernasib baik untuk menyaksikan revolusi di Indonesia selama lima tahun dari beberapa kedudukan yang menguntungkan; sebagai pengamat ketentaraan bersama pasukan India, sebagai wartawan perang, dan sebagai diplomat.

Meskipun demikian, tulisan ini muncul tiga puluh tahun atau lebih setelah peristiwa-peristiwanya terjadi. Jelas, saya tidak dapat menuliskannya selama masih bekerja bagi Pemerintah India. Peristiwa-peristiwa ini berasal dari zaman yang penuh dengan kejadian yang menggemparkan dan demikian pula halnya dengan pergaulan saya dengan kejadian-kejadian itu sebagai pengamat yang berminat. Dengan mudah dan jelas

semua peristiwa itu terbayang lagi pada saat mengenangkan gelombang waktu saat itu dengan bantuan catatan-catatan yang teratur yang, baik oleh bakat maupun latihan, saya tekuni selama lima tahun. Selang waktu yang panjang antara peristiwa dan penulisan buku ini memungkinkan saya memperbaiki catatan-catatan yang saya buat dengan jalan memperluas laporan tentang peristiwa dan tentang para tokoh kurun waktu yang luar biasa itu.

Berbagai buku dan terbitan mengenai Revolusi Indonesia, sebagian besar karya orang Amerika, telah diterbitkan. Adanya materi-materi baru ini betul-betul memperlihatkan kekurangtahuan saya akan latar belakang peristiwa yang lebih dalam. Namun, saya tidak lalu menyimpang dari apa yang telah saya catat sesuai dengan apa yang telah saya saksikan dan amati. Saya jelas seorang komentator yang menaruh perhatian. Bahkan bila peristiwa yang akan datang membuktikan bahwa penilaian saya yang sekarang ini tidak benar, saya tidak ingin mengambil manfaat dari meninjau kembali seluruh peristiwa untuk, kemudian, mengadakan pembetulan, karena saya ingin setia kepada profesi saya sebagai wartawan pada waktu itu. Sementara itu saya sudah menarik manfaat dari berbagai literatur yang diterbitkan sejak masa revolusi guna memperkuat semua pengamatan dan komentar saya. Saya berbeda dari kebanyakan literatur itu; saya jelas seorang pengamat yang bersimpati, yang sungguh-sungguh merasa ikut terlibat dalam urusan kemerdekaan rakyat terjajah tanpa harus menyimpang dari rasa obyektivitas.

Syahrir, Sukarno, dan Hatta — tiga tokoh besar revolusi, yang mempunyai hubungan erat dengan saya, telah tiada. Hal ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada saya untuk menjaga agar penilaian saya terhadap peranan mereka dalam revolusi tidak dipengaruhi oleh tindakan mereka sesudah itu dalam pengulangan kekuasaan setelah kemerdekaan. Bagi saya,

bukanlah tidak mungkin untuk bersikap sama bersahabatnya kepada ketiganya. Sebenarnya, saya sangat terpengaruh oleh karisma Sukarno, intelek Hatta yang tenang dan sopan, dan pikiran Syahrir yang tajam lagi analitis. Saya bahkan banyak berutang budi kepada Syahrir. Tanpa kepura-puraan, baik ketika menjabat sebagai perdana menteri maupun tidak, Syahrir mencurahkan kasihnya yang penuh rasa persaudaraan dan hangat kepada saya. Pintu rumahnya selalu terbuka bagi saya. Ia selalu siap untuk memberikan kepada saya analisisnya mengenai suatu krisis politik dengan singkat dan tepat, meskipun kadang-kadang diwarnai dengan sindiran tajam kepada Sukarno, serta berusaha menyederhanakan gagasan-gagasan politik maupun filsafat yang musykil bagi saya. Pengetahuan Syahrir tentang sifat manusia memang luar biasa, tetapi sayangnya, ia kurang bersemangat untuk memanipulasi massa seperti politisi lainnya dan mempercayakan kepemimpinan bagi massa kepada sekelompok kader elite pekerja-pekerja politik. Penolakannya untuk menerima pujian massa yang berlebihan sering kali merugikan kepentingan politiknya.

Kekaguman saya kepada Syahrir dan rasa hormat saya pada kecerdasannya tidak terbatas. Dengan murah hati, Syahrir mendidik saya dalam bidang politik dan masalah-masalah internasional. Oleh karena itu, wajarlah jika saya memberi penghormatan kepada kehidupannya dan mempersembahkan buku ini sebagai kenangan baginya.

Ketika mengunjungi monumen Budha yang terkenal, Borobudur, dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa tahun 1927, penyair dan penerima hadiah Nobel, Dr. Rabindranath Tagore, menulis: "Untuk mengenal negeri saya, orang harus mengadakan perjalanan ke abad ketika negara saya sadar akan jiwanya dan dengan demikian melebihi batas-batas fisiknya ketika ia menyatakan keberadaannya dengan keluhuran budi yang bersinar-

sinar yang menerangi Horison Timur, menjadikannya diakui sebagai milik sendiri oleh orang-orang yang tinggal di daratan asing, yang dibangun ke dalam kehidupan yang mengejutkan." Kata-kata penyair besar sekaligus pembaharu India yang pantas dihargai ini bergema dalam hati dan pikiran saya pada saat saya mengadakan kunjungan perpisahan terakhir ke monumen agung di Jawa Tengah itu pada minggu-minggu terakhir bulan Desember 1949. Saya sering mengunjungi monumen ini, seakan-akan menemui seorang guru, Guru Besar, karena peninggalan ini begitu lancar berbicara mengenai ajaran-ajaran Guru Dunia Budha Gautama. Untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa India, tanah air saya, tidak memiliki monumen yang mengagumkan bagi ajaran-ajaran dan filsafatnya. Tengah saya merenungkan rasa kagum saya dan mencari pengarahannya dari banyak patung Budha yang ada di setiap tingkat serta memotretnya, tiba-tiba saya sadar, saya sedang akan terjatuh dengan kepala di bawah ke panggung karang lima puluh kaki di bawah sana! Dan, tangan Darmanto yang tenang dan tepat pada waktunya memegang bagian belakang pinggang saya. Saya diselamatkan dari akhir yang tragis untuk dapat menuliskan kisah ini. Begitu tipisnya hidup. Darmanto adalah seorang diplomat Indonesia, dari keluarga Susuhunan yang memerintah Surakarta. Ia dan istrinya memberi saya banyak pengertian yang mendalam tentang pengetahuan dan kebudayaan Jawa. Lebih dari seratus – bukan, ribuan – orang yang terus-menerus membantu saya untuk mengenal Indonesia selama lima tahun saya berada di tempat yang bagi saya adalah surga, El Dorado sejati yang dengan indahnya dilukiskan dalam kitab-kitab agama Hindu dan kesusastraan Sanskerta sebagai Yavadwipa (Jawa), pulau gandum, dan Suvarnabhumi (Sumatra), pulau emas – benar-benar negeri yang makmur. Namun, saya tidak dapat mengabaikan rasa terima kasih khusus saya kepada Mr. Maria Ulfah

Santoso; Sri Suwarni yang cantik; Herawati Diah dengan majalah *Mimbar Indonesia*-nya yang semarak; Subadio dengan humornya yang tidak berkesudahan; Sudarpo dengan wajahnya yang cemas memikirkan bagaimana memberikan informasi dengan cara yang berlainan kepada wartawan-wartawan asing; Sujatmoko dengan wajahnya yang serius dan pikiran analitisnya yang dalam; Dr. Priyono yang dengan sindiran-sindiran kritisnya melatih bahasa Prancis saya tanpa menunjukkan pandangan Marxisnya; Sofyan Tanjung, penolong saya yang baik, yang seperti bayangan pelindung mendadak muncul pada waktu saya ditinggalkan sendirian setelah Syahrir dan kawan-kawan yang lain diculik dalam satu "kudeta", dan ketika saya diam-diam melintasi persawahan di daerah Karawang setelah mengelakkan patroli Inggris-Gurkha dalam usaha masuk ke wilayah Republik, yang izinya untuk keperluan itu tidak selalu diberikan oleh Markas Besar Inggris; Nyonya Suryadarma, istri Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia yang memesonanya, yang membantu saya dengan pengetahuan dan protokol selama saya menjadi wakil pemerintah India di Yogyakarta; Nona Yetty Zain yang sewaktu menahan saya dalam perlindungannya di Surabaya memperkenalkan rahasia-rahasia gerakan pemuda dan yang pemimpinya (saudara laki-laki Yetty), Rustam, mengacungkan samurai ke leher saya pada saat saya menjadi tawanannya, serta saudara laki-laki Yetty yang menjadi diplomat terkemuka dan dengan sabar menampung semua pertanyaan saya, yaitu Zairin Zain; anggota serikat buruh militan, Johan Syahrusah, yang gemar menggoda saya berhubung dengan cerita-cerita saya namun menambahkan lebih banyak kabar angin pada catatan saya; pengusaha-pengusaha India di Surabaya beserta keluarga mereka yang menjadikan saya salah seorang dari mereka dan yang pemimpinya, Kundan, memberi lebih banyak daripada yang dapat saya berikan kepadanya; Ali Budiarto dengan suaranya yang halus

namun cerdas, yang memberi saya info-info tepat pada waktunya; Dr. Subandrio beserta istrinya yang terpelajar, yang selalu menunjukkan kebaikan dan keramahtamahan; Rosihan Anwar, redaktur sosialis yang paham sosialisnya tidak jelas seperti kaum Brahma dalam doktrin Hindu "Bukan ini, Bukan ini" (*Neti, Neti*); Mokhtar Lubis, wartawan pemberani dan penentang yang pikiran jernihnya memudahkan pemahaman akan latar belakang revolusi; Sultan Hamengku Buwono yang menaruh perhatian besar terhadap kebahagiaan saya; penerjemah saya, Wiryawan, yang dengan sabar menenggang jadwal padat saya meskipun dia sibuk dengan urusan revolusi; dan yang terakhir namun bukan yang paling tidak berarti, Illias Yacob, pesuruh kantor saya yang pada saat saya hendak meninggalkan Indonesia menulis: "Semoga Tuhan memberi kemuliaan dan nasib baik kepada Bapak untuk bertemu dengan orang yang tepat dan berbudi untuk mengungkapkan kepentingan-kepentingan nasional Bapak sendiri . . . kini untuk kedua kalinya tuan saya meninggalkan Jakarta dan pergi untuk tidak kembali lagi." Cara Indonesia untuk mengungkapkan perasaannya ini pasti benar-benar murni.

Mengenal pemimpin-pemimpin Indonesia dalam beberapa kapasitas saya merupakan kesempatan istimewa bagi saya. Saya terlibat dalam berbagai diskusi bersama mereka untuk mengikuti jalan pikiran mereka, termasuk ke dalamnya saling mengejek satu sama lain. Sebagai peminat revolusi mereka, saya mudah menemui mereka, tanpa ada pembatasan atau protokol yang merintangai hubungan pribadi saya dengan mereka. Mereka mempercayai saya sepenuhnya sebagai simpatisan dan memberikan kepercayaan mereka yang besar kepada saya. Beberapa kawan Belanda juga memungkinkan saya untuk berfungsi sepenuhnya, baik sebagai wartawan maupun, kemudian, sebagai diplomat. Meskipun resminya saya tidak disukai, penguasa Belanda tidak pernah

bersikap tidak sopan terhadap saya dan menjelang kepergian saya, paling tidak beberapa di antara mereka menghargai sikap saya yang tidak memihak.

Kasih sayang dan dorongan Jawaharlal Nehru kepada saya sebagai wartawan sangat memberi semangat pada pekerjaan dan masa-masa saya berada di Indonesia. Sama halnya dengan kebaikan Mahatma Gandhi yang tidak berkesudahan, yang sesudah mempertimbangkan menolak memberi jawaban tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan saya yang berkaitan dengan masalah Indonesia – karena khawatir akan membuat malu Nehru yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri – tetapi mengirim juga kartu pos dengan tulisan tangannya, "Maafkanlah saya karena saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan."

Kunjungan pertama saya ke Indonesia tidak direncanakan terlebih dahulu. Pada bulan September 1945, nasib membawa saya bersama-sama pasukan India ke sana, sebagai petugas hubungan masyarakat mereka. Sebelumnya, di Birma dan Malaysia, saya telah menjalin hubungan dengan personalia Tentara Nasional India yang dibentuk oleh Netaji Subash Chandra Bose dan mempelajarinya. Rasa bakti patriotisme dan semangat revolusi yang dikobarkan Tentara Nasional India di kalangan kelas pekerja India di Birma dan para penyadap karet di Malaysia meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri saya. Sebelum mendarat di Jakarta, kami telah mempunyai sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di Indonesia semenjak keruntuhan Angkatan Perang Jepang. Namun akan adanya revolusi sama sekali tak terlintas dalam pikiran kami. Kami yakin akan adanya rezim yang didukung dan didirikan oleh Jepang di Jakarta, seperti rezim Ba Maw di Birma. Namun, saya menjadi ragu setelah melihat Tentara Nasional India mampu menyeimbangkan keputusan-keputusan politisnya sendiri dengan kebutuhan untuk

bertindak dalam parameter bantuan logistik Jepang dan tuntutan kepentingan keamanan mereka. Pada waktu itu saya juga bernasib baik karena saya berada bersama salah seorang wartawan India yang paling cakap, yaitu T.G. Narayanan dari *The Hindu*. Berjam-jam kami mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia – yang benar-benar berbeda dengan segala yang telah terjadi di India – dan pengalaman maupun masa kerja Narayanan yang lebih lama sangat berharga bagi saya. Narayananlah yang membuka mata saya mengenai revolusi di Indonesia, kemudian saya memutuskan untuk membaktikan diri saya pada tugas untuk memperkenalkannya kepada India dan, melalui India, kepada seluruh dunia.

Saya terperanjat. Revolusi tersebut ternyata bukanlah sebuah revolusi klasik yang penuh dengan peperangan yang berkepanjangan dan kelompok-kelompok bersenjata menyerbu benteng-benteng seperti Bastille, atau kota-kota yang berjatuhan tiap hari ke tangan pemberontak. Sifat Revolusi Indonesia sangat berbeda dan yang sama dengan contoh klasik hanyalah sifatnya yang terus mempertahankan semangat revolusioner penduduk agar terus berkobar-kobar guna dilepaskan pada waktunya. Tentu saja terjadi juga hal-hal biasa, seperti seringnya terjadi bentrokan senjata, pemblokadean jalan-jalan dan, tidak ketinggalan, kekejaman-kekejaman kecil. Akan tetapi wajah-wajah rakyat yang bersenjatakan bermacam-macam senjata, dari karaben, pistol dan mortir, hingga belati maupun pisau dapur dengan sabuk peluru yang dipakai longgar dan granat-granat tergantunglah yang memberi kesan pertama akan orang-orang yang bertekad bulat dan siap mempertahankan kemerdekaan yang baru saja mereka rebut. Situasi yang benar-benar luar biasa tegang, yang tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tidak ada bentrokan senjata yang terencana seperti yang kita gunakan dalam operasi-operasi militer atau pertahanan. Bukan juga

anarki karena terdapat bukti adanya baik pengarah pusat maupun kadar disiplin. Sungguh menakjubkan, bagaimana perlengkapan seperti ini dapat dibangun di bawah kekuasaan militer Jepang. Sukarno dengan hati-hati mengipasi api semangat revolusi dan secara sembunyi-sembunyi Hatta menggunakan kedudukannya bersama pemerintah Jepang untuk memeliharanya, dan tugas untuk mengorganisasi serta mengarahkan semangat revolusi itu terletak di tangan Syahrir yang masih muda, dibantu kelompok-kelompok pelajarnya yang setia.

Namun, begitu pasukan Sekutu mendarat di Jakarta, dengan persenjataan yang lebih unggul dan tenaga manusia yang terlatih serta teruji, fase baru masuk ke dalam pandangan Republik Indonesia yang baru saja lahir itu. Fase itu terdiri dari pemakaian taktik keahlian, kesabaran, dan propaganda yang baru, dan sekaligus, mempertahankan tempo semangat revolusioner yang tinggi dan mempersiapkan bala tentara yang dibentuk dan dilatih Jepang maupun pasukan gerilya untuk melawan usaha pendudukan seluruh negeri, seandainya hal itu terjadi. Kekuatan organisasi dan persatuan di belakang revolusi ini dimengerti oleh Markas Besar Sekutu, yang menyadari bahwa untuk menduduki seluruh negeri memerlukan lebih banyak tentara daripada satu divisi pasukan yang telah mereka terjunkan dan banyak korban jiwa yang mungkin tidak akan ditenggang oleh pendapat umum, baik di Inggris maupun di India. Bagian terbesar pasukan Sekutu berasal dari India. Patut dipuji bahwa bangsa Indonesia telah bersikap kepala dingin, memelihara khususnya persatuan mereka, dan tidak melakukan usaha-usaha yang bersifat petualang hingga Republik berhasil menegaskan kemerdekaannya. Berbagai insiden kejam di Surabaya pada bulan Oktober 1945 merupakan penyimpangan dalam hal ini. Baik para pemberontak Indonesia yang tak dapat dikendalikan maupun provokasi Inggris yang tidak dikehendaki ikut

menyebabkan terjadinya kebakaran besar pertama di sana. Setelah pihak Republik, dalam wujud Presiden Sukarno, menyelamatkan situasi dari para pemberontak, pihak Inggris, alih-alih membantu Republik lebih lanjut, malah memperhebatnya dengan operasi militer dari darat, laut, dan udara.

BAB I

KEGEMPARAN REVOLUSI

Surabaya, 26 Oktober 1945. Pagi yang cerah. Kehidupan tampak berjalan normal: toko-toko buka, becak yang tak terhitung jumlahnya meluncur di jalan dengan kecepatan teratur, sudut-sudut jalan disibukkan oleh para penjaja keliling yang sedang berdagang. Di sana-sini, beberapa kendaraan bermotor yang berlainan jenis dan sudah kuno lalu lalang bergantian, mendenguskan asap menjengkelkan dari bahan bakar yang belum disaring. Bendera Merah Putih berkibar di semua jenis kendaraan dan panji-panji besar berwarna merah putih berkibar ditiup angin pagi yang sepoi-sepoi dari laut. Kata "MERDEKA" yang ditulis dengan warna putih di atas kain terpal merah membentang di atas jalan, dan slogan-slogan anti-kolonial yang dicat dengan huruf-huruf besar pada tembok-tembok lebar di berbagai tempat yang strategis, menatap dengan angkuhnya.

Begitulah kota pelabuhan yang terkenal, Surabaya, menyapa pasukan India dari Brigade Infanteri Ke-49, yang mendarat sehari sebelumnya di tengah-tengah sikap penduduk Indonesia yang acuh tak acuh namun penuh kewaspadaan. Tetapi, tanda-tanda itu tidak menyenangkan bagi kelompok Rajputs dan Mahrattas, ketika mereka membaca kata-kata "Azadi ya Kunrezi" (Kemerdekaan atau Pertumpahan Darah) jelas-jelas tertulis dalam bahasa Urdu Roma di sepanjang tembok-tembok

pelindung pelabuhan dan dermaga.

Bagi saya, tulisan itu merupakan getaran jiwa yang mendirikan bulu roma, karena menyadari akhirnya saya tiba pada janji untuk berjumpa dengan Takdir!

Bala tentara India tercengang melihat situasi ini dan para veteran Afrika Utara dan Birma ini lalu bertanya kepada para perwira mereka apakah mereka diharapkan untuk bertempur melawan kaum nasionalis Indonesia. Sebelumnya, Badan Intelijen Sekutu telah memberi laporan singkat di Jakarta, bahwa Surabaya diduga akan bergolak karena kota itu diketahui merupakan pusat kaum pemberontak di bawah pimpinan "Komunis".

Pada waktu saya dan Letnan Tony Cardew dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengendarai jip memasuki kota dan menuju tempat penginapan kami di Hotel Liberty, kami melihat beberapa tempat di sepanjang jalan dijaga oleh polisi dan para pemuda milisi Indonesia yang bersenjata lengkap. Barikade-barikade didirikan di beberapa jalan masuk. Salam 'Selamat Pagi' saya ditanggapi dengan cemooh kasar. Tidak seperti di Jakarta, yang penduduknya benar-benar ramah.

Begitu terhimpit oleh firasat-firasat tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang, buku harian saya tanggal 25 Oktober, yang saya tulis sebelum tidur, berbunyi: "... semua kelihatannya mepedaya ... mengingat insiden-insiden yang terjadi sebelum ini di Jakarta dan sekitarnya, yaitu adanya bentrokan antara pasukan India dengan kelompok-kelompok bersenjata Indonesia, saya kira, warga Surabaya mulai menganggap kami sebagai barisan depan imperialisme Belanda ... sayang sekali, sebagian besar dari kami di sini adalah orang-orang India dan menghargai, seperti pemimpin mereka di Jakarta, bahwa kami tidak datang ke Jawa atas kehendak kami sendiri. Kami bertemu dengan beberapa penduduk India setempat dan mereka memperingatkan agar kami berhati-hati. . ."

Pagi tanggal 26 Oktober yang cerah dan dingin segera berubah menjadi siang yang lembab dan menyesakkan bersamaan dengan naiknya matahari ke puncaknya. Saya mendengar atau mengira mendengar suara genderang dari kuningan. Brigadir Mallaby, seorang perwira yang mendapat banyak tanda jasa sebagai tentara yang berbakat tetapi lembut hati, yang memegang komando pasukan, memberi tahu pers internasional di markas besarnya yang telah ia pindahkan ke dalam kota, "Saya telah memberi tahu Gubernur Indonesia untuk Surabaya bahwa sayalah penguasa kota ini." Pembukaan buku harian saya tanggal itu mencatat: "Tetapi sayang, hal ini sering terjadi dengan pemimpin-pemimpin yang telah masyhur. . . . Dia salah menilai situasi setempat dan memandangnya dari segi kekuatan resmi dan persenjataan. Dan dengan daya tembak! Menurut satu perkiraan yang dilakukan kemudian, ada 15.000 tentara terlatih Indonesia di Surabaya dan jauh lebih banyak lagi jumlah pasukan liar yang bersenjata hingga ke senapan.

Brigadir Mallaby tidak memperhitungkan rasa nasionalisme yang kuat dan kekuatan massa Tampaknya, Mallaby tidak menilai situasi sebagaimana mestinya dan mengabaikan kekuatan bangsa Indonesia . . . Pantulan Glubb Pasha! Mengulur-ulur waktu, permainan yang biasa Betapa menyesalnya mengapa saya bukanlah wartawan yang bebas melaporkan apa yang saya lihat (Kemudian saya bekerja sebagai Pengamat Ketenteraan India, singkatnya sebagai Wartawan Militer yang meliputi kegiatan-kegiatan pasukan) Bagaimanapun juga, tugas di pasukan yang diberikan oleh negeri saya lebih dulu dan saya tidak dapat meninggalkannya"

Begitu matahari yang terik memancarkan bayang-bayang terakhirnya, teriakan dan hiruk-pikuk kota juga mereda disertai protes yang bertahap ketika para wanita dan pria yang bergerak cepat bergegas pulang ke rumah, dengan anggota badan terasa sakit-sakit, untuk menikmati santapan utama mereka hari itu. Di Hotel Liberty

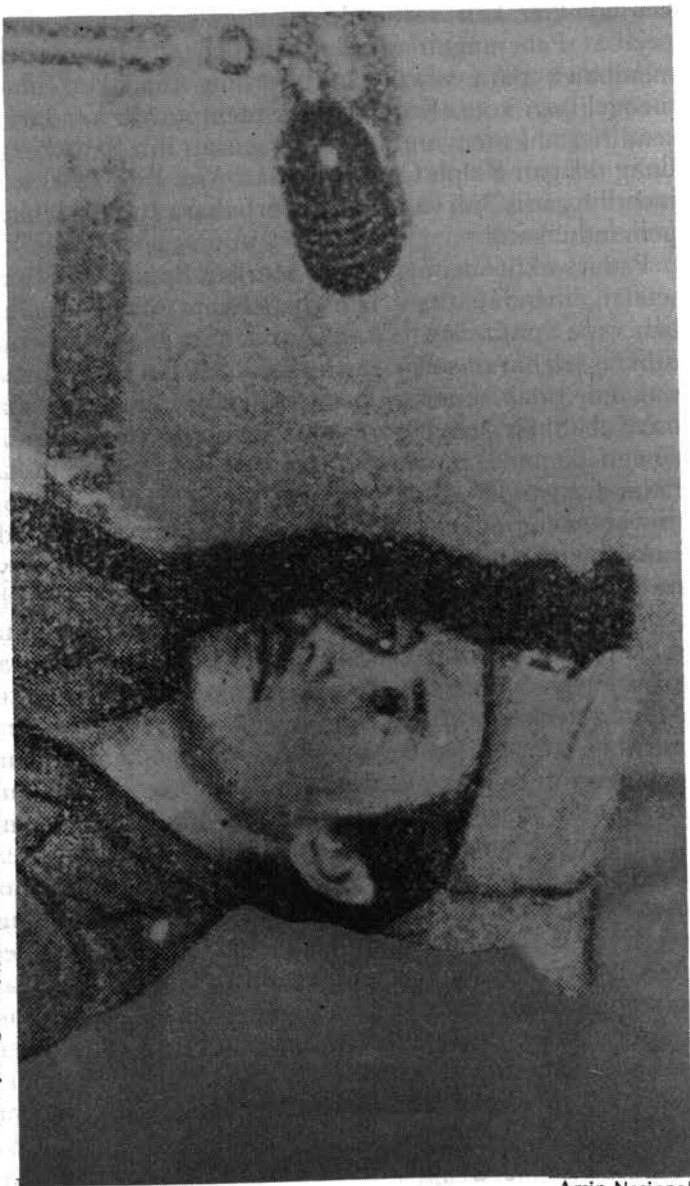
makan malam sudah lama berlalu dan para pengawal kami, Rajputana Rifles, mengambil posisi di sekeliling hotel. Namun, saya masih tertinggal sendirian di salon tamu, merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi siang tadi dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas kami. Keheningan malam itu sesekali dipecahkan oleh gelak tawa beberapa orang yang tidak peduli akan situasi dan masih bergembira ria, menenggelamkan diri dalam bir yang melimpah di bar. Saya tersentak dari lamunan ketika mendengar beberapa bar lagu "Merdeka" (lagu nasional Indonesia mengenai kemerdekaan) yang dimainkan pada piano di sudut kamar tamu yang jauh. Itulah si kecil Meena, putri manajer hotel, yang sungguh pendek untuk usianya yang enam belas tahun, seperti semua bangsanya. Diam-diam Meena menyelip masuk seperti seekor kucing dan bermain dengan jari-jari kecilnya, namun dengan semangat membara di matanya. Lagu itu mengusik perasaan saya. Malam itu saya menulis dalam buku harian: "Belum berumur enam belas tahun, dia menghipnotis saya dengan kegiatannya bagi kemerdekaan negaranya. Dia hanya dapat berbicara bahasa Melayu dan tidak mengenal bahasa Inggris . . . ketika saya mengucapkan 'Salamat Malam' kepadanya, dia memohon dengan sangat agar saya mencari perlindungan selama hari-hari mendatang . . . meskipun saya menganggap dia kekanak-kanakan, air matanya menyentuh hati. Baru ketika berbaring untuk tidurlah muncul perasaan samar-samar di hati, bahwa mungkin banjir darah sedang menunggu kami. . . beberapa orang masih tenggelam dalam bir di bar! Sudah tengah malam, saya harus tidur . . .".

27 Oktober: "Kelihatannya merupakan hari yang cerah dengan harapan-harapan baru akan perdamaian. Jamal yang berjenggot, (Tri Suci? *Red.*) yang mungil dan menawan dalam kain batik cokelat dan kebaya kuning lembutnya, dan gadis Kristen Bali dengan rok dalam biru dan blusnya yang rapi, semua anggota Pemuda (sayap

pemuda Gerakan Nasional) menemui saya atas perintah pejabat Penerangan mereka di Jakarta. Mereka ingin membawa para wartawan tur yang diadakan untuk mengelilingi kota. Karena tidak mempunyai kendaraan sendiri kami menyambut baik gagasan ini. Saya bergabung dengan Ralph Conniston dari *New York Times* yang memilih gadis Bali yang lancar berbahasa Inggris sebagai pemandu kami.

Pada waktu meninggalkan Markas Besar Kepolisian setelah mendapatkan izin bepergian, kami melihat beberapa Spitfire RAF (Angkatan Udara Inggris) menjatuhkan selebaran-selebaran ke kota. Selebaran-selebaran sial dan tidak tepat waktunya ini tak lama kemudian menyebabkan kematian sia-sia ratusan tentara India, ribuan pemuda Indonesia yang bangga, dan sejumlah besar masyarakat yang tidak berdosa. Polisi menghalangi rakyat memungut selebaran-selebaran itu. Pemandu kami membaca selebaran dan menjadi muram. Saya mengambilnya dari tangannya. Isi selebaran itu ditulis dalam bahasa Melayu dan artinya benar-benar jelas bagi saya. Saya merasa bangsa Indonesia yang bangga tidak akan menyerahkan senjata mereka seperti yang dituntut dalam selebaran itu. Secara terang, pemandu kami memberitahukan bahwa ia melihat adanya bahaya yang mengancam hari-hari esok, lalu bergegas membawa kami ke Kantor Berita Antara. Setelah membawa kami berkeliling, gadis Bali itu membawa kami kembali ke hotel. Saya dan Kapten Honavar, seorang rekan dari Humas Tentara India, keluar hotel untuk mengunjungi sejumlah kecil pedagang India di kota. Kundan, presiden Asosiasi Warga India setempat, menjamu kami dengan santapan siang yang nikmat dan menjelaskan situasi secara singkat. Kundan yang bertubuh pendek, terpelajar, dan mempunyai pertalian dengan gerakan nasionalis Islam, menaruh simpati yang besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia: selain dukungan moral, mereka telah banyak juga memberi bantuan kepada Sukarno

Bung Tomo. Pidatonya di radio pun mampu membakar semangat rakyat, tidak hanya di kota Surabaya.



Arsip Nasional

dan kawan-kawannya. Meskipun demikian, seperti kebanyakan pedagang dari Sind (sekarang termasuk wilayah Pakistan) yang telah menyebar ke daerah-daerah yang jauh di dunia untuk keperluan dagangnya, Kundan sangat berhati-hati dalam melakukan pendekatan. Dia mengatakan kepada kami, walaupun Sukarno mengendalikan seluruh kekuatan nasionalis di Surabaya, seperti di tempat-tempat lainnya, di Jawa, masih ada orang-orang komunis yang ingin berjalan sendiri. Demikian pula halnya dengan pasukan-pasukan liar bersenjata yang lekas naik darah di bawah pemimpin muda macam Robin Hood, Bung Tomo. Jelaslah bagi saya bahwa kami mungkin akan segera terlibat dalam bentrokan-bentrokan besar, yang berbeda dengan di Jakarta. Akan tetapi, Honavar masih sedang merenungkan tari-tarian Jawa dan wayang, serta janji Kundan untuk mengadakan pertunjukan tari Bali pada hari berikutnya!

Kundan adalah seorang yang bersifat sosial yang ingin sekali menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan senjata di Surabaya. Sebagai pemimpin lima ratus orang India di Surabaya, Kundan berhasil mencegah terjadinya bentrokan pada hari pertama kedatangan kami, tanggal 25 Oktober. Sekali lagi, dia menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika pertempuran berkecamuk tanggal 27 Oktober. Mobilnya yang mengibarkan bendera putih meluncur di sepanjang jalan yang disapu oleh peluru antara Markas Besar Inggris dan para pejabat Indonesia. Ketika Brigadir Mallaby tertembak mati selama perundingan-perundingan gencatan senjata, Kundan berada di sampingnya dan meloloskan diri dengan menderita luka-luka ringan.

Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami melihat kegiatan di kota meningkat. Anggota-anggota Pemuda yang bersenjata lengkap bergegas menuju berbagai daerah dan meletakkan rintangan di jalan-jalan. Petang itu, penerangan ringkas kepada pers di Markas Besar Brigade diberikan dalam suasana yang tegang. Wajah-

wajah muram tanpa senyum. Staf perwira yang biasanya berwajah ceria, Aslam, Chopra, dan Singh, terlihat serius. Penyebabnya segera terbuka sesudah kami sedikit demi sedikit mengumpulkan laporan-laporan dengan tanda-tanda yang tidak menyenangkan, yaitu akan adanya pertempuran sengit. Mallaby menunjukkan sikap tenang meskipun sebenarnya amat gelisah. Brigadir itu memberi tahu kami bahwa Gubernur Indonesia Mustafa, telah melarikan diri dari kota tanpa memenuhi janji akan bekerja sama dalam melucuti senjata penduduk. Namun, Mallaby berhasil menahan pejabat lain yang berjanji akan melaksanakan perintah itu. Lebih lanjut, Brigadir Mallaby menyatakan dia sudah memberi tahu penduduk setempat bahwa dialah penguasa tempat ini dan semua orang Indonesia harus mengakui kekuasaannya. Buku harian saya hari itu mencatat: "Saya menilai pendekatan Mallaby sebagai keangkuhan belaka dan meninggalkan tempat brifing pers dengan perasaan kecewa melihat ketidakmampuan para pemimpin militer kami untuk menghindarkan terjadinya insiden. Saya kembali ke hotel dan, untuk pertama kalinya, memberi tahu Honavar bahwa kami akan menghadapi kesulitan dan betapa saya merasa kasihan kepada pasukan India. Nampaknya para prajurit dari Afrika Utara dan Birma ini selamanya akan terperangkap dalam jaringan nasib, tempat mereka melekat secara menyedihkan . . ., si kecil Meena memainkan pianonya lagi, kali ini *Moonlight Sonata* (Terang Bulan) dan saya teringat akan kota Delhi pada masa lalu, *Red Fort* (Benteng Merah) Jamuna, dan kawan-kawan saya . . . gadis cilik itu memandang pilu dan memohon agar saya segera meninggalkan hotel ini dan Surabaya, tetapi saya katakan kepadanya bahwa saya, orang India, tidak akan melarikan diri bila menghadapi bahaya . . . Honavar menyela masuk dan memainkan beberapa melodi India yang menyentuh perasaan saya lebih dalam lagi, lalu saya pergi tidur . . . Mungkin semua kekhawatiran saya ini hanya bayangan belaka, tetapi mengapa

orang-orang Indonesia berpawai dengan memakai mobil-mobil baja dan tank-tank yang mereka rampas dari Jepang . . . Mungkin besok semuanya akan tenang . . .".

28 Oktober: Kami bangun di pagi tenang yang menggelisahkan. Fajar yang cerah tertutup oleh langit yang terdiri dari potongan-potongan awan rendah, seakan-akan ratusan lidah api telah dinyalakan di kota. Matahari yang terik sengaja mengintip dari balik awan, seakan-akan menyesali kehadiran kami. Pagi-pagi sekali, Jamal singgah untuk minta maaf atas pembatalan acara kemarin secara mendadak dan berjanji akan membawa kami mengelilingi kota segera setelah suasana tenang. Sekali lagi saya dan Honavar makan siang bersama Kundan dan berbincang-bincang hingga pukul empat sore . . . dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mendengar tembakan senapan api yang pertama dan menyadari kedamaian kota telah dikoyakkan. . . Terdengar lebih banyak lagi tembakan dan menjelang malam suara pertempuran terdengar menghebat . . . sebuah peleton Jat Rajputana Rifles, yang menjaga kami di hotel, bersiaga . . . Pukul tujuh, tembakan mulai mengarah ke tempat kami, tetapi pasukan kami menahan diri untuk tidak menembak. . . Mayor Finlay dari RAPWI Australia mengepalai kami semua yang terdiri dari Rajputana Rifles, petugas-petugas humas, RAPWI, dan personalia FSS sebagai kekuatan pertahanan campuran. Karena tembakan yang dilancarkan menghebat, kami semua menghadapinya selama dua jam dengan menahan diri untuk tidak menembak. Rekan-rekan humas saya, Honavar, Donald, dan Irwin, mengambil posisi bersama pasukan, sedangkan saya ditugaskan di pos komando untuk memantau Markas Besar Brigade di radio penerima kami karena jalur komunikasi antara kami dengan mereka telah terputus. Di radio kami mendengar semua pembicaraan antara Markas Besar dengan unit-unit yang masing-masing mengirimkan tanda SOS. Markas Besar melaporkan bahwa mereka sendiri sedang

terkepung dan pertempuran sengit tengah berlangsung. Beberapa panggilan telepon bergantian masuk. Salah satunya datang dari Kundan yang mendesak saya untuk memberi tahu Markas Besar bahwa pihak Indonesia ingin sekali menghentikan pertempuran. Saya menjawab bahwa saya tidak mempunyai kontak dengan Markas Besar dan tidak dapat meninggalkan pos dan karenanya Kundan harus mendatangi sendiri Markas Besar beserta pengawal yang membawa bendera putih. Pukul sepuluh malam itu Markas Besar mengumumkan gencatan senjata. Jelaslah bahwa Kundan telah berhasil. Kami meninggalkan pos. Semua, kecuali para pengawal, diminta untuk tidur sedangkan saya dan Donald bertugas. Tidak ada lagi tembakan, kecuali kadang-kadang terdengar suara letusan senapan.

29 Oktober: Pagi yang suram tidak membawa kedamaian pada kami, karena tentara Indonesia bergerak makin dekat ke arah kami dan menembak dengan senjata otomatis pada jarak dekat. Setelah salah seorang anggota pasukan pengawal cedera berat, baru kesatuan kami membuka tembakan. Tidak lama kemudian, dua korban lagi jatuh di pihak kami. Karena kekurangan serdadu, kami mundur ke loteng hotel dengan hanya bersenjatakan 4 senapan bren, 20 senapan, dan 10 pistol, sedangkan 400 tentara Indonesia yang mengepung kami bersenjatakan *Army Gun*, bren, revolver mesin, pistol, senapan, samurai, tongkat bambu dan bambu runcing. Segera tembakan datang dari segala arah, termasuk dari atap genting. Empat orang lagi terluka dan dua terbaring menyongsong maut karena kurangnya perawatan medis. Tak ada pertolongan yang dapat diharapkan mengingat detasemen-detasemen lain berada dalam kesulitan yang sama. Seluruh aula gedung bioskop, tempat menginap satu detasemen pasukan India, dibakar oleh orang-orang Indonesia sehingga menimbulkan kerugian yang besar sekali kepada pasukan kami.

Setelah kira-kira dua jam mengadakan perlawanan

dan karena tidak ada bantuan yang datang, kami memutuskan untuk menyerah. Mayor Finlay memimpin kami menuruni tangga sambil membawa bendera putih. Tentara Indonesia mengangkat korban di pihak kami ke dalam mobil-mobil ambulans dan kami dinaikkan ke atas truk-truk di bawah tolongan bayonet berkilat untuk dibawa ke penjara Kalisosok.

Melihat kami dibawa pergi oleh para pemuda bersenjatakan senapan, berbayonet, para wanita India yang bertempat tinggal di rumah yang berdampingan dengan hotel, mulai meratap mengkhawatirkan keselamatan kami. Tersentuh oleh keprihatinan keibuan khas India di negeri asing ini, dengan izin pengawal, saya membungkukkan badan kepada wanita tertua dan meyakinkan mereka bahwa saya akan segera kembali untuk mengunjungi mereka. Janji ini saya tepati beberapa minggu setelah pasukan kami menduduki Surabaya.

Sementara itu, atas desakan para penasihatnya dan Markas Besar Sekutu di Jakarta, Presiden Sukarno bergegas menuju Surabaya, bersama-sama Menteri Penerangan Amir Syarifuddin yang mempunyai pengaruh penting di kota itu, terutama di kalangan komunis.

Enam jam di penjara Kalisosok merupakan pengalaman tersendiri. Tiga orang di antara kami dalam satu sel kecil diberi nasi bercampur daging berbau busuk dan kopi pahit. Beberapa rekan saya mencurigai daging itu sebagai daging kawan kami yang terbunuh, karena itu kami hanya mengambil kopi pahit. Pengalaman pertama sebagai tawanan membuat kami melamun untuk sementara waktu. Tetapi, beberapa jam kemudian, ketika kami tengah merenungkan bagaimana kami akan diselamatkan, Menteri Amir Syarifuddin (yang telah berkawan akrab dengan saya di Jakarta menjenguk saya dan mengatakan seluruh kejadian ini merupakan kesalahan tragis pada kedua belah pihak. Dikatakannya bahwa Sukarno, yang berada di kota guna memulihkan ketenangan dan kedamaian, telah memerintahkan pelepasan

kami dan kami akan dikembalikan ke pihak Inggris begitu komunikasi bebas terbentuk. Petang harinya, penghubung Jakarta saya, Sofyan Tanjung (famili Nyonya Sukarno) muncul bersama pengawal bersenjata dan membawa semua wartawan serta juru foto, termasuk petugas humas, ke Kantor Gubernur setempat. Di sana dihidangkan beraneka macam makanan bagi kami dan para pejabat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah terjadi.

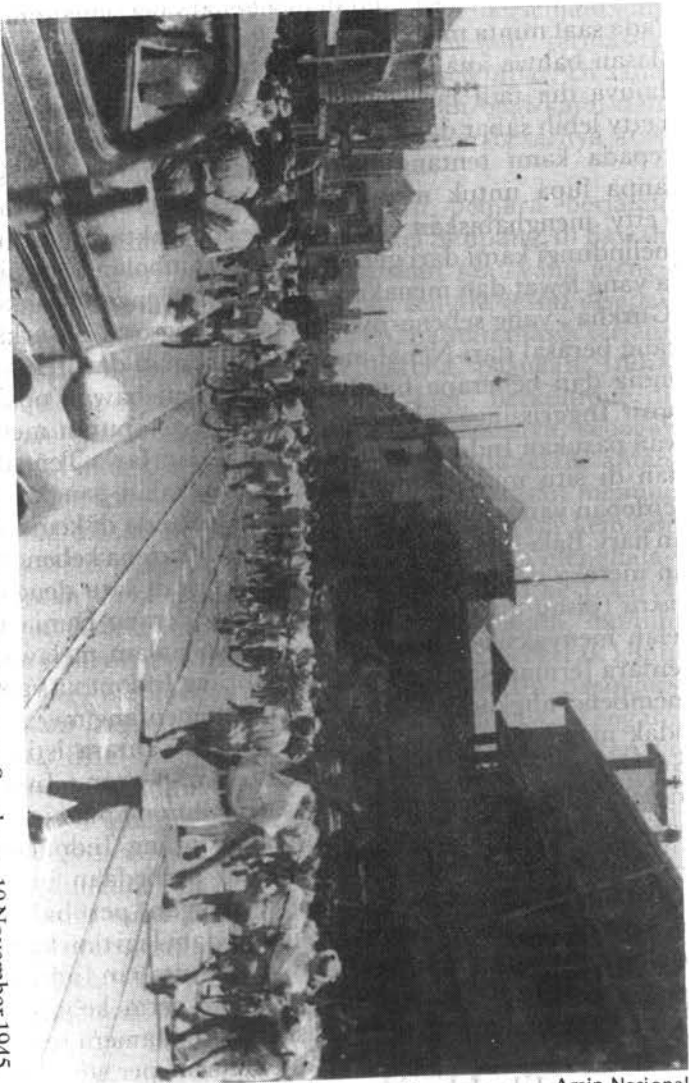
Meskipun waktu-waktu kami di penjara berjalan datar, empat hari berikutnya di Hotel Simpang, di bawah penahanan perlindungan, merupakan saat yang mengasyikkan dan mendidik. Gencatan senjata resmi disepakati menyusul kunjungan Sukarno, namun masih terjadi bentrokan-bentrokan di kota karena pasukan India mengelompok lagi untuk, sekali lagi, berkumpul di daerah pelabuhan dan mempertahankannya sebagai basis. Pihak Indonesia menganggap tidaklah aman mengirim kami menyeberangi garis perbatasan menuju Markas Besar Inggris. Kami mencoba, tetapi kembali lagi karena pasukan liar bersenjata Indonesia menghalangi jalan kami. Diusahakan mengirim kami ke Jakarta dengan kereta api dan pengawalan bersenjata, namun kami terhenti di Madiun dan tidak dapat bergerak lebih jauh lagi karena pertempuran sengit antara pasukan-pasukan India dan Indonesia berkobar di Jawa Tengah. Berita BBC yang kami dengar di radio milik kepala stasiun di Madiun sangat menarik: "Semua keadaan di Surabaya tenang!" Kereta api membawa kami kembali ke Surabaya 'yang tenang' dan ke tempat penahanan perlindungan.

Selama masa ini, kami ditempatkan di bawah tanggung jawab pemimpin pemuda yang riang lagi bersemangat, Nona Yetty Zain, yang para anggota keluarganya telah menjadi kawan saya di Jakarta. Saudara laki-laki Yetty yang bernama Rustam-lah yang mengacukan samurai di tangannya kepada pemimpin pasukan liar

Indonesia yang menawan kami. Kemudian dia meneriaki saya dengan kata-kata, "Gurkha tutup" (Gurkha tutup mulut), walaupun dia sudah mengenal saya sebelumnya. Pada saat minta maaf kemudian Rustam mengemukakan alasan bahwa anak buahnya akan mencurigainya seandainya dia tadi menunjukkan keakraban. Akan tetapi Yetty lebih sabar dan dengan panjang lebar menjelaskan kepada kami tentang paham nasionalisme Indonesia tanpa lupa untuk menjawab setiap pertanyaan kami. Yetty menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melindungi kami dari gerombolan-gerombolan bersenjata yang lewat dan menakut-nakuti kami dengan teriakan 'Gurkha', yang sebenarnya bukan. Orang-orang Gurkha yang berasal dari Nepal merupakan bagian dari tentara India dan beberapa batalyon Gurkha di bawah opsir-opsir Inggris juga dilibatkan dalam pertempuran melawan pasukan Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan di situ mereka membangun pangkalan-pangkalan terdepan yang penting bagi pasukan Belanda di kemudian hari. Bala tentara Gurkha ini dikenal karena kebengisan mereka dalam pertempuran satu lawan satu dengan *kukris* (pisau melengkung) mereka dan Perang Dunia II telah menyaksikan keberanian mereka dalam melawan tentara Jerman dan Jepang. Orang-orang Indonesia yang membenci angkatan bersenjata yang menentang mereka, tidak mengetahui bahwa ada perbedaan antara istilah Gurkha dan India, dan karena itu setiap orang India mereka anggap sebagai Gurkha. Bagaimanapun juga, bahkan juga dewasa ini, kebanyakan orang Indonesia nampaknya acuh tak acuh terhadap perbedaan ini.

Tanggal 1 November ditandai dengan perubahan suasana. Tampaknya matahari tidak kejam lagi dan kami benar-benar santai sesudah menikmati santapan Indonesia yang mewah dan keramahtamahan serta kebaikan Yetty, yang mengembalikan mesin tik dan kamera selain pakaian kami. Bagi saya pribadi, seluruh peristiwa ini nampak seolah-olah saya tengah memainkan peran

Suasana sekitar insiden penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye, Surabaya, 10 November 1945.



Arsip Nasional

dalam drama yang para penentangannya tidak asing bagi saya. Kesempatan ini dapat terjadi atau tidak terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya bersyukur kepada Nasib karena memberikan pengalaman ini kepada saya. Setelah kata-kata perpisahan yang ramah, kami dikawal menuju Markas Besar Inggris di daerah benteng dan secara resmi diserahkan. Beberapa hari kemudian, tanggal 5 November, seluruh kelompok pers diberangkatkan ke Singapura dengan kapal, bersama dengan penerbangan pertama para pengungsi yang terdiri dari 500 wanita dan anak-anak Belanda serta Indo (-Eropa), yang harus meninggalkan rumah mereka.

Dalam jaringan Nasib di mana saya berada ketika itu, di satu sisi saya tertarik dan tergetar akan nasionalisme bangsa Indonesia dalam suasana revolusi dan, di sisi lain, adalah tugas saya sebagai pengamat ketentaraan India untuk menerbitkan berita mengenai kegiatan pasukan-pasukan India. Meskipun pada fase sebelumnya di Jakarta saya tidak mengalami pertentangan antara rasa tertarik dan tugas, peristiwa-peristiwa di Surabaya sungguh membuat pilihan tidak dapat dielakkan lagi. Sebelum dapat memutuskan, saya kembali ke Surabaya awal November 1945 untuk menyaksikan serangan-serangan yang dilancarkan pasukan-pasukan baru dari Divisi Kelima India guna mengamankan Surabaya dan sekitarnya.

Setelah mengambil keputusan bahwa prestise pasukan Inggris-India tidak boleh dikorbankan, tanggal 10 November Divisi Kelima India, dengan serdadu-serdadu Gurkha, Inggris, dan Indianya, menyebar dari basis mereka di pelabuhan Surabaya sesudah melakukan pemboman yang gencar dari darat, laut dan udara terhadap tempat-tempat pemusatan pasukan Indonesia yang sudah diketahui. Setelah mencium persiapan-persiapan Inggris, tentara Indonesia mengundurkan diri, meninggalkan pasukan-pasukan liar, untuk melancarkan taktik pertahanan gerilya dan bumi hangus. Dengan

kebulatan tekad dan pengendalian diri sebagai semboyan mereka, pasukan-pasukan India-Inggris memerlukan waktu tujuh hari untuk membersihkan berbagai pertahanan utama dan yang lainnya untuk menduduki tempat-tempat petunjuk penting. Pihak Indonesia, dilaporkannya, menderita banyak korban tentara. Ratusan wanita dan anak-anak Cina, Belanda, dan Indo (-Eropa) berhasil diselamatkan oleh pasukan-pasukan India.

Inilah hubungan intim pertama saya dengan Revolusi Indonesia. Sikap tetap tenang memungkinkan saya menyaksikan hiruk-pikuk massa, kelompok-kelompok liar bersenjata yang sering membahayakan arah Revolusi dengan menentang pengarahannya dan kekuasaan pusat, serta taktik-taktik oportunistis milisi pimpinan komunis. Kesempatan ini juga yang membuat saya memilih untuk mempelajari Revolusi Indonesia sebagai pengamat. Dengan keputusan ini, saya segera pulang ke India, melepaskan jabatan ketentaraan saya dan kembali ke Jawa bulan Maret 1946, sebagai wartawan *Free Press Journal of Bombay*.

BAB II

LATAR BELAKANG TERJADINYA REVOLUSI

Sebagai seorang India, seruan-seruan nasionalisme Indonesia sudah tidak asing lagi bagi saya. Banyak persamaannya dengan India, tapi juga banyak perbedaannya yang sangat penting. Hubungan saya dengan kaum intelektual dan wartawan Indonesia membuahkan banyak bahan yang berkaitan dengan masalah ini. Laporan-laporan tentang perjuangan kolonial sudah tidak aneh bagi saya sebagai orang India dan ada beberapa persamaan dengan perkembangan serupa di India. Namun, pendekatan yang digunakan kedua kekuatan kolonial, yaitu Inggris dan Belanda, sungguh berlainan.

Kolonialisme dan imperialisme membawa serta benih-benih kebangkitan nasional dalam diri mereka. Meskipun telah mengeksploitasi negeri itu secara ekonomis, mereka para penguasa Belanda yang lunak di Indonesia berabad-abad lamanya telah memperdaya diri sendiri dengan kepercayaan bahwa pemerintahan kolonial-paternalisme mereka berbeda dengan yang diterapkan Spanyol, Portugis, dan bahkan Inggris, dan bahwa bangsa Indonesia pada umumnya sangat menghargai pemerintahan dari Negeri Belanda dan membalas sikap baik serta kebaikan hati yang diperlihatkan kepadanya oleh para pegawai pemerintah kolonial. Memang benar, setelah bertahun-tahun lamanya keadaan di dalam negeri diwarnai dengan percekocokan penduduk, yang menimbulkan korban pada

kedua belah pihak, rakyat menyambut baik pemerintahan bangsa asing yang kuat, terpusat, dan tidak memihak karena ia memulihkan hukum dan tata tertib, sehingga bercocok tanam dan beternak bisa berlangsung penuh damai. Selama seabad lebih, Belanda menutup mata terhadap makin melaratnya rakyat dan perekonomian mereka yang makin menjadi-jadi karena roda penindasan pemerintahan kolonial mengizinkan ekspor bahan mentah negeri ini demi keuntungan negeri induk dan peningkatan kekayaannya. Memang benar, meningkatnya jumlah sekolah, rumah sakit, jalan yang bersih, dan persediaan air minum yang sehat turut memenuhi tuntutan-tuntutan kesehatan dan kecerdasan bangsa Indonesia, yang juga menghargai prabawa dan penerapan administrasi modern tanpa merusak kerangka asli. Akan tetapi, pengeksploatasian perekonomian menggerogoti kekayaan negeri yang sangat penting, seperti di wilayah-wilayah imperialis dan kolonial lainnya di sekitarnya di Asia. Nasionalisme dengan tujuan ingin mempunyai pemerintahan sendiri secara bertahap dan nyata mulai mengobarkan rakyat. Satu tragedi dalam sejarah bangsa Indonesia ialah bahwa bangsa Belanda tidak merasakan adanya kebangkitan nasionalisme dalam hubungannya yang jelas, seperti bangsa Inggris, dan bertahun-tahun menganggap bahwa pemerintahan mereka, berlainan dengan bangsa Inggris, sangat paternalistik serta akan bertahan menghadapi berbagai perubahan sejarah pada masa itu. Bangsa Portugis juga ngotot beranggapan bahwa ideologi *assimilado* mereka mengucilkan koloni-koloni mereka dari perubahan ke arah pemerintahan sendiri.

Perlawanan bersenjata bangsa Indonesia terhadap Belanda menjadi terbengkalai setelah jatuhnya kerajaan Mataram terakhir dan kerajaan-kerajaan lainnya sekitar tahun 1830-an. Tetapi, nasionalisme sebagai faktor perlawanan terhadap pemerintahan asing tetap hidup dan membara. Tahun 1908, orang-orang Indonesia yang

senantiasa mendapatkan berbagai penerangan mengambil langkah positif. Dr. Wahidin Sudirohusodo, pensiunan dokter, dan R.A. Kartini (*sic.*) mendirikan Budi Utomo. Yang terakhir ini menjadi pelopor dalam membuka sekolah-sekolah untuk kaum wanita di Jawa. Orang-orang percaya kedua tokoh ini banyak diilhami oleh cita-cita penyair India, Dr. Rabindranath Tagore, dan sekolah-sekolah Budi Utomo didasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme. Tahun 1911 muncul Sarekat Islam karena kaum intelektual Indonesia merasa mereka membutuhkan badan yang lebih luas agar pandangan-pandangan nasionalis mempunyai wadah. Tujuan partai yang diakui adalah melindungi kepentingan perekonomian rakyat (terutama kaum pedagang) Jawa dan Sumatra, sebagai kebalikan dari kepentingan kaum pendatang Cina, yang telah didorong oleh Belanda untuk datang ke Indonesia. Partai ini juga dimaksudkan untuk melindungi iman Islam penduduk dari serangan para misionari Kristen dan memajukan kecerdasan bangsa Indonesia. Dengan tiga tujuan nasionalisme ini, pemimpin Sarekat Islam, Said Cokroaminoto, menjelaskan bahwa organisasi itu tidak anti-Belanda dan akan menempuh jalur konstitusional dalam mencari pertolongan. Sarekat kemudian menarik sejumlah besar pengikut dan hampir delapan puluh organisasi menggabungkan diri. Tuntutannya akan pemerintahan sendiri namun dalam perserikatan dengan bangsa Belanda, kira-kira mirip dengan tuntutan India akan status Dominion di bawah Takhta Kerajaan Inggris, diajukan kira-kira pada kurun waktu yang sama. Perkembangan serupa dalam pertumbuhan nasionalisme di dua negara kolonial yang saat itu tidak banyak mengadakan hubungan, merupakan ciri yang sangat memesonakan seorang pengamat India dan mengokohkan kepercayaan yang universal, bahwa gagasan yang menggerakkan hati (dan pikiran) manusia tidak mengenal batas geografis.

Tahun 1930-an merupakan dasawarsa meningkatnya



Repro Tempo

Mahatma Gandhi. "Kekuatannya terletak pada penggunaan kekuatan moral pada tingkat massa".

Kesederhanaan Gandhi (didampingi Nehru) dan sifatnya yang merakyat diam-diam menumbuhkan kepercayaan bangsa India pada kekuatan sendiri.



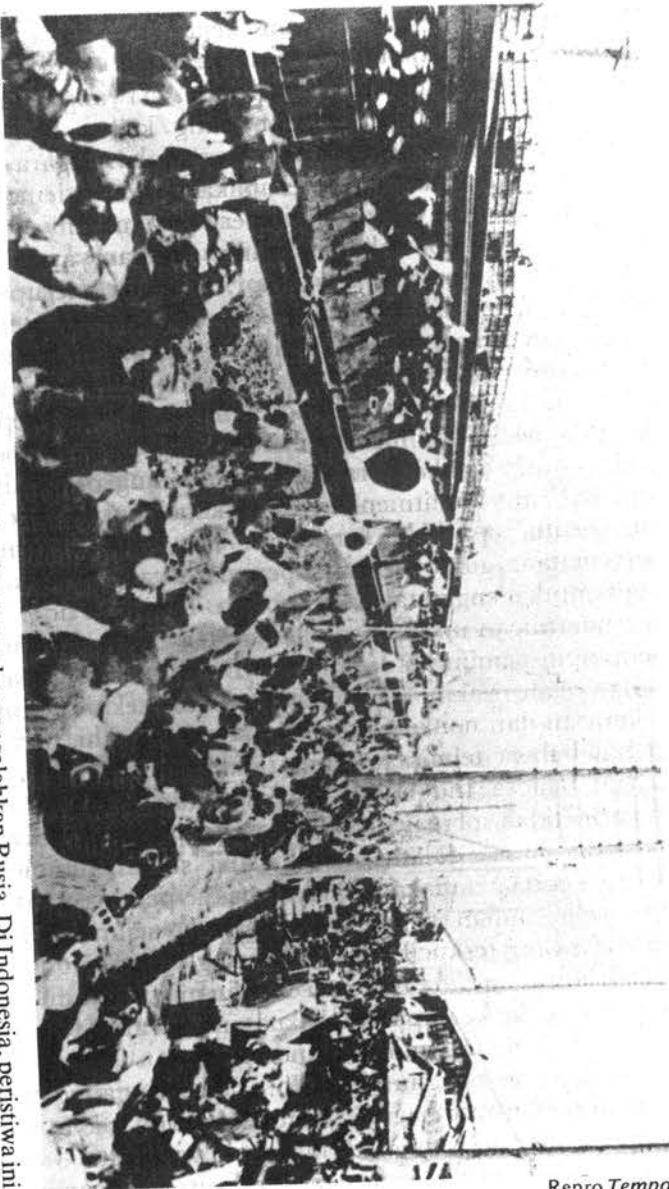
Repro Tempo

aktivitas anti-kolonial di Asia. Walaupun kaum nasionalis muda — kebanyakan pelajar — dari beberapa negara mengadakan langkah-langkah hubungan di berbagai pertemuan Liga Anti Imperialis di Brussels, beberapa ledakan kelompok nasionalis di bagian Asia yang berlainan tidak mempunyai hubungan satu sama lain, kecuali dorongan jiwa perjuangan yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Kebanyakan gejolak itu terjadi dengan spontan dan meletus sebagai bagian dari peristiwa yang berkembang di Eropa dan Timur Jauh serta ledakan-ledakan yang diakibatkan oleh sistem imperialis dan kolonial. Bersamaan dengan awan peperangan menyelimuti daratan Eropa, kaum nasionalis yang cerdas menyadari pandangan baru dan jelas akan adanya kesempatan guna menyusun pola-pola perjuangan ke arah tercapainya tujuan kemerdekaan. Selain itu, jumlah penduduk di kawasan ini bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan keperluan pangan dan sandang mereka yang meningkat menuntut adanya perubahan dari sistem ekonomi kolonial. Penguasa kolonial sendiri juga mengkhawatirkan masa depan koloni-koloni ini karena ancaman terhadap tanah air mereka di Eropa semakin mendekat.

Selama kurun waktu itu muncul dua pendekatan perjuangan nasionalis yang berbeda di Asia. Yang pertama, dengan nyata dan sukses dicobakan oleh Mahatma Gandhi di India, dengan tujuan mengubah sikap penguasa melalui proses pendidikan dan ketiadaan rasa benci. Kekuatannya terletak pada penggunaan kekuatan moral pada tingkat massa. Yang satunya lagi juga berakar di India, yang karena percaya pada usaha-usaha revolusioner, menggunakan saat lemahnya dan sibuknya penguasa karena peperangan yang berlarut-larut melawan Jerman untuk menimbulkan pemberontakan di seluruh negeri yang akhirnya akan menyebabkan berontaknya polisi dan kekuatan-kekuatan bersenjata pribumi. Kelompok-kelompok gerakan *Quit*

India (tinggalkan India) yang kejam dan juga usaha raksasa Subash Chandra Bose dalam membentuk Tentara Nasional India di wilayah-wilayah Asia yang diduduki Jepang menganut pendekatan yang kedua ini. Satu prasyarat bagi pendekatan pertama adalah negara yang pemerintahnya haruslah merupakan negara demokrasi yang dikagumi, yang dapat terbuka matanya pada kesia-siaan mempertahankan tanah jajahan yang dapat berkembang menjadi kewajiban daripada merupakan aset di masa mendatang. Kedua pendekatan ini pernah dijalankan di Indonesia dan masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri. Namun, tidak ada ketegaran: juga tidak ada agama maupun nada tambahan moral seperti di India. Meskipun mereka menaruh kepercayaan besar pada prinsip nonkooperasi dan menentang penjajahan, tapi tidak ada komitmen untuk tidak melakukan kekerasan. Tentu saja ada kenyataan tak adanya sumber persenjataan guna melawan penguasa yang tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan. Tapi juga tidak ada kecenderungan untuk menjalankan terorisme. Di antara pemimpin-pemimpin Indonesia, Dr. Mohamad Hatta, yang telah yakin akan kemampuan teknik tanpa-kekerasan dan nonkooperasi Mahatma Gandhi, beranggapan bahwa teknik tersebut tidak sesuai dengan perangai bangsa Indonesia. Di pihak lain, Sukarno dan Syahrir tidak percaya pada pemberontakan individu maupun massa dalam bentuk yang sopan, dan lebih percaya pada pembakaran emosi massa, pemberontakan, dan pelumpuhan penguasa. Tapi ada sejumlah kecil individu yang terkucil di Jawa — yang menganut ajaran Sufi-Islam yang sudah diramu dengan mistik Hindu yang percaya pada kemampuan kekuatan moral. Meskipun demikian, semua pemimpin Indonesia dan kebanyakan dari rakyat mengagumi Gandhi, dan menganggapnya sebagai mercu suar bagi perjuangan seluruh rakyat yang dijajah. Sukarno sering kali mengutip kata-kata Gandhi untuk mengobarkan semangat rakyatnya. Sementara

Rakyat Jepang menyambut keberhasilan Angkatan Laut mereka mengalahkan Rusia. Di Indonesia, peristiwa ini mempertebal harga diri kaum nasionalis terhadap bangsa kulit putih.



Repro Tempo

Syahrir, yang bertemu dengan pemimpin India itu di London tahun 1931, sangat terperanjat ketika mengetahui keterbukaan taktik Gandhi dalam menyampaikan pemberitahuan mengenai setiap gerakan perlawanan terhadap pemerintah Inggris.

Menyusul bangkitnya keinginan yang kuat pada kaum nasionalis yang ditimbulkan oleh Sarekat Islam pada tahun 1916, dampak peristiwa-peristiwa luar seperti pemberontakan 'Boxer' di Cina, desakan rakyat Filipina yang tidak henti-hentinya supaya diberi porsi pemerintahan sendiri yang lebih besar, dan kemenangan-kemenangan Angkatan Laut Jepang atas Kerajaan Rusia (tahun 1905-1906) memegang peranan penting dan mengembangkan harapan kaum nasionalis. Secara serempak, golongan sosialis di Negeri Belanda, terdorong oleh masuknya mereka dalam Parlemen, mensponsori gerakan menuju 'Hindia untuk bangsa Indonesia'. Pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda mengorganisasi diri guna membantu tercapainya kemerdekaan. Secara bertahap, di sana tumbuh sejenis kebiasaan di Den Haag untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah Batavia dan mempercayakan tanggung jawab pemerintahan kepada bangsa Indonesia. Direncanakan suatu sistem dewan-dewan desa. Tetapi, dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan ini kebanyakan merupakan harapan-harapan yang suci belaka dan tidak ada pendelegasian kekuasaan kepada Batavia. Bahkan golongan liberal Belanda yang diketuai Deventer menyatakan bahwa bangsa Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia karena sudah membantu perekonomian Belanda dan mengusulkan agar semua kontribusi Indonesia kepada bendahara Belanda sejak tahun 1867 dikembalikan ke Indonesia. Akan tetapi, tidak ada pelonggaran cengkeraman Belanda kepada tanah jajahan, dan keadaan tidak berubah. Sejarawan J.S. Furnival melukiskan situasi ini dengan tepat: "Praktek Belanda adalah: 'Biarkan saya menolong Anda,

biarkan saya menunjukkan bagaimana mengerjakannya, biarkan saya melakukannya untuk Anda'." (Hass: *History of South East Asia*, hal. 750).

Satu kekuatan politik baru yang mendapat inspirasinya terutama dari kondisi-kondisi politik di Negeri Belanda muncul di Indonesia. Dengan suksesnya Revolusi Rusia tahun 1917, kelompok ini, yang pada mulanya menamakan diri Persatuan Sosial Demokratis Hindia (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*, atau disingkat *ISDV-Red.*) mengubah diri menjadi Partai Komunis Indonesia. Anehnya, partai ini dibentuk justru oleh beberapa orang anggota masyarakat Indo (-Eropa) yang mempunyai hak-hak istimewa dan hubungan yang lebih luas dengan orang-orang di Negeri Belanda. Meskipun PKI memulai kegiatannya di bidang serikat buruh, tapi partai ini sebenarnya hendak menyusupi Sarekat Islam yang populer dan mendapatkan basis massa Sarekat bagi dirinya sendiri. Orang-orang komunis bertindak sebagai pemimpin dalam mengorganisasi beberapa pemogokan di Jawa, yang menarik sejumlah besar pengikut Sarekat Islam dan yang kemudian ditangkap bersama-sama dengan para pendukung PKI. Dalam situasi ini, penguasa Belanda menahan Cokroaminoto dengan tuduhan mengadakan kegiatan-kegiatan subversif. Setelah itu, Sarekat Islam mengambil tindakan untuk membersihkan diri dari semua pendukung yang condong ke komunis. Partai-partai komunis di negerinegeri jajahan lainnya pun berusaha melakukan penyusupan serupa ke dalam tubuh organisasi-organisasi nasionalis yang dasarnya luas dengan hasil yang berlainan. Pola ini mengungkap dengan jelas adanya pusat yang mengarahkan.

Pada tahun-tahun pasca Perang Dunia I, Depresi (1923-1926) juga mempengaruhi Indonesia. Perselisihan perburuhan berlipat ganda dan turut membantu PKI mengonsolidasi posisinya di lapangan serikat buruh. Langkah-langkah represif Pemerintah Belanda dalam

menangani pemogokan besar kereta api tahun 1923 menyebabkan timbulnya dukungan rakyat kepada PKI, yang memperoleh kesempatan serupa pada tahun 1925 ketika penguasa memakai kekerasan yang berlebihan untuk menghentikan pemogokan di pabrik logam. Baru setelah Belanda membubarkan PKI dan mengirimkannya 1.300 orang pemimpinnya ke pengasingan, keadaan normal dapat dipulihkan.

Dengan keluarnya golongan komunis dari arena, Sarekat Islam, yang membatasi dirinya pada masalah keagamaan, sekali lagi aktif secara politis namun memilih kebijaksanaan yang berhati-hati, mengingat undang-undang dan metode Belanda yang represif. Di luar, Sarekat membatasi kegiatannya pada masalah-masalah pendidikan dan ekonomi.

Rasa tidak puas yang berkelanjutan mengakibatkan munculnya kekuatan politik baru. Salah seorang pendiri Budi Utomo tahun 1908, Dr. Cipto Mangunkusumo dengan dibantu oleh arsitek muda, Sukarno, pada tahun 1927 mendirikan PNI - Perserikatan Nasionalis Indonesia - di Bandung. Pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda berpengaruh besar pada pembentukan partai baru ini. Sukarno sudah menjadi orator dan organisator yang berpengaruh. Kedua tokoh ini berusaha sekuatkuatnya untuk mempersatukan semua kelompok nasionalis di bawah panji PNI. Mereka sudah menyusun rencana untuk melancarkan gerakan nonkooperasi di seluruh negeri, dan menggunakan teknik ala Gandhi, yaitu kampanye anti pajak sebagai langkah awal. Sebelum rencana ini terlaksana, Belanda telah menciumnya terlebih dahulu. Mereka menahan Sukarno tahun 1929 dan memberinya hukuman empat tahun penjara karena melakukan penghasutan dan kegiatan revolusioner. Tuduhan Sukarno kepada pemerintah kolonial dan pembelaannya yang berapi-api pada kemerdekaan yang disampaikannya dalam sidang, menarik perhatian luas baik di Negeri Belanda maupun negara-negara lain.

Dirasakan bahwa akhirnya Indonesia memiliki seorang pemimpin yang dikenal dunia internasional. Juga PNI pada tahun 1930 oleh Pemerintah Belanda dinyatakan berada di luar hukum.

Setelah Sukarno dipenjarakan, PNI berhenti mengadakan kegiatan politik dan membatasi aktivitasnya pada masalah-masalah kaum tani dan pendidikan. Usaha kaum komunis untuk mengisi kekosongan itu berakhir dengan kegagalan. Pertumbuhan PNI dibantu pula oleh kebijakan Gubernur Jenderal De Graeff yang bersifat liberal yang mengizinkan kebebasan berbicara. Ia pun benar-benar penuh tenggang rasa terhadap kaum nasionalis dengan harapan akan dapat menekan kaum komunis.

Pencabutan perlindungan hukum bagi PNI mengakibatkan lahirnya beberapa partai serpihan. Dalam beberapa bulan, pada bulan September 1930, muncul Partai Rakyat Indonesia yang bertujuan mencapai pemerintahan-sendiri melalui cara-cara parlemen dan kerja sama dengan Belanda. PNI dibubarkan dan Partindo (Partai Indonesia) dibentuk tahun 1931. Sasarannya adalah kemerdekaan menyeluruh melalui cara nonkooperasi, namun dengan pendekatan yang lebih moderat daripada PNI. Sekelompok minoritas PNI yang penting mendirikan Golongan Merdeka, yang programnya hampir sama dengan induknya, PNI. Sutan Syahrir dan Dr. Mohamad Hatta, yang telah bekerja sama dalam Himpunan Pelajar Indonesia di Negeri Belanda bergabung dengan Golongan Merdeka yang tak lama kemudian karena adanya pengaruh Syahrir, menamakan dirinya Club Pendidikan Nasional Indonesia. Syahrir menyerahkan jabatan ketua kelompok itu kepada Hatta begitu Hatta tiba di Indonesia. Terdorong oleh pandangan bahwa partai-partai massa dengan pimpinan yang karismatik, seperti Partindo, tidak sesuai untuk membangun gerakan nasionalis, karena mudah dilumpuhkan Belanda dengan jalan memenjarakan para pemimpin

yang berkarisma itu, Syahrir dan Hatta menggabungkan diri dengan sekelompok kecil kaum nasionalis yang sadar politik dalam Club. Mereka lebih percaya pada pembentukan kader-kader terpilih dengan jumlah orang yang cukup untuk dididik guna mencapai kedewasaan politik dan pemahaman akan nasionalisme daripada sejumlah kecil tokoh kunci di pucuk pimpinan. Keduanya jelas sangat dipengaruhi oleh organisasi dan cara kerja partai-partai politik di Barat, terutama Partai Sosialis Belanda. Karena perbedaan pendapat ini sifatnya mendasar, maka timbullah keretakan antara Syahrir dan Sukarno, yang makin lama makin cenderung menganggap teori yang dikemukakan Syahrir sebagai cara untuk menjelekkan dirinya secara politis. Kesenjangan ini melebar dan berakhir dengan tuduh-menuduh pribadi yang membawa petaka bagi kesejahteraan masa depan Indonesia. Baik Hatta maupun Syahrir dengan tulus percaya, bahwa membangun gerakan nasionalis dengan kepriawaian pimpinan, yang diperluas hingga kelompok yang lebih besar, dan setiap kelompok studi melipatgandakan diri untuk mencapai lapisan penduduk baru, akan membantu membangun kerangka kerja partai yang terajut baik, yang dapat memperbaiki iklim langkah-langkah represif dan memungkinkan kegiatan partai berlanjut apabila pemimpin-pemimpin teras ditangkap dan dilumpuhkan oleh yang berwenang. Memang, ketika Syahrir dan Hatta dibuang pada bulan Februari 1934 dan empat dewan eksekutif Golongan berikutnya ditangkap Belanda, organisasi itu masih tetap berfungsi hingga para tokoh yang dibuang pulang pada tahun 1942. Partai Kongres di India juga berturut-turut meluruskan komite pelaksana selama mengadakan gerakan ketidakpatuhan sipil.

Sesudah dibebaskan pada bulan Desember 1932, Sukarno mencoba mempersatukan Partai Nasional Indonesia pimpinan Hatta-Syahrir dan Partindo, tetapi gagal. Sukarno lalu memilih Partindo dan membangun-

nya menjadi organisasi yang kuat dengan 50 cabang dan 20.000 orang anggota. Namun, pengaruhnya di masa rakyat meluas hingga beberapa kali angka itu. Ia berhasil menarik kesetiaan kaum intelektual maupun massa serta menjalin hubungan khusus dengan mereka melalui kemampuannya berpidato, dengan mempergunakan kiasan dari legenda dan fabel yang tidak asing lagi bagi mereka. Seperti telah diduga, Belanda terkesima melihat popularitas bintang yang muncul ini dan membuang Sukarno pada bulan Agustus 1933. Baru setelah Jepang menyerbu Indonesia tahun 1942, ia dibebaskan dan berhasil meneruskan kedudukannya sebagai pemimpin bangsanya.

Kira-kira pada masa ini ada unsur-unsur politik yang berpengaruh dan berpikiran liberal di Negeri Belanda, yang ingin memajukan Indonesia secara konstitusional. Akan tetapi, usaha-usaha mereka dilumpuhkan oleh kepentingan bisnis Belanda yang lebih kuat, yang takut kehilangan investasi total mereka di Indonesia sebesar kurang lebih \$ 2.000 juta. Pendapatan tahunan mereka dari investasi ini dilaporkan mencapai kurang lebih \$ 300 juta. Perekonomian Belanda jelas akan kacau apabila terjadi sesuatu terhadap investasi besar ini. Meskipun demikian, tahun 1916 Parlemen Belanda mengajukan rancangan undang-undang pendirian Majelis Rakyat - Volksraad, dengan kekuasaan terbatas untuk memberi nasihat di Batavia. Dengan mayoritas anggota orang Eropa, rancangan undang-undangnya masih harus diminta persetujuan pemerintah Den Haag. Sidang perdana Majelis Rakyat ini baru dapat terlaksana bulan Mei 1918. Pada tahun 1925, jumlah anggotanya dinaikkan menjadi 61 orang (orang Indonesia: 30) serta diberi kekuasaan legislatif dan keuangan yang terbatas. Tak ada konvensi yang dibuat agar majelis ini tumbuh secara organis. Kaum nasionalis menduga semua tindakan ini kelihatannya diadakan hanya untuk menghindarkan tuntutan akan pemerintahan sendiri.

Dengan diasingkannya Sukarno, Hatta, dan Syahrir serta ditangkanya orang-orang yang menggantikan posisi ketiganya oleh pengusaha Belanda, kaum nasionalis Indonesia mencoba memanfaatkan Volksraad guna mencapai tujuan mereka. Haji Agus Salim mengajukan PSII (Penyedar Sarekat Islam Indonesia) dan menjadi anggota Volksraad untuk mendapatkan konsesi-konsesi dari Belanda secara paksa. Kelompok dan klub studi lainnya, seperti Budi Utomo, dan Persatuan Bangsa Indonesia, melebur diri menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya) di bawah pimpinan Dr. Sutomo dan menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam Volksraad. Pada tahun 1936 Volksraad mengajukan petisi kepada Pemerintah Belanda dengan perbandingan suara 26 : 20, yang meminta supaya diadakan konferensi guna membicarakan rencana tindakan ke arah pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun dan tidak menyimpang dari konstitusi Belanda yang ada. Bahkan mosi ini pun ditolak oleh Pemerintah Belanda, demikian pula dalam pernyataan Ratu Belanda yang dikeluarkan lama sesudahnya, bulan Agustus 1940, ketika pusat pemerintahan Belanda berada dalam pengasingan di Inggris, tapi yang berjanji akan diadakan konferensi untuk membicarakan hubungan di masa mendatang segera setelah perang usai. Namun soal kemerdekaan tidak disebut-sebut dalam pernyataan itu. Pernyataan ini dipertegas lebih lanjut dalam jawaban atas pertanyaan Volksraad dengan mengatakan bahwa Piagam Atlantik tidak mempunyai arti baru karena prinsip-prinsipnya telah lama dianut Pemerintah Belanda dan menjadi penganut piagam itu tidak berarti meminta adanya pertimbangan baru mengenai kebijaksanaannya terhadap penduduk Indonesia. Padahal, para penanda tangan Piagam Atlantik telah membenarkan adanya hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang! Sebelumnya, Pemerintah Belanda mengatakan bahwa semua pembaharuan politik harus menunggu pemulihan

alat-alat politik di negeri induk (Belanda) sesudah perang berakhir dengan sukses. Tidak diragukan lagi, kaum nasionalis Indonesia merasa kecewa dan frustrasi menghadapi kemampuan metode-metode konstitusional. Meskipun demikian, mereka memanfaatkan Volksraad untuk mendirikan koperasi-koperasi petani dan penjual eceran, sebuah bank untuk memberikan kredit kepada bangsa Indonesia dengan syarat-syarat yang layak, sebuah penginapan bagi pekerja-pekerja miskin, program-program pemberantasan buta aksara, dan beberapa hal yang menguntungkan lainnya.

Di luar Volksraad, kaum nasionalis Indonesia terdorong untuk semakin aktif karena awan peperangan mengancam Eropa dan ada kemungkinan Negeri Belanda diduduki Nazi. Sebuah federasi besar partai-partai politik Indonesia (GAPI - Gabungan Politik Indonesia) dibentuk pada bulan Mei 1936. Federasi ini menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia, persatuan nasional yang berdasarkan demokrasi politik, ekonomi, dan sosial, parlemen Indonesia yang dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat, dan solidaritas antara kelompok politik Indonesia dan Negeri Belanda guna memelihara front anti-fascist yang kokoh. Kongres Rakyat Indonesia yang disponsori GAPI diadakan pada bulan Desember 1939 yang diikuti oleh sebanyak 90 organisasi politik, sosial, dan ekonomi. Kongres menerima Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bendera Merah Putih sebagai bendera nasional, dan Indonesia Raya (Digubah oleh Supratman tahun 1929, dalam Kongres Pemuda dan sudah diterima oleh partai PNI Sukarno sebagai Lagu Kebangsaan. Kongres ini mengadakan kampanye untuk mengubah Volksraad menjadi Parlemen Indonesia dan, mengingat situasi internasional yang kritis, menuntut kerja sama yang lebih besar di antara rakyat Indonesia dan Negeri Belanda melalui pemberian hak-hak demokratis yang lebih luas kepada rakyat Indonesia.

Sejarah perjuangan kaum nasionalis Indonesia menunjukkan, bahwa bahkan tuntutan-tuntutan minimum mereka akan pemerintahan yang bertanggung jawab di Batavia pun ditolak oleh Pemerintah Belanda. Dan tawaran mereka untuk bekerja sama atas dasar kesamaan derajat dengan janji akan diberi kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum di dalam Piagam Atlantik, dengan angkuh ditolak Belanda pada saat tanah air mereka dan juga Indonesia, berada dalam bahaya akan jatuh ke tangan musuh-musuh demokrasi. Sikap kaum kolonial Belanda yang tidak berubah tetap tidak dapat dipahami. Mungkin, sikap ini disebabkan oleh sistem internasional yang tidak masuk akal. Semua peristiwa ini berbeda sekali dengan berbagai peristiwa yang terjadi di India. Di sana bangsa Inggris pada permulaan Perang Dunia II secara bertahap maju menuju pemerintahan bersama dan pemberian otonomi yang luas.

BAB III

TOKOH-TOKOH

Beberapa rekan asing sulit menilai Sukarno pada masa-masa awal, namun saya tidak menemui kesulitan khusus.

Sukarno adalah tokoh Revolusi Indonesia yang dominan. Perkenalan pertama saya dengan Sukarno terjadi pada hari saya mendarat bersama pasukan India, tanggal 29 September 1945. Ditemani sekelompok kecil wartawan, saya menemui Sukarno. Menurut kesan saya ia adalah seorang yang berhati hangat dan pesolek, agak menggemari seragam militer biarpun, nampaknya, hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai strategi militer. Namun, ia benar-benar memahami sejarah, termasuk sejarah militer dan filsafat. Agak aneh juga menemukan bakat seperti ini dalam diri seorang arsitek. Ia seorang orator yang berbakat dan merupakan pribadi yang menarik yang agak mirip dengan satria-satria Jawa kuno. Sukarno mampu berbicara berjam-jam kepada massa yang disesuaikan dengan alam pikiran mereka yang penuh dengan dongeng dan menawan hati pendengarnya melalui semboyan-semboyan mistik Islam-Bali-Jawa-Hindu. Daya tariknya terhadap kaum intelektual sama besarnya karena ia mampu mengutip kata-kata dari bahasa Jerman, Inggris, dan Belanda dengan lancar. Bahasa Sanskerta diketahuinya juga sedikit, mungkin didapat dari berbagai kitab suci ibunya yang Hindu-Bali. Selain menjadi pemeluk agama Islam yang saleh,

Sukarno pun mendalami agama Hindu. Kemampuan menyerap dan mengingatnya tidak terbatas. Salah satu di antara kutipan-kutipan yang sering diucapkannya adalah kata-kata Swami Vivekananda: "Bangun! Bangkitlah! Jangan berhenti sebelum tujuan tercapai!" Sukarno amat mencintai India, tetapi sayang, pada tahun-tahun berikutnya ia harus mengubah sikap ini setelah diperlakukan tidak pantas oleh beberapa orang India. Dari perkenalan saya yang pertama kali dengan dia, jelaslah bagi saya bahwa ia seorang yang ditakdirkan akan memerintah rakyatnya bertahun-tahun lamanya. Daya tarik yang terlihat dalam dirinya inilah yang menimbulkan pemujaan massa kepada Bung Karno-nya. Ada kata Karno yang beda artinya – orang Jawa akan segera teringat pada si orang kuat Karno (Karna dalam bahasa Sanskerta) dalam cerita Mahabharata, yang menyebar ke daerah pedalaman melalui wayang. Di samping itu, Sukarno juga sangat manusiawi. Ia sering kali tidak ragu-ragu untuk membicarakan masalah-masalah pribadi. Pada kesempatan tidak resmi, kebanyakan obrolan kami dilakukan di kamar gantinya sambil ia mengikat tali sepatunya yang mengkilat, di atas bangku tanpa sandaran. Ia suka memperlihatkan kelebihan-kelebihannya!

Sebagai pemberi semangat utama pada revolusi, pemimpin revolusi yang sesungguhnya dan tidak diragukan lagi, serta arsitek utama revolusi, Sukarno sangat mengandalkan nasihat dan kemampuan Dr. Hatta untuk menganalisa perkembangan-perkembangan selama sebagian besar masa revolusi secara jelas dan dengan kepala dingin.

Sederhana namun begitu rapi dan tenang, Dr. Mohammad Hatta yang tidak banyak lagak ini sungguh berbeda sekali dengan Sukarno. Hatta tidak pernah gelisah, bahkan pada saat-saat yang agak luar biasa kemarahannya benar-benar tidak nampak, ketegasan dan ketajaman otaknya sangat membantu memberi keseimbangan dan penilaian yang tepat, baik selama masa revolusi maupun

pada waktu Republik masih bayi. Hatta bersama Sukarno yang dinamis merupakan sebuah tim yang ideal dan keduanya banyak melengkapi satu sama lain. Diragukan apakah pemberontakan komunis bulan September 1948 dapat dipadamkan oleh pemimpin selain Hatta. Meskipun ia bersikap tegas dalam usahanya untuk mengamankan Republik dan pemerintahannya, seperti yang ditunjukkannya ketika menangani beberapa usaha pemimpin golongan Trotsky, Tan Malaka, untuk mengadakan 'kudeta' dengan maksud untuk menggantikan Sukarno, tapi Hatta benar-benar luwes dalam berurusan dengan Belanda, di bawah tekanan kemampuan militer Republik yang terbatas. Tidaklah menggembirakan menggambarkan seorang yang cakap seperti Syahrir tidak diberi kesempatan untuk berbakti dan memimpin rakyatnya selama dasawarsa negara itu muncul dengan kemerdekaan penuh, yang ia perjuangkan mati-matian dalam semangat perjuangan yang dituntun oleh rasa cemas terus-menerus untuk menyelamatkan sumber daya manusia Indonesia dan perekonomian yang didasarkan pada berbagai sumber daya alam dari kerusakan akibat perang.

Hatta memiliki banyak persamaan dengan Syahrir yang cemerlang tetapi suka pamer dan merupakan penghubung di dalam tiga serangkai itu. Sejak masa mereka belajar di Negeri Belanda, keduanya sudah menjadi kawan seperjuangan dalam menentang pemerintahan kolonial. Keduanya berasal dari suku yang berkuasa di Minangkabau. Ketika dua tokoh intelektual ini bertemu dan membicarakan berbagai masalah negara mereka, argumen-argumen mereka yang terangkai dengan jeda-jeda pemikiran mendalam mengingatkan saya akan langkah dan kotak-kotak dalam permainan catur. Hatta kerap kali berhasil mempengaruhi Syahrir yang masih muda, yang menerima semua ini dengan senyum kekanak-kanakan. Bila Syahrir cakap dalam berbagai bidang dan memiliki pandangan internasional yang lebih

luas, maka Hatta pada dasarnya adalah seorang ekonom dan seorang administrator yang menonjol. Syahrir seorang sosialis yang teguh, walaupun tidak dogmatis tetapi pragmatis, sedangkan Hatta termasuk seorang yang liberal dan lebih suka tidak diidentifikasi dengan 'paham' apa pun. Syahrir sangat moderat namun keras kepala dan Hatta selalu siap dengan perumusan-perumusan yang luwes tanpa mengabaikan hal-hal yang mendasar. Tidak pernah wajah Syahrir berkerut meskipun mengalami banyak penderitaan dan ia tidak menunjukkan kebencian kepada Belanda biarpun perlakuan mereka kepadanya sangat dungu. Seruan Syahrir yang mendasar ditujukan kepada para pelajar yang merupakan barisan depan kelompoknya dalam gerakan perlawanan menentang Jepang.

Saya mendapat banyak pendidikan di bidang politik dan masalah-masalah internasional dari Syahrir, tokoh besar intelektual. Akan tetapi, sebagai politikus, kekurangannya adalah ia menghindari massa dan merendahkan pemujaan massa yang berlebihan, yang dianggapnya sebagai suasana hati yang tidak tetap. Karena saya lebih suka bersama dia, saya pernah bepergian dengannya dan bila ada kelompok-kelompok rakyat yang membawa buah-buahan dan bunga sebagai tanda kekaguman mereka kepadanya, saya sangat kecewa, karena Syahrir hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan tidak sedikit pun berusaha untuk berpidato panjang lebar dan penuh gambar-gembor supaya mereka mengadakan kegiatan yang revolusioner. Tepuk tangan hanya disambut dengan senyum kekanak-kanakan olehnya. Syahrir sangat perenung dan analitis. Ia telah meraguk dalam-dalam tulisan Hegel, Marx, Nietzsche, Kant, Goethe, dan Russell, namun sangat menyenangkan filsuf Spanyol Ortega Y. Gasset. Dalam pengasingan, buku hariannya mencatat: "Kebahagiaan sejati tidak pernah terpisah dari yang lain . . . Orang ingin menyampaikannya kepada orang lain dan menjadi murah hati kepada orang lain. Untuk

alasan inilah, *saya percaya, dalam jangka waktu lama kebahagiaan pribadi tertinggi yang dapat tercapai bertepatan dengan kebahagiaan umum dan kesejahteraan umat manusia.*” Sentuhan-sentuhan Vedanta! Ia seorang humanis besar! Setiap kali bertemu dengannya, saya pergi dengan gagasan baru di benak saya. Dari segi fisik, Syahrir merupakan orang yang terpendek di antara ketiganya, namun merupakan salah seorang yang tertinggi dalam revolusi, dalam arti ialah yang membuat rencana yang melibatkan jutaan rakyat. Kemampuan besarnya terletak pada kesanggupannya untuk memancing ledakan — melalui sejumlah kecil orang terpilih yang tidak semuanya tahu akan keterampilannya — guna mendukung Proklamasi Kemerdekaan sebagai keadaan yang kebetulan berada dalam situasi sejarah yang sedang berkembang dengan cepat. Pada hemat saya, Syahrir merupakan produk kebudayaan dan pemikiran Barat yang terbaik di Timur, tetapi meskipun demikian ia tidak pernah kehilangan identitas bangsanya. Syahrir-lah terutama yang berhasil memenangkan dukungan dunia bagi Republik yang masih muda ini; tetapi, seperti para nabi revolusi lainnya, hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka tidak diberikan kepadanya dalam Indonesia yang merdeka! Ironi yang menyedihkan bahwa seorang humanis besar seperti Syahrir harus menderita di tangan negara yang sudah dibantunya berdiri dan yang telah memasukkan pula sila peri kemanusiaan ke dalam Panca Sila-nya!

Hubungan pribadi saya dengan Hatta juga akrab. Hatta mempunyai cara yang aneh dalam menunjukkan kasih sayangnya — seperti yang beberapa kali Nehru lakukan kepada saya — yaitu dengan mempercayakan tugas khusus kepada saya. Ia biasanya menyuruh orang untuk memanggil saya untuk mengetahui reaksi saya terhadap suatu usul sebelum melaksanakannya. Otaknya yang cemerlang merupakan sumber ilham yang luar biasa untuk memecahkan berbagai masalah yang diaju-

kan olehnya. Ketika Hatta secara diam-diam (inkognito) datang ke New Delhi menyusul Agresi Belanda yang pertama, Nehru menugaskan saya untuk mengawalinya. Saya ditugaskan untuk memperkenalkan Hatta kepada Departemen Luar Negeri India, yang akan diminta pengakuannya terhadap Republik Indonesia. Permohonan seperti ini mula-mula harus diajukan melalui seorang warga negara biasa India (seperti saya) dan bukannya oleh pejabat. Usaha ini menghasilkan pengakuan de facto atas Republik Indonesia, dan dengan demikian hubungan-hubungan diplomatik dimulai. Dan saya . . . menjadi bagian dari sejarah. Suatu kali, Hatta berharap saya akan menolongnya secara pribadi setelah menjadi ‘Warga Negara’, yaitu warga negara Indonesia. Karena pada waktu itu saya tidak memikirkan peran melebihi wartawan, saya menjawab meskipun menghargai kepercayaan yang diberikannya kepada saya, saya tidak dapat menyimpang dari tugas saya berikutnya untuk meliput Revolusi Indonesia dan, apabila revolusi itu sudah selesai, saya menanti tugas-tugas serupa dari surat kabar tempat saya bekerja. Kemudian, ketika saya kembali ke Yogyakarta sebagai diplomat, Hatta mengatakan kepada saya bahwa keputusan yang sudah saya ambil itu tepat. Sebenarnya, karena tarikan pengaruh Nehru kepada saya lebih besar.

Sukarno sungguh penuh kasih sayang pula, tetapi dengan cara yang berbeda, cara orang Jawa. Ia berusaha keras agar saya merasa senang. Meskipun sering kali bersifat megah dan resmi, tapi kadang-kadang pertemuan dan pembicaraan kami diadakan di kamar-kamar pribadinya, sambil meletakkan kakinya ke bangku untuk mengikat tali sepatunya! Dengan rasa kagum, saya sampaikan pendapat saya tentang usahanya yang sungguh-sungguh agar berbusana rapi! Sukarno juga mengundang saya hadir pada pesta-pesta pilihannya bersama sejumlah pengagum wanitanya. Berulang kali ia membicarakan paham-paham Jawa, Bali, dan Hindu

lengkap dengan kandungan mistiknya, konsep besarnya mengenai kebangkitan kembali Asia, dan pada saat berdua, ia pasti mengganggu otak saya yang malang untuk mengeluarkan pengetahuan Sanskerta-nya, dan apabila saya menceritakan tentang beberapa ayat kesusastraan atau Bhagavad Gita, ia akan merenungkan persamaannya dengan pemikiran Jawa dan menjelaskannya kepada saya.

Karena Sukarno di samping merupakan pemimpin tertinggi revolusi, juga merupakan arsitek utama bangsa Indonesia dan yang mengisinya dengan ideologi, maka mempertimbangkan ideologi yang dikembangkannya bagi bangsanya dan yang sangat diyakini oleh rakyat adalah perlu sekali. Landasan ideologi ini adalah 'Bhineka Tunggal Ika', semboyan yang tertulis di bawah lambang negara dewasa ini. Mengingat keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau di Nusantara yang luasnya 3.000 mil di Samudra Hindia dan beraneka ragamnya kebudayaan rakyat, dengan sangat ulungnyanya Sukarno menitikberatkan Persatuan Nasional sebagai asas pokok nasionalisme Indonesia. Hanya melalui persatuan-lah ia dapat mempersatukan rakyatnya dalam perjuangan melawan kolonialisme. Mendarah dagingnya konsep ini di kalangan rakyat membantu meruntuhkan politik memecah belah Belanda yang terkenal dan pemerintahan penguasa kolonial. Sebagai orang Jawa, Sukarno juga mempercayai pentingnya gotong royong: Mufakat melalui Musyawarah. Asas kedua ideologi Sukarno adalah mutlak menentang penjajah, yang bagi Sukarno tidak ada kompromi dengan mereka ataupun perubahan apa pun berkenaan dengan tuntutan kemerdekaan. Berlandaskan studinya tentang Marxisme, Sukarno memberi tekanan pada adanya kontradiksi antara nasionalisme dan kolonialisme sebagai dasar pegangan yang dialektis, yang bagi konsumsi massa olehnya disederhanakan dengan slogan: SINI dan SANA.

Ideologi Sukarno tidak mengabaikan perlunya nasio-

nalisme berlandaskan pada massa. Ia mengambil 'Kaum Tani' – petani biasa Jawa yang hidup melarat meskipun padi dan hasil panen lainnya tumbuh di tanahnya, tanah yang kesuburannya terletak di kedua tangannya yang telanjang – sebagai lambang. Yang ia beri nama Marhaenisme, dari Marhaen, petani kenalannya pada tahun-tahun awal karier politiknya di Bandung. Pengenalan nasionalisme dengan lambang petani umum ini menjadi daya penarik massa bagi nasionalisme.

Terbungkus oleh mistik Jawa dengan keyakinan yang tak kunjung hilang kepadanya walaupun percaya pada sejarah dan pemikiran modern, nampaknya Sukarno pun percaya pada ramalan Joyoboyo dan menyampaikannya kepada rakyatnya supaya menjadi pegangan dan harapan akan berhasilnya memperoleh kemerdekaan kembali. Joyoboyo (1115-1130), penguasa terakhir Kerajaan Kediri di Jawa Timur sebelum kedatangan kolonialisme, meramalkan bahwa Pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa berkulit kuning yang akan menetap seumur tanaman jagung. Pada saat tanaman jagung itu masak dan siap dipanen, penjajah akan angkat kaki dan Jawa akan merdeka. Sudah sejak tahun 1928-1929, Sukarno menunjuk pada kebangkitan Jepang ('penjajah berkulit kuning') dan Perang Pasifik yang akan menyusul. Melalui perang itu Indonesia akan meraih kemerdekaan.

Mengenai Islam, meskipun Sukarno percaya pada pandangan kaum Abangan Jawa dan tradisinya, bahwa Islam adalah bagian dari pandangan seluruh bangsa Indonesia, yang berbeda dengan pandangan golongan santri yang mengatakan bahwa pandangan Indonesia seharusnya menggambarkan Islam – dua pandangan yang sama sekali bertentangan, namun Sukarno berusaha keras untuk memadukan keduanya demi kepentingan nasionalisme Indonesia.

Seperti aliran agama Hindu Tantri, kultus kesaktian orang Jawa percaya pada adanya kekuatan bawaan (sakti) dalam setiap individu yang dapat dipelihara,

diolah, dan dikembangkan di bawah tuntunan batin. Hal ini merupakan suatu *keharusan* bagi para raja Jawa, yang atas instruksi para pembimbing spiritualnya, harus mengasingkan diri ke gua-gua terpencil dan bersemadi guna mengisi diri lagi untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan. Sukarno juga menempatkan dirinya dalam peran seperti itu, tetapi menyesuaikannya dengan tuntutan-tuntutan modern dengan jalan mengawinkan kesaktian dan pengkajian pemikiran politik modernnya, termasuk Marxisme, dalam batinnya. Hal ini fundamental bagi filsafat politik Sukarno dan, kadang-kadang, ia mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke dalam sejarah bukan sebagai seorang politikus melainkan sebagai seorang nabi dan filsuf politik. Dari sinilah timbul kegemarannya untuk menemukan gagasan-gagasan baru dan memberinya nama: GANEFO, CONEFO, dsb. Sukarno sering kali menyatakan kekagumannya pada Diponegoro, penguasa terakhir Jawa (*Sic.*) yang dikalahkan Belanda dan biasa mengutip kata-kata almarhum. Misalnya anekdot ini: Ketika penjajah Belanda memberi tahu Diponegoro bahwa Hindo (tanah orang-orang Hindu) telah jatuh ke tangan Inggris, berita ini meruntuhkan semangat Diponegoro dan mempercepat kealahannya. Sukarno adalah perpaduan modernisme dan mistik Jawa yang aneh!

Mistik Jawa benar-benar mempengaruhi beberapa partai politik di Indonesia. Bahkan partai yang dialektis, seperti Partai Komunis, tunduk pada pesonanya. Bertahun-tahun lamanya pemimpin komunis Jawa, Alimin, seorang intelektual yang menyenangkan, berjuang untuk menyatukan keduanya, tapi sia-sia belaka. Orang sering kali mendapat kesan bahwa Alimin lebih merupakan seorang mistik daripada Marxis. Jelas sudah, bahwa di situlah letaknya benih-benih kegagalan komunisme di Indonesia. Begitu pula Sukarno, ia tidak dapat menolak pesona mistik. Lagi pula, ia bukan hanya terpengaruh oleh penjelasan Jawa mengenai mistik tapi juga oleh

orang Bali, karena ibunya orang Bali. Beberapa keputusannya juga ditentukan oleh pendekatan mistik, walaupun ia mampu menutupnya dengan bungkus rasional berupa kata-kata Kant, Hegel, Marx, dan Gandhi. Meskipun tidak mudah dilihat, pengaruh mistik Jawa di Indonesia luar biasa besarnya. Kadang-kadang Alimin dan Sukarno berteman baik.

Anehnya, walaupun menganut garis tidak-berkompromi melawan kolonialisme, dalam masalah-masalah nasional Sukarno menghendaki adanya perubahan sikap terhadap orang-orang yang ingkar total demi tercapainya persatuan secara menyeluruh. Ia menentang tindakan memaksa para pembangkang dengan cara apa pun dan menginginkan agar mereka diperlakukan dengan lembut. Oleh sebab itu, ketika Belanda mendirikan beberapa negara boneka untuk merintang Republik Indonesia, Sukarno tidak menyetujui pemakaian hasutan agar massa memberontak melawan negara-negara boneka itu. Sama dengan di atas, Sukarno pun nampaknya tidak sepakat dengan Hatta untuk menumpas habis pemberontakan komunis di Madiun. Ia selalu memasang telinga pada rencana busuk pengikut Trotsky, Tan Malaka, yang muncul untuk menyingkirkannya. Sebagai seorang Jawa yang cenderung pada sinkretisme, ia yakin, pada akhirnya, para penentang akan dapat dimenangkan dengan jalan menyerap beberapa dari gagasan mereka. Dan itulah sebabnya mengapa ia kemudian berusaha untuk mendapat dukungan orang-orang komunis, yang tentu saja, membawa malapetaka bagi dirinya dan negaranya!

BAB IV

SILA-SILA LUHUR PANCASILA

Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 antara lain menyatakan: "... dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Istilah 'Panca Sila' yang seluruhnya adalah bahasa Sanskerta itu sangat menarik saya.

Mengapa jumlah sila itu lima? Nampaknya Sukarno dituntun 'oleh latar belakang mistik Jawa' dan cerita rakyat orang Jawa, yaitu Mahabharata – epik Hindu versi Jawa yang amat disukainya. Ia sering kali menceritakan kepada rakyatnya perbuatan-perbuatan berani Pandawa Lima dan Dhananjaya (Arjuna), yang sikap kepahlawanannya nampaknya sering kali ia tiru dalam perannya sebagai pemimpin perang rakyatnya dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan (Dharma Yuddha . . . Perang Golongan Putih dalam Mahabharata). Siapakah orang Indonesia yang dilahirkan dari ibu Hindu-Bali dan ayah Islam Abangan yang dapat melupakan impian masa kanak-kanaknya untuk menjadi Arjuna seperti dalam pertunjukan wayang semalam suntuk yang menceritakan petualangan Pandawa yang memenuhi

benaknya yang terkesan? Setiap hari ibu Sukarno mengisahkan dengan rinci cerita-cerita wayang kepada putranya, seperti generasi ibu-ibu pada zamannya di Indonesia atau India, memuja perbuatan satria Pandawa Lima yang gagah berani. Karena itu, sungguh mudah bagi saya untuk selalu memahami Sukarno.

Jalan terbaik untuk menjelaskan dan memahami Panca Sila adalah dengan menggunakan kata-kata Sukarno, karena ialah perumus dan pengusulnya. Dalam pidatonya mengenai Panca Sila di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyebut bahwa *Nasionalisme* (Kebangsaan Indonesia), yang meliputi seluruh wilayah Nusantara yang membentang antara Samudra India dan Pasifik, lahir dari kerinduan rakyat yang mendiami wilayah itu akan persatuan sebagai bangsa dan dalam konsepsi mereka persatuan ini dapat dibandingkan dengan bangsa yang hidup selama zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sukarno menjelaskan, "Bukan nasionalisme orang Jawa, bukan nasionalisme orang Sumatra, bukan nasionalisme orang Kalimantan, bukan juga nasionalisme orang Bali, Sulawesi, atau yang lain; melainkan nasionalisme bangsa Indonesia yang meliputi mereka semua, yang menjadi basis satu negara nasional."

Dalam pengembangan sila kedua: *Humanisme* (*Peri Kemanusiaan*), Sukarno mengatakan bahwa kita harus menjaga agar nasionalisme tidak berkembang menjadi sovisme seperti di Jerman, tapi merupakan bagian dari internasionalisme atau humanisme. Dalam hubungan ini, ia mengutip kata-kata Mahatma Gandhi, "Saya seorang Nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Lebih lanjut Sukarno mengatakan bahwa Humanisme bukanlah paham kosmopolitan yang menyangkal keberadaan nasionalisme. Menurut Sukarno, "Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur bila tidak berakar di tanah nasionalisme, dan nasionalisme tidak dapat tumbuh subur bila tidak tumbuh di kebun bunga

internasionalisme.”

Berkenaan dengan sila ketiga: *Kedaulatan Rakyat*, Sukarno menganjurkan diadakannya perundingan-perundingan di antara wakil-wakil rakyat yang terpilih sehingga dicapai kebulatan suara atau mufakat atas berbagai masalah dan hal. Sesungguhnya sila ini sudah tertanam dalam kehidupan rakyat Indonesia, dalam bentuk Gotong Royong (mufakat melalui musyawarah). Inilah adat kuno bangsa Indonesia. Pada masa lampau, seluruh tanah di sebuah desa adalah milik masyarakat, bukan penguasa. Gotong royong dipraktekkan ketika bekerja di sawah maupun ketika membangun rumah, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Pada waktu menjabarkan sila keempat: *Keadilan Sosial*, Sukarno menekankan bahwa sila ini tidak seperti berbagai demokrasi Barat yang semata-mata menganut 'resep Revolusi Prancis' dalam membentuk badan-badan perwakilan rakyat tetapi membiarkan rakyat tetap berada di bawah belas kasihan kaum kapitalis. "Dalam apa yang disebut demokrasi tidak ada yang lain kecuali demokrasi politik, tidak ada keadilan sosial sedikit pun, tidak ada demokrasi ekonomi sama sekali," tambahnya. Ia mengutip komentar Jean Juarez: *On Parliamentary Democracy*: "... setiap manusia mempunyai hak-hak yang sama, setiap orang dapat memberi suara, setiap orang dapat menjadi anggota Parlemen. Tetapi, adakah keadilan sosial, adakah bukti-bukti kesejahteraan di antara rakyat?" Sambil menolak demokrasi model Barat, Sukarno mendesak rakyatnya, "Jika kita mencari demokrasi, demokrasi itu harus bukan demokrasi Barat, melainkan 'permusyawaratan' yang memberi hidup, yaitu demokrasi ekonomi-politik yang sanggup memberi kesejahteraan sosial." Dengan menguraikan zaman keemasan Ratu Adil (yang menjadi aspirasi rakyat dari dongeng, yaitu tibanya kesejahteraan bagi setiap orang), ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu ialah keadilan sosial

sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Sukarno memiliki kemampuan luar biasa untuk menghubungkan konsepsi-konsepsi modern dengan prinsip-prinsip rakyat yang kuno dan yang sudah mendarah daging.

Pada sila kelima: *Kepercayaan kepada Tuhan*, Sukarno benar-benar jelas dan mengatakan setiap orang Indonesia harus percaya kepada Tuhannya sendiri, "... Negara Indonesia akan menjadi sebuah negara yang setiap rakyatnya dapat menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Rakyat hendaknya memuja Tuhan dengan cara yang sopan, yaitu tanpa egoisme dalam beragama." Dia sendiri adalah seorang Islam Abangan Jawa, dan karena itu ia lebih setuju pada bentuk negara sekuler. Dalam perdebatan dengan para pendukung bentuk negara Islam, Sukarno mengajukan argumentasi bahwa mengenai wakil rakyat, orang-orang Muslim akan mempunyai lebih banyak pengikut dalam badan legislatif, wadah yang dapat mereka gunakan untuk meyakinkan golongan minoritas di luar Islam demi kepentingan Islam; sedangkan dalam negara Islam yang monolitik, kesempatan serupa itu tidak akan ada. Sebagai ahli berpidato, Sukarno mengatakan, "Apabila rakyat Indonesia sungguh-sungguh kebanyakan adalah orang Muslim, dan apabila benar bahwa Islam di Indonesia adalah agama yang hidup di hati rakyat banyak, marilah kita, para pemimpin, menggerakkan setiap orang itu untuk mengerahkan sebanyak mungkin wakil kaum Muslim dalam badan legislatif."

Sukarno mempunyai kemampuan bawaan untuk menjangkau hati rakyatnya dengan menyederhanakan gagasan-gagasan politik. Ketika menyederhanakan Panca Sila menjadi Tri Sila, ia mengatakan, "Dua sila pertama, nasionalisme dan internasionalisme, nasionalisme dan kemanusiaannya, saya padatkan menjadi satu yang saya sebut sosio-nasionalisme. Dan demokrasi, yang lain dari demokrasi Barat tetapi bersama dengan kesejahteraan, juga saya padatkan menjadi satu, yaitu yang saya

sebut sosio-demokrasi. Kepercayaan kepada Tuhan dengan sikap saling menghormati satu sama lain adalah sila yang lainnya. Dengan demikian, yang semula lima telah menjadi tiga. Tetapi, mungkin tidak semua di antara Saudara-saudara yang menyukai tiga sila ini dan meminta satu sila saja? Kalau saya padatkan lima menjadi tiga dan tiga menjadi satu, lalu saya mempunyai istilah sejati Indonesia 'Gotong Royong', saling bekerja sama. Negara Indonesia yang akan kita bangun haruslah suatu Negara Gotong Royong. Bukankah ini mengagumkan, Negara Gotong Royong?" Ia seorang pemain sulap dengan menggunakan kata-kata dan mampu membuat yang biasa menjadi terbungkus indah dan menarik. Sukarno kemudian melanjutkan uraiannya dengan panjang lebar, "Gotong royong adalah suatu konsep yang dinamis, lebih dinamis dari asas kekeluargaan . . . Asas kekeluargaan adalah konsep yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan usaha keras, tindakan melayani, satu tugas . . . Gotong royong berarti membanting tulang bersama, bersimbah peluh bersama, suatu perjuangan bersama untuk menolong satu sama lain. Tindakan pelayanan oleh semua untuk kepentingan semua."

BAB V

PROSES REVOLUSI

Tidaklah mudah untuk menulis tentang suatu kurun waktu yang tidak disaksikan sendiri. Akan tetapi, adanya pengetahuan tentang masa lalu penting sekali untuk mengetahui masa sekarang.

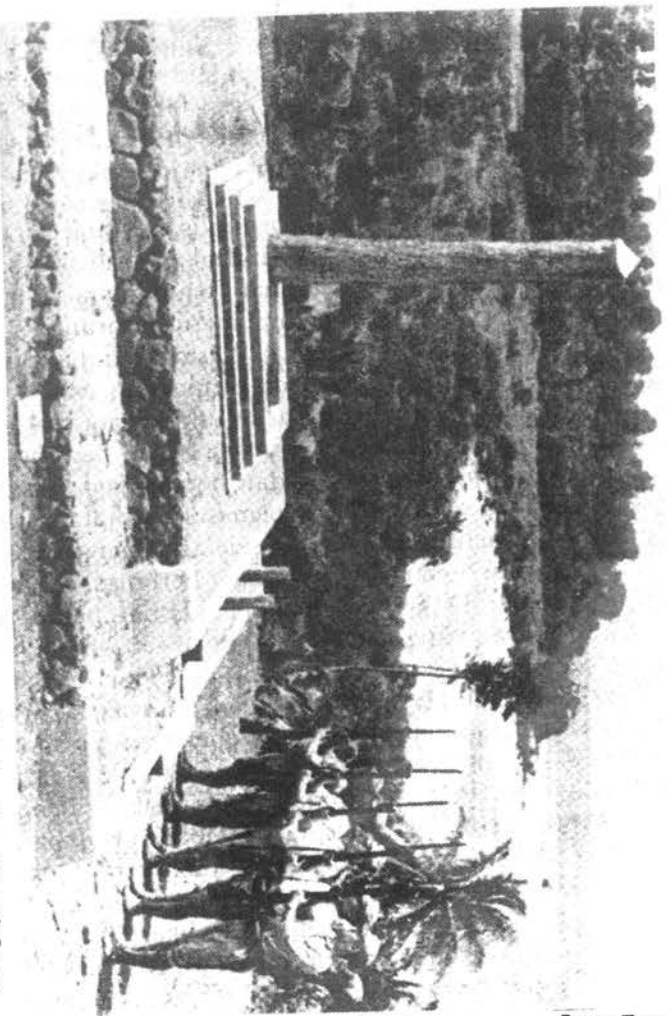
Setelah melihat bahwa Tentara Nasional India, pimpinan Subash Chandra Bose, di Birma dan Malaysia memiliki hak otonomi yang besar untuk mengorganisasi dan mencari dana, asalkan berfungsi dalam parameter kepentingan keamanan Jepang dan bergantung kepada Jepang sebagai satu-satunya pemasok senjata, saya tertarik untuk mengetahui dengan sejelas-jelasnya bagaimana kekuasaan Sukarno-Hatta dapat berfungsi dengan bantuan Jepang. Di luar pejabat Belanda dan beberapa wartawan Barat yang menganggapnya sebagai rezim boneka Jepang, ada juga beberapa orang Indonesia yang sama kritisnya. Tidak diragukan lagi, banyak laporan yang terlalu berlebihan mengenai kebebasan bertindak mereka, baik yang menyatakan bahwa mereka diberi kebebasan penuh untuk bertindak, maupun yang mengatakan bahwa mereka patuh sama sekali kepada Jepang. Dengan sendirinya saya meminta informasi tentang kurun waktu itu kepada Syahrir, yang saya nilai cukup obyektif, meskipun ia tidak menyukai Sukarno. Syahrir yakin bahwa lama-lama, rezim Sukarno-Hatta apa pun akan mendapat noda bekerja sama dengan Jepang.

Tanggal 9 Maret 1942, Jepang telah menduduki



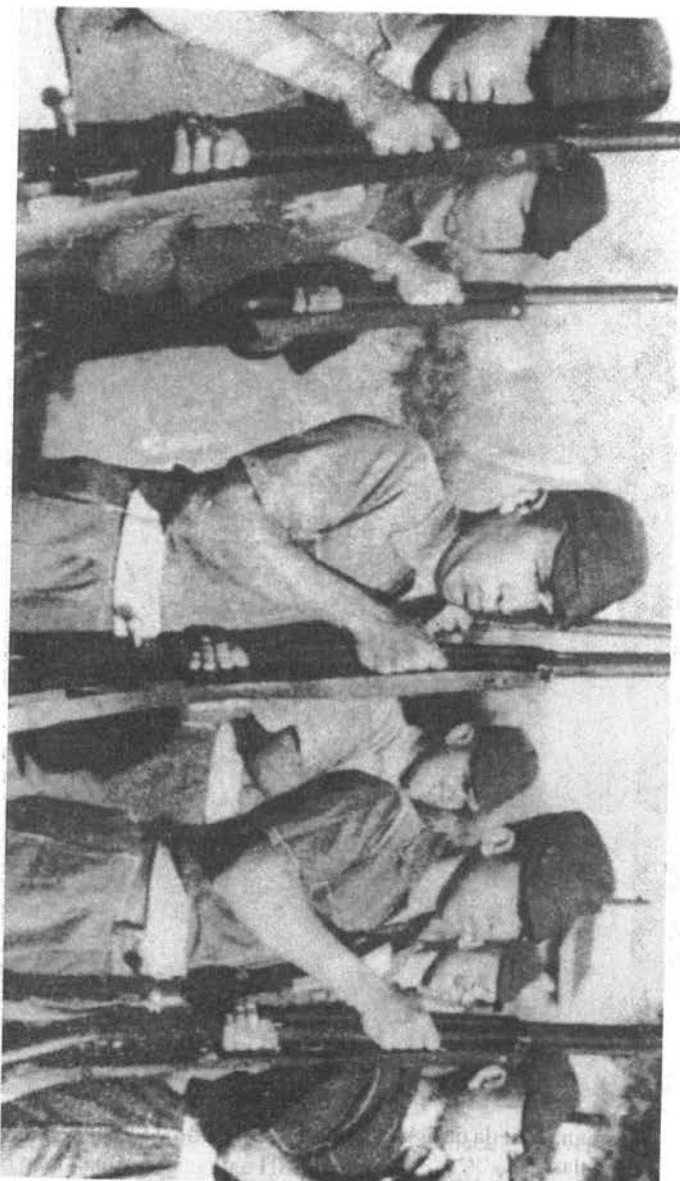
Repro Tempo

Serah terima kekuasaan dari Belanda kepada Jepang, yang untuk Indonesia sama artinya dengan keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya.



Repro Tempo

Monumen di Teluk Banten yang mengingatkan awal kedatangan Saudara Tua di tanah Jawa.



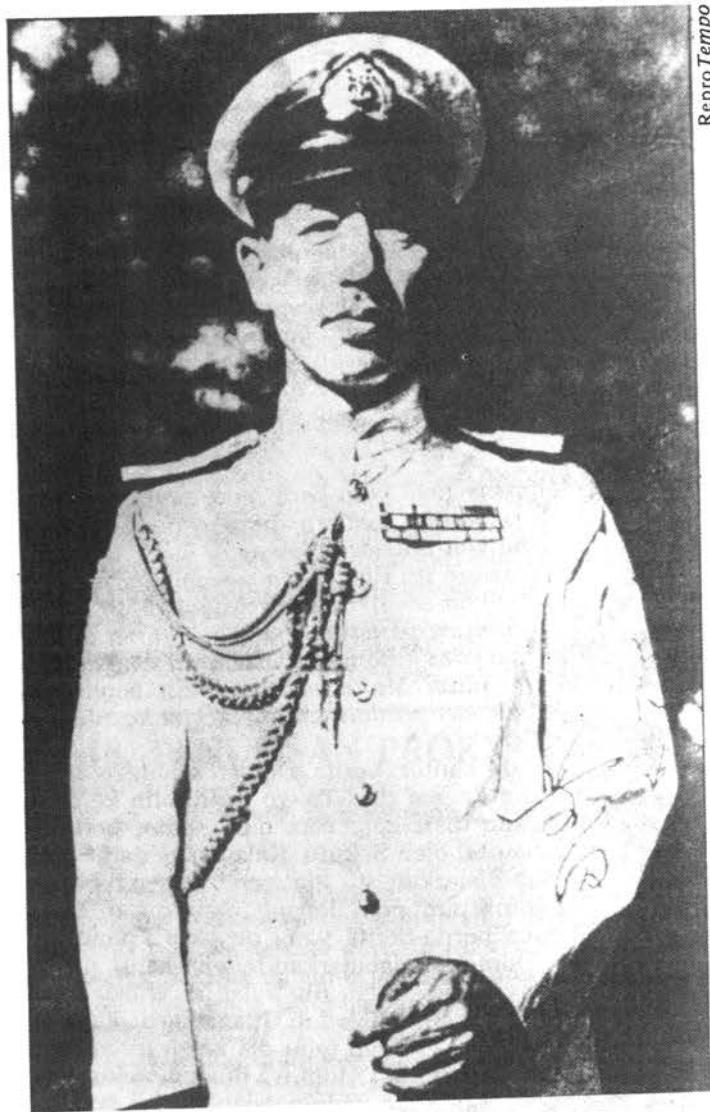
Repro Tempo

Heiho diberi latihan yang intensif dengan disiplin khas Jepang.



Repro Tempo

PETA. Salah satu komponen yang membentuk TNI.



Repro Tempo

Laksamana Maeda dari Angkatan Laut Jepang. "Penolong yang tulus ikhlas"



Repro Tempo

Dalam usianya di ambang senja, tahun 1973, Maeda menyempatkan diri menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan di Jakarta.

seluruh Jawa karena tidak banyak mendapat perlawanan dari pasukan Belanda, yang sudah merosot moralnya setelah Hitler menduduki tanah air mereka. Meskipun demikian, sekelompok kecil orang Belanda yang terpilih menggabungkan diri dengan rakyat Indonesia dalam membangun gerakan perlawanan. Situasinya memang aneh mengingat para penguasa Belanda telah menolak beberapa tawaran bangsa Indonesia untuk melawan pasukan penyerbu.

Ketika Negeri Belanda jatuh ke telapak kaki Hitler, bangsa Indonesia bersorak kegirangan. Mitos Joyoboyo bangkit kembali. Seperti telah diramalkan oleh Joyoboyo, Belanda akan segera diusir dari Indonesia oleh bangsa berkulit kuning dari utara, kemudian Indonesia akan merdeka karena pada gilirannya bangsa berkulit kuning itu akan diusir. Para penyerbu Jepang, yang cocok dengan ramalan itu, disambut rakyat. Tetapi kaum nasionalis di bawah pimpinan Sukarno, Hatta, dan Syahrir beranggapan bahwa negara-negara AS dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi kemerdekaan Indonesia daripada Belanda kolonial. Para penguasa Belanda pun menghargai pandangan ini. Ketiga tokoh nasionalis ini pun mendidik rakyat agar tidak percaya bahwa bangsa Jepang itu pembebas mereka. Sayap kiri gerakan nasionalis pun terang-terangan menyatakan dukungannya bagi persekutuan itu. Bangsa Belanda tidak cepat bergerak. Para pemimpin yang diasingkan ke Pulau Ambon, Hatta dan Syahrir, dikembalikan ke Jawa hanya beberapa jam sebelum Jepang mendarat di Ambon. Sukarno masih dalam pembuangan di Sumatra. Dengan demikian, masyarakat kehilangan pemimpin nasional, sehingga mereka terus bersuka cita atas kemenangan-kemenangan Jepang. Pengaruh Joyoboyo benar-benar sangat kuat.

Terlepas dari beberapa kesalahan yang diperbuat rezim militer Jepang – seperti memperkenalkan 'Tiga A' yang memuji ras Jepang, mengharuskan para pelajar

berkepala gundul, melontarkan Kemakmuran Asia Timur Raya, bahkan sebelum lahirnya negara Indonesia yang merdeka – kemungkinan akan adanya dukungan kepada bangsa Jepang nampaknya telah dihancurkan sejak awal. Tak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan kepercayaan kokoh bangsa Indonesia pada ramalan Joyoboyo. Mereka kebanyakan menganggap 'Bangsa Berkulit Kuning, itu hanyalah sebagai penjaga sementara negaranya dan yang nanti pada saatnya akan diusir. Akan tetapi begitu kekejaman rezim militer Jepang mulai tampak jelas, dwitunggal Sukarno-Hatta berhasil bertindak sebagai penengah. Selain melindungi rakyat, keduanya mempergunakan kesempatan untuk mengorganisasi semangat dan daya gerak rakyat untuk keperluan kemerdekaan. Dalam tugas ini, keduanya sudah ada pengertian terlebih dahulu dengan Syahrir, yang gerakan perlawanannya sangat dibantu oleh posisi duo Sukarno-Hatta yang menguntungkan.

Pihak Jepang segera menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan aparat pemerintahan, padahal keperluan untuk menenangkan rakyat sangat mendesak kalau peperangan ingin terus berlangsung tanpa gangguan. Pada mulanya, Jepang mencoba memanfaatkan elemen-elemen feodal dan agama guna memperoleh dukungan. Ketika usaha ini gagal, mereka berpaling kepada Hatta dan Syahrir, yang ketika itu berada di Jawa setelah dikembalikan Belanda dari tempat pembuangan mereka, bersamaan dengan pendaratan Jepang di Ambon. Kedua pemimpin ini tidak mempercayai Jepang, namun mengetahui bahwa akhirnya Jepang akan berusaha untuk membentuk sebuah pemerintah Indonesia dengan kendali di tangan Jepang, seperti yang dilakukan Jepang di Birma. Setelah mereka yakin bahwa hari pembalasan bagi Jepang pasti akan tiba dan saat itu akan menjadi saat yang tepat untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia, Syahrir dan Hatta berkesimpulan bahwa berperan serta dalam pemerintahan yang dispon-

sori Jepang akan membantu mempersatukan kegiatan kaum nasionalis dan kaum revolusioner yang berpencar guna mencapai kemerdekaan. Jadi, lebih baik berada di dalam pemerintahan itu daripada di luarnya. Keduanya sepakat sementara Hatta bekerja sama dengan pihak Jepang, Syahrir akan memimpin pengorganisasian gerakan revolusioner bawah tanah yang terkoordinasi.

Karena itu, ketika pada akhir tahun 1943, Jepang makin lebih jelas mendekati Hatta untuk diminta kerja samanya, Hatta menyetujui dengan syarat ia akan diperbolehkan mengorganisasi pembangunan bangsa Indonesia. Keadaan mereka yang sulit dan kesadaran akan pentingnya pemimpin yang populer seperti Hatta membuat Jepang dengan mudahnya menerima syarat-syarat yang diajukan Hatta. Akan tetapi, mereka gagal ketika mengharap kerja sama Syahrir dengan cara serupa. Syahrir memberi alasan bahwa dirinya terlalu disibukkan oleh kegiatan 'pendidikannya' untuk memikirkan hal-hal lain — alasan yang dikemukakan hanya untuk 'menutupi' kegiatan bawah tanahnya. Hatta diangkat menjadi Ketua Badan Penasihat Masalah-Masalah Nasional. Dalam waktu singkat, Jepang telah memperlakukan Sukarno dengan tidak sepatutnya, tetapi Hatta berhasil membebaskannya.

Di kediaman Hatta, Sukarno, Syahrir, dan Hatta mengadakan pertemuan rahasia. Sukarno menyetujui rencana yang telah dipikirkan masak-masak oleh Hatta dan Syahrir. Diputuskan bahwa Sukarno-Hatta akan menawarkan kerja sama mereka dengan pihak Jepang, melindungi roda pemerintahan dari campur tangan Angkatan Perang Jepang yang terlalu besar, dan menyediakan basis legal yang luas bagi perjuangan nasional sambil, secara rahasia, membantu gerakan perlawanan revolusioner pimpinan Syahrir dengan uang dan informasi. Sedikit demi sedikit, Sukarno berhasil merebut beberapa konsesi dari Jepang, yang menyadari daya tarik Sukarno terhadap massa dapat dimanfaatkan untuk

keperluan propaganda mereka sendiri. Bagaimanapun juga, orang-orang Indonesia yang cerdas hanya menyerap inti nasionalisme yang terdapat dalam propaganda itu. Dengan demikian, Sukarno dapat bebas mengorganisasi kegiatan-kegiatannya secara politis. Suatu kali, Sukarno menggambarkan keadaan ini kepada saya dengan mengutip kata-kata peri bahasa: seandainya air ditambahkan ke dalam susu, angsa hanya akan meminum susunya dan membiarkan airnya. Saya tersentuh oleh tamsil yang dikatakannya ini, yang merupakan sebuah tamsil yang terkenal dalam kesusastraan Sanskerta ini.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan mereka untuk mengerahkan kaum nasionalis pimpinan Sukarno-Hatta di belakang usaha peperangan mereka, pada tanggal 9 Maret 1943, Angkatan Perang Jepang mendirikan sebuah Pusat Organisasi Nasional yang meliputi semua, yaitu PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Pihak Jepang berjanji bahwa pemerintahan sendiri akan diberikan dalam waktu dekat. Selama kunjungannya ke Jakarta bulan Juni 1943, Perdana Menteri Jepang Tojo menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus ikut ambil bagian dalam pemerintahan mereka sendiri. Pada bulan September 1943, PUTERA, yang mendapat banyak dukungan umum, diikuti oleh sebuah Badan Penasihat Pusat yang diketuai oleh Sukarno. Badan ini menjadi sebuah dewan perwakilan yang anggota-anggotanya diangkat.

Hal ini betul-betul merupakan perkembangan sejajar yang aneh. Sementara Jepang melindungi propaganda perang mereka dengan jalan mendirikan PUTERA dan Dewan, Sukarno-Hatta berhasil memanfaatkan kedudukan penting mereka dalam kedua badan itu untuk memperluas dan mengintensifkan gagasan-gagasan nasionalis secara mendalam. Sungguh menarik, kurun waktu itu telah menyaksikan kegiatan serentak tiga kelompok yang jelas berbeda: yang pertama mempercayai Jepang sepenuhnya dan erat bekerja sama dengan

pihak Jepang, kelompok kedua – yang paling berpengaruh dan satu-satunya kelompok yang mempunyai basis massa – di bawah Sukarno-Hatta mau bekerja sama, tapi berhati-hati, dengan Jepang, sambil memanfaatkan kesempatan itu untuk memajukan baik usaha berpemerintahan-sendiri maupun nasionalisme, dan kelompok ketiga yang terdiri dari kesatuan-kesatuan perlawanan terhadap Jepang dan usaha perang mereka yang kecil serta tersebar namun terajut kuat. Beberapa di antara kelompok terakhir ini berada di bawah pimpinan Syahrir, sedangkan yang lainnya dipimpin oleh organisasi-organisasi komunis dan Islam. Itulah tanda-tanda positif, bahwa revolusi akan meletus.

Mendengar kisah awal revolusi dari Syahrir dan beberapa rekan dekatnya dan setelah beberapa kali menceknya pada Sukarno dan Hatta, saya terpesona dan sangat kagum akan kepemimpinan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengembangkan kerangka untuk revolusi.

Secara bertahap, pendudukan Jepang mengambil bentuk kerja paksa, kerapnya penggunaan bayonet, perampasan bahan makanan dan barang-barang lain, serta propaganda mengenai mereka sendiri yang tidak habis-habisnya. Penyakit dan kelaparan merajalela di seluruh negeri. Malaria mengganas. Obat kina yang ditanam dan diproduksi di sebuah pabrik di Bandung, yang pernah memenuhi kebutuhan sebagian besar belahan dunia, tidak lagi tersedia bagi rakyat karena Jepang telah memonopoli semua persediaan untuk keperluan mereka sendiri serta pasukan-pasukan mereka di Birma dan Indocina. Tahun 1944, berulang kali terjadi pembentakan skala kecil di Jawa.

Ketika gelombang perang jelas berbalik ke arah kekalahan pihak Jepang, mereka merencanakan pengarahannya sebagian rakyat untuk melawan setiap serangan gencar pertama pihak Sekutu. Jepang memaksa para petani yang kerempeng dan setengah mati kelaparan

mengikuti latihan militer yang sangat dibenci. Suatu pasukan pembantu, PETA, yang terdiri dari 37.000 pemuda, didirikan. Tetapi, kesatuan-kesatuan ini tidak boleh meninggalkan tempat pengerahan karena khawatir akan memberontak kepada Jepang di masa mendatang. Pasukan lainnya, Heiho, yang berkekuatan 25.000 orang dan merupakan bagian dari Tentara Kerajaan Jepang tapi yang opsir-opsirnya orang Jepang dan bertugas untuk kepentingan Jepang di mana saja, juga dibentuk dan diberi latihan yang intensif dengan kekerasan dan disiplin khas Jepang. Barisan Hizbullah, yang khusus terdiri dari pemuda Islam usia 14-22 tahun, juga dibentuk dan dilatih untuk keperluan pertahanan setempat di daerah kota. Sebagai tambahan, suatu pasukan polisi pembantu yang berkekuatan satu juta orang yang, disebut Korps Kewaspadaan, juga didirikan di daerah-daerah pedesaan Jawa. Guna memastikan pengawasan terhadap rakyat segera sesudah aksi-aksi sabotase yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perlawanan, Jepang pun menciptakan Asosiasi Pelayanan Jawa, yang tugas-tugas lainnya termasuk propaganda, mengorganisasi rapat-rapat umum, parade, pekerjaan masyarakat, dan mengumpulkan serta menyalurkan persediaan pangan. Jelas Jepang berniat mengawasi segala bidang. Asosiasi ini pun mempunyai Barisan Pelopor sebagai bagian darinya. Anggota barisan pelopor dilatih sebagai kesatuan yang bersifat kemiliteran, namun dipersenjatai hanya dengan bambu runcing! Salah satu tugasnya adalah mengerahkan atau mengumpulkan rakyat untuk rapat umum, dsb.

Pada waktu melatih semua kesatuan ini, Jepang benar-benar menanamkan disiplin keras yang merupakan ciri asas-asas Bushido mereka, yang kadar isi spiritualnya menarik bagi para rekrut orang Jawa yang selama beberapa generasi sudah biasa menghadapi berbagai gagasan spiritual. Rakyat Indonesia mereguk sebagian besar prinsip itu karena sesuai dengan tuntutan

perjuangan kemerdekaan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika para pemuda Indonesia mempertontonkan kegarangan, keberanian, dan keuletan besar dalam bentrokan-bentrokan dengan pasukan Sekutu, seperti yang terjadi kemudian di Surabaya.

Sebenarnya, usaha Jepang justru menyediakan basis massa militan bagi revolusi karena gerakan perlawanan Indonesia telah menyusup ke semua kesatuan bentukan Jepang, dengan bantuan dan bimbingan — seperti telah direncanakan oleh mereka — Sukarno-Hatta. Dengan demikian, revolusi diperkokoh dengan alat-alat kekuasaan yang dibentuk Jepang. Harus dihargai bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia mengendalikan pembangunan kekuatan raksasa ini, kecuali pada beberapa peristiwa yang jarang terjadi, yaitu ketika pasukan-pasukan semacam itu jumlahnya berlebihan yang biasanya tidak terelakkan pada masa pergolakan seperti itu. Beberapa kali pasukan-pasukan ini menjadi masalah bagi Republik di masa-masa mendatang, tetapi Sukarno dan Hatta dapat mengatasinya dan memecahkan persoalan-persoalannya.

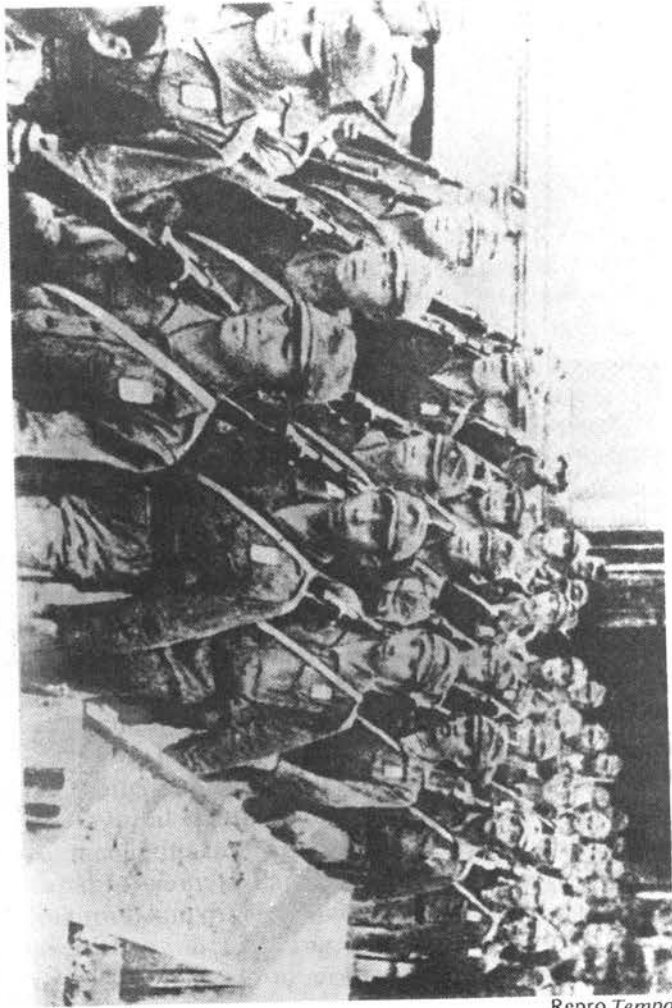
Akhir tahun 1943, PUTERA dibubarkan; dan pada tanggal 1 Maret 1944 didirikanlah sebuah organisasi baru: PKR (Perhimpunan Kebaktian Rakyat) atau dalam bahasa Jepang Jawa Hokokai. Anggota organisasi ini sudah kehilangan keberanian karena adanya perasaan anti-Jepang pada para pelajar. Karena Hokokai gagal mendapatkan dukungan massa, Jepang pun lalu mengambil taktik kolonial lainnya, yaitu berusaha untuk menggunakan agama sebagai wahana untuk mencapai tujuannya. Para kiai, guru agama Islam, dan ahli hukum Islam diberi kedudukan khusus. Seperti yang dikhawatirkan pihak Jepang, badan baru kaum Muslim ini bukannya membantu usaha-usaha propaganda Jepang, tapi malah memperkuat tuntutan kemerdekaan kaum nasionalis, bahkan juga sebagai Hokokai.

Sukarno dan Hatta memanfaatkan Hokokai —



Potret kekejaman Jepang di Sumatera

Pasukan PETA ciptaan Jepang yang malah menjadi bumerang. Persoalannya, siapa memanfaatkan siapa.



Repro Tempo

meskipun dalam taraf yang lebih rendah daripada PUTERA – untuk memajukan kesadaran nasional dan memperkuat kehendak rakyat untuk merdeka.

Melihat sikap permusuhan para pemuda terpelajar yang meningkat, Jepang lalu melontarkan sebuah organisasi lagi: Angkatan Muda pada bulan Juni 1944, dan memaksa pemimpin pemuda yang mereka curigai terlibat dalam kegiatan bawah tanah untuk ikut serta dalam organisasi itu. Dengan cara itulah Sukarni dan Khaerul Saleh di Jakarta, dan Roeslan Abdulgani (yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri pemerintahan Sukarno) di Surabaya ditekan. Angkatan Muda tidak memerlukan waktu lama untuk berubah menjadi anti-Jepang seperti organisasi-organisasi sebelumnya. Akhirnya, naga nasionalisme Indonesia yang berkepala tujuh ini kelihatannya berhasil membuka mata Jepang.

Pada bulan Oktober 1944, menyusul pernyataan Perdana Menteri Koiso di Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan segera diberi kemerdekaan, Sukarno-Hatta dan yang lain-lainnya diizinkan untuk secara terbuka menganjurkan kemerdekaan.

Perkembangan mengejutkan adalah didirikannya Asrama Indonesia Merdeka di Jakarta oleh Kepala Badan Intelijen Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda, yang kemudian memainkan peranan penting pula pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan yang berbasis luas di Jawa dibentuk. Setelah mengadakan sidang paripurna pada bulan Mei, Juni, dan Juli Panitia berhasil mencapai keputusan-keputusan mengenai soal-soal ekonomi dan konstitusi. Panitia serupa menyelesaikan tugasnya di Sumatra.

Menurut kesan saya, tahun-tahun pendudukan Jepang baik sekali bagi kebangkitan besar-besaran kesadaran nasional. Sementara para kritikus yang dengki menduga keras bahwa Republik Indonesia adalah 'Buatan Jepang',

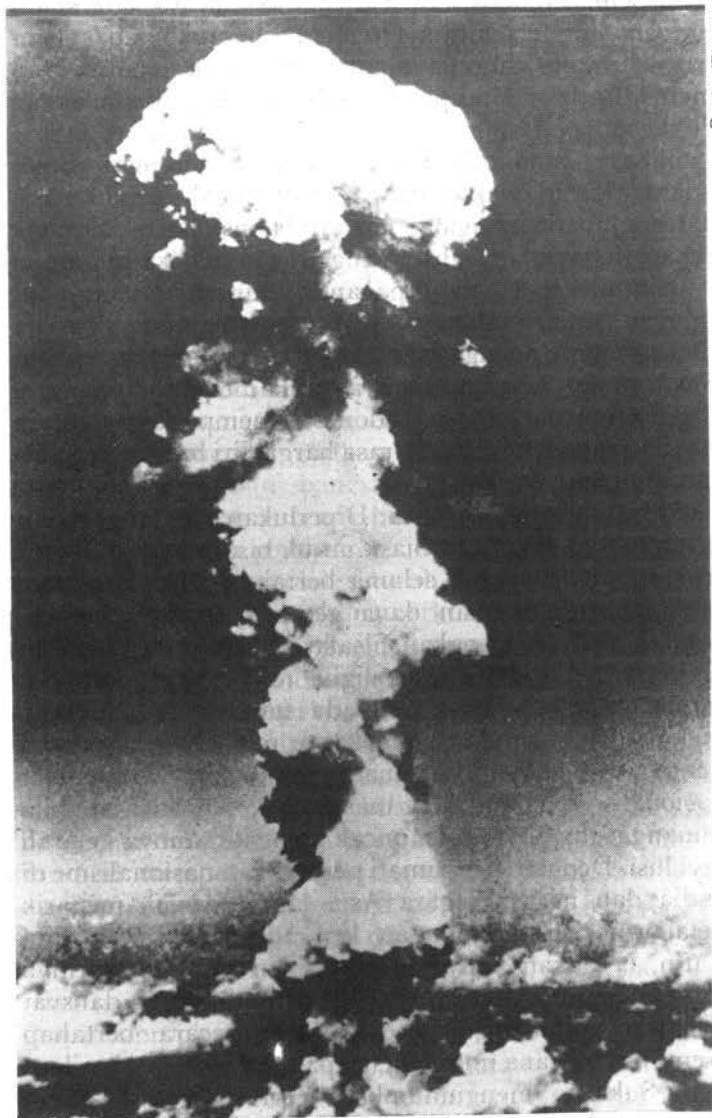
malang sekali orang-orang paternalis Belanda yang mengendalikan pemerintahan di Negeri Belanda percaya bahwa mereka tetap dapat melanjutkan sikap 'Bapak' kepada rakyat bekas koloni mereka. Harus diketahui bahwa kebangkitan raksasa kesadaran nasional merupakan usaha Sukarno-Hatta yang direncanakan dan disengaja. Dengan tangkas, keduanya mengambil manfaat dari keleluasaan dan kesempatan yang diberikan oleh Jepang. Lebih lanjut, sebagai bagian dari teori politiknya, Sukarno membentuk kesadaran yang memuncak itu menjadi sedemikian rupa, sehingga dalam menggembelngnya keinginan rakyat untuk merdeka menjadi semakin kuat. Dalam usaha yang unik ini, ia telah berjuang dan mengalami kesengsaraan selama bertahun-tahun guna membangkitkan kesadaran nasional dan membuat keinginan bangsanya menjadi memuncak. Pendudukan Jepang benar-benar memainkan peranan dalam arti bahwa penderitaan, kemelaratan, dan penghinaan yang dialami oleh seluruh bangsa mempertajam kesadaran nasional serta memperkuat keinginan bangsa.

Beberapa perselisihan menguntungkan Revolusi Indonesia. Karena pengindoktrinasian gagasan-gagasan Jepang mengganggu dan mengacaukan sistem pendidikan ratusan pemuda meninggalkan sekolah menengah dan, di samping memperkuat gerakan bawah tanah, mereka mencari pekerjaan di perkebunan, pertukangan, dan perniagaan. Terbatasnya tenaga Jepang memaksa mereka untuk mempekerjakan orang-orang Indonesia sebagai masinis, montir, dan tenaga administrasi, yang pada masa Belanda pekerjaan ini dipegang oleh orang Belanda atau orang Indo-Eropa. Kaum priayi Indonesia yang telah memegang jabatan tenaga administrasi rendah di propinsi-propinsi diberi posisi yang lebih tinggi. Akibatnya, terjadi banyak perubahan dalam susunan masyarakat yang mempertinggi rasa percaya diri bangsa Indonesia akan kemampuan mereka untuk menangani berbagai pekerjaan dan perdagangan serta menjalankan

roda pemerintahan secara efisien. Selain itu, ada keuntungan yang tersembunyi dengan dibentuknya pasukan-pasukan yang diberi latihan militer oleh Jepang. Dan mereka semua, tanpa kecuali, berdiri di belakang Sukarno.

Bahasa Indonesia pun mendapat dorongan besar selama kurun waktu itu. Setelah gagal memaksakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda, pihak Jepang menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia baik untuk keperluan propaganda maupun untuk tujuan-tujuan pemerintahan akan sangat berguna, karena bahasa ini dimengerti rakyat banyak. Bakat orator Sukarno dan kemampuannya untuk menambah perbendaharaan kata bahasa Indonesia memperkaya bahasa itu, dan menjadi lambang rasa harga diri bagi nasionalisme Indonesia.

Prestasi yang luar biasa. Diperlukan pandangan dan pemahaman yang luar biasa untuk bisa memacu jutaan jiwa supaya bergerak selama bertahun-tahun lamanya dan mempertahankan daya gerak semangat mereka. Setelah banyak mengkaji filsafat politik Barat, sejarah Indonesia, dan dorongan religius rakyat yang utama — termasuk mistik Jawa — pada tahun 1932 Sukarno mengembangkan satu pendekatan metodik yang sesuai dengan jiwa rakyatnya guna membangkitkan semangat nasionalisme dalam skala massa dan, akhirnya, apabila semangat itu sudah memuncak mengalirkannya ke arah revolusi. Dengan mengamati perjuangan nasionalisme di India dan negara-negara Asia lainnya serta menarik pelajaran dari perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin, ia bukan hanya memimpikan saat-saat dirinya akan memimpin rakyatnya dalam perjuangan dahsyat melawan kolonialisme, tetapi juga secara bertahap membuat rencana untuk mencapai puncak keberhasilannya. Sukarno mengumumkan teori triloginya, yaitu: Semangat Nasional, Kehendak Nasional, dan Aksi Nasional. Ketika menjelaskan trilogi ini dalam pidatonya di



Repro Tempo

Rupa-rupanya hanya bom atomlah yang bisa menahan ekspansi imperialis Jepang yang fasistis.

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1951, Presiden Sukarno mengatakan, "Tidak ada aksi tanpa keinginan, tidak ada aksi tanpa keherdank, . . . untuk membuat rakyat bergerak, kehendak itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Apabila prinsip ini diterapkan pada masalah-masalah yang menyangkut masyarakat berarti, di atas semuanya, pemimpin harus mengaktifkan kehendak bersama. Untuk apa? Untuk melahirkan Aksi Bersama, untuk menimbulkan Tindakan Bersama . . . Saya bahagia jika saya mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya, yaitu membangunkan rakyat agar beraksi, mendorong rakyat agar bertindak . . . agar rakyat bertindak, saya berusaha mengaktifkan kehendak bersama itu. Saya berusaha membangkitkan kehendak bersama, menjadikannya lebih tegas, membuatnya bernyala: . . . Tanpa kehendak individu-individu, tidak akan ada Aksi Nasional . . ." Bagi saya, usaha Sukarno dalam menempa Semangat Nasional, kemudian secara bertahap membentuknya menjadi Kehendak Nasional dan, akhirnya, melemparkannya secara bertahap dengan penuh gairah, makin lama makin keras membakarnya, kalau memakai istilah dia — sungguh-sungguh merupakan pembeberan rahasia yang mencolok bagi saya tentang bagaimana mistik Jawa dalam diri Sukarno dengan kepercayaan tradisionalnya tentang membangkitkan semangat batin, mengarahkan kehendak-nya kepada Yang Tertinggi dan menuntunnya ke puncak persatuan atau Identitas dengan Sang Pencipta, yang diterapkannya pada masalah nasional! Suatu pengalihan konsepsi agung Yoga ke dalam urusan-urusan masyarakat.

Saya memerlukan waktu lebih dari satu tahun untuk memperoleh kesan tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan sering kali saya menyayangkan sekali ketidakhadiran saya di sana ketika itu untuk merasakan hati yang berdebar-debar menyaksikan semua peristiwa ini.

BAB VI

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Ketika Kekaisaran Jepang sudah mendekati keruntuhannya, pada tanggal 8 Agustus Sukarno dan Hatta dipanggil ke Saigon untuk bertemu dengan Pangeran Terauchi, Panglima Tertinggi Tentara Jepang Wilayah Selatan. Setelah membicarakan soal proklamasi kemerdekaan Indonesia, di situ diputuskan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan harus bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. Sebelum berangkat ke Saigon, Hatta dan Syahrir telah sepakat bahwa saat yang menentukan bagi usaha revolusioner besar-besaran, yaitu secara terang-terangan menggabungkan berbagai kekuatan legal di bawah Sukarno-Hatta dan gerakan bawah tanah dalam usaha mendirikan negara Indonesia yang merdeka, tidak lama lagi akan tiba. Namun, kembalinya Sukarno-Hatta ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus, berbagai peristiwa yang berlangsung cepat dan mengejutkan telah terjadi. Sebelum itu, yaitu pada tanggal 10 Agustus, Jepang telah menerima syarat-syarat Potsdam, suatu fakta yang tidak disampaikan kepada Sukarno-Hatta di Saigon. Ketika berita bocor kepada bangsa Indonesia bahwa pada tanggal 14 Agustus Jepang telah menyerah kepada Sekutu, diam-diam Hatta berunding dengan Syahrir yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan diadakan sesegera mungkin karena kalau pada tanggal 19 Agustus mungkin akan sudah terlambat. Hatta bertukar pikiran dengan Sukarno. Karena khawa-

tir pihak Jepang akan membalas dendam kalau proklamasi kemerdekaan diadakan secara sepihak dan kemudian terjadi pembunuhan penduduk secara besar-besaran oleh tentara Jepang, maka Sukarno menjadi bimbang. Hatta memberikan jawaban yang bijaksana kepada Syahrir, bahwa proklamasi kemerdekaan harus diumumkan oleh Sukarno agar rakyat berdiri di belakangnya, dan karena Jepang masih memegang kendali, lebih baik mengikuti prosedur yang telah disepakati. Syahrir menemu Sukarno secara pribadi dalam usahanya agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan sehingga massa yang penuh harap dan sudah tidak sabar lagi dapat mendukungnya, tidak peduli bagaimana reaksi Jepang nantinya. Mula-mula Sukarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 17.00 hari itu juga (14 Agustus) dan karena itu persiapan-persiapan dilakukan bagi kedatangan penduduk secara besar-besaran ke Jakarta. Salinan proklamasi juga sudah sampai ke berbagai satuan untuk dibagi-bagikan. Orang-orang Indonesia yang bekerja di Kantor Berita Jepang, Domei, diperintahkan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia. Ketika jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul 17.00, mula-mula Sukarno minta agar proklamasi ditunda satu jam, kemudian sampai keesokan harinya.

Inilah saat suram sebuah drama besar. Sukarno yang revolusioner yakin dirinya dapat mengusahakan penyerahan kekuasaan secara sah oleh Jepang, yang kekuatannya dapat diperkirakan akan berakhir paling tidak dalam beberapa bulan lagi, dan dalam saat itu negara Indonesia yang merdeka dapat mengonsolidasikan dirinya sedemikian rupa sehingga akseptabel bagi Sekutu yang datang. Keruntuhan Jepang yang sangat mendadak itu merupakan kejutan baginya. Walaupun proses menurut hukum tak lagi bisa ditempuh, Sukarno menganggap jalan yang terbaik adalah mengejar tujuan itu melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan. Hatta

sepakat dengan Sukarno dan mulai membuat naskah isi Proklamasi Kemerdekaan.

Beberapa delegasi pemuda nasionalis mencoba menemui Sukarno, tapi tanpa hasil. Tanggal 15 Agustus, pada pagi-pagi buta, sebuah kesatuan tentara Indonesia yang ditempatkan di dekat Jakarta dan beberapa pemimpin pemuda menculik Sukarno-Hatta untuk dibawa ke Markas Garnisun yang terletak di luar Jakarta. Rupanya, Sukarno telah mengetahui bahwa tentara Jepang bermaksud menindas setiap proklamasi kemerdekaan yang dilakukan secara sepihak dan ia ingin menghindarkan terjadinya pertumpahan darah. Nampaknya Sukarno juga sudah merasa bahwa kelompok-kelompok bersenjata Indonesia yang tidak terorganisasi bukan lawan yang sepadan bagi pasukan Jepang yang berdisiplin dan menganggap bahwa pemakaian kekuatan massa yang telah bertahun-tahun diperjuangkan olehnya haruslah pada saat yang tepat kalau ingin pasti berhasil. Sikapnya yang tidak mau menyerah dan menantang dalam menghadapi permohonan para pemimpin pemuda menunjukkan bahwa Sukarno tidak merasa takut, karena merasa yakin bahwa, pada saat itu, jalan yang sebaik-baiknya adalah bertindak secara konstitusional.

Para pemuda nasionalis sadar sekali bahwa proklamasi kemerdekaan harus diumumkan oleh Sukarno agar bisa mempengaruhi seluruh negeri. Dan Sukarno yang sudah lama revolusioner bukanlah orang yang begitu saja bisa membuang keyakinannya dan menyerah. Menghadapi jalan buntu ini, orang-orang nasionalis lainnya mencari bantuan seorang penolong yang tulus ikhlas, yaitu Laksamana Maeda dari Angkatan Laut Jepang. Berkat campur tangan Maeda, orang-orang yang menawan Sukarno-Hatta melepaskan keduanya dengan jaminan sidang konstitusi akan segera diadakan di tempat kediaman laksamana itu untuk menghindarkan aksi balasan yang mungkin dilakukan tentara Jepang. Angkatan Laut Jepang karena merupakan angkatan perang



Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 menandai kelahiran sebuah negara baru: Republik Indonesia.

senior memenuhi janjinya, dan sidang berjalan tanpa campur tangan baik Laksamana Maeda maupun orang Jepang lainnya. Walaupun rapat mencoba mengubah bagian proklamasi yang mencek pemerintahan Jepang yang menindas, tanggal 16 Agustus Syahrir menginstruksikan kelompoknya di Kantor Berita Domei untuk menyiarkan proklamasi yang belum dibersihkan kepada dunia. Sebelumnya Syahrir telah menolak untuk ikut bersidang karena diselenggarakan di rumah seorang Jepang. Karena orang-orang pada waktu itu percaya bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan bala tentaranya ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang, maka Syahrir menginginkan Indonesia yang merdeka itu sesuai dengan cita-cita luhur PBB dan menghindari nada apa pun yang berbau Jepang dalam Proklamasi. Tindakan Syahrir yang tergesa-gesa ini memaksa Sukarno untuk turun tangan dan pada tanggal 17 Agustus ia buru-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Segera sesudah membacakan proklamasi, Sukarno cepat mengambil langkah-langkah untuk menggerakkan aparat pemerintahan. Dalam suasana yang menggemparkan seluruh negeri dan kegembiraan masyarakat meledak tanpa batas, dengan cepat Sukarno, yang oleh sidang diangkat menjadi Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden, mengeluarkan beberapa dekrit yang meminta agar kesatuan-kesatuan tentara mematuhi hanya perintah pemerintah Republik, penguasa-penguasa sipil tunduk pada instruksi-instruksi pemerintahnya, dan memerintahkan penggantian semua bendera Jepang di gedung-gedung umum dengan bendera Indonesia, Merah Putih. Dalam sejumlah kasus di mana pihak Jepang beserta pasukan-pasukannya menentang perintah ini, massa berubah menjadi luar biasa kejamnya dan membantai mereka. Sebaliknya, pelucutan senjata dan penawanan tentara Jepang — tugas yang akhirnya diserahkan kepada SEAC Mountbatten — oleh tentara

Republik yang dibantu baik oleh rakyat maupun kelompok-kelompok liar berlangsung dengan damai. Namun, sebagian besar orang Jepang yang benar-benar bingung karena jatuhnya pemerintah dan angkatan perang kekaisaran, menyerah tanpa mengadakan perlawanan kepada pihak Indonesia.

Sementara penduduk yang bergembira menganggap proklamasi kemerdekaan sebagai pemenuhan ramalan Joyoboyo, para pemimpin ingin segera mengonsolidasikan Republik dan mengusahakan agar seluruh kekuatan bersenjata diorganisasi secara terpadu sehingga RI akan dihormati oleh tentara kolonial Belanda, andai kata mereka datang bersama pasukan pendudukan Sekutu. Mereka juga ingin agar RI segera memperoleh pengakuan internasional dan diterima menjadi anggota PBB. Ketika mereka berusaha membangun kembali ekonomi negara yang kacau akibat perang, sabotase, dan kebijaksanaan ekonomi Jepang yang membahayakan, timbulah keinginan dan gelombang kegembiraan baru di kalangan rakyat, yang meluap-luap, terutama pemuda dan setiap warga negara, yaitu menganggap bahwa sudah menjadi tugasnyalah untuk melindungi Republik dan kemerdekaannya yang baru saja direbut. Di mana-mana teriakan 'Merdeka' mengoyak udara dan salam-salam seperti 'selamat pagi' atau 'selamat malam' dirangkap dengan salam merdeka: 'Selamat pagi, Selamat merdeka' dan 'Selamat malam, Selamat merdeka'. Bagi sorak-sorai kegirangan ini, malam dan siang kelihatannya tidak berbeda. Dan keadaan ini berlangsung beberapa minggu lamanya hingga kedatangan pasukan Sekutu. Tua, muda, wanita, anak-anak, semua ikut serta dalam paduan suara raksasa ini. Para pelajar bergegas membantu pelaksanaan pemerintahan negara merdeka. Upah mereka sedikit sekali, tetapi usaha keras mereka untuk menjalankan negara baru ini sungguh mengagumkan. Rasa percaya diri yang baru juga mulai muncul dalam diri bangsa Indonesia. Setelah melihat Belanda me-

nyerah dengan cara yang memalukan kepada Jepang, mereka mendapatkan pendatang yang berkulit kuning ini tidak sopan dan kasar, tidak sehebat yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka pun telah menyaksikan pula kemerosotan moral Jepang dan keruntuhan 'Asia Timur Raya'.

Tapi masalah-masalah negara mencemaskan para pemimpin Republik, bahkan ketika rakyat umum masih hanyut dalam suasana kegembiraan. Masalah pengiriman bahan pangan ke daerah-daerah yang kekurangan di Jawa dan Sumatra tanpa adanya transportasi yang cukup, perbaikan komunikasi umum yang bertahun-tahun sudah tidak digunakan, dan pembangunan kembali perekonomian — yang terakhir ini saja sudah merupakan tugas raksasa dalam negara mana pun yang telah dikuasai tentara — mengganggu pikiran para pemimpin, terutama Hatta dan sekelompok kecil pembantunya yang semuanya pakar ekonomi. Selain itu terdapat masalah-masalah keamanan dan politik yang berat dengan kelompok-kelompok politik yang banyaknya sama dengan jumlah huruf dalam abjad Inggris. Sebenarnya, pada tahun 1945 Hatta dan Syahrir menganjurkan tumbuhnya kelompok-kelompok politik yang berlainan sesuai dengan pemikiran mereka dan bahwa gerakan nasionalis seharusnya mempunyai basis yang luas serta mendidik kader-kader, dan bukannya bergantung pada pemimpin yang karismatik, karena yang terakhir ini gampang sekali disingkirkan sehingga merugikan perjuangan nasional. Di lain pihak, Sukarno lebih condong pada adanya sebuah partai tunggal yang dinamis. Akibatnya, kemajemukan partai berarti ketiadaan kesatuan organis. Pada tahun-tahun pertama Republik Indonesia, partai-partai politik yang berkuasa harus banyak memberi konsesi kepada Belanda demi evolusi damai ke arah pengakuan internasional dan akibatnya terpaksa berhenti karena adanya oposisi dalam Parlemen Sementara.

Masing-masing kelompok ini mempunyai milisinya sendiri. Ada pula kelompok-kelompok gerilya bersenjata yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mengangakat dirinya sendiri, yang menafsirkan kemerdekaan sebagai otonomi bagi mereka sendiri. Berbagai kelompok politik juga berpacu untuk memperoleh kedudukan dalam pemerintahan baru dengan cara mendukung tuntutan mereka dengan pameran kekuatan bersenjata. Dengan kesatuan-kesatuan yang terajut kuat, Partai Komunis Indonesia menjadi semakin vokal dan bertujuan untuk, akhirnya, merebut kekuasaan bagi mereka sendiri. Dalam melaksanakan tugas mereorganisasi kesatuan-kesatuan bersenjata menjadi Angkatan Bersenjata Republik yang terpadu, Amir Syarifuddin memainkan peranan yang menonjol. Namun ke dalam pengorganisasian ini tidak termasuk milisi dan berbagai kesatuan yang menjadi bagian dari partai politik dan sejumlah kecil kelompok bersenjata yang mempunyai 'panglimanya masing-masing'. Para pemimpin pun yakin sepenuhnya bahwa untuk mengalirkan kembali minyak dan karet dari Indonesia mereka harus mencari bantuan dari luar, terutama dari Amerika Serikat. Pemimpin-pemimpin yang tajam pikirannya, seperti Hatta dan Syahrir, sangat mengkhawatirkan sikap yang mungkin diperlihatkan tentara Sekutu yang tengah mabuk kemenangan pada waktu mereka tiba untuk menduduki wilayah. Keduanya terus-menerus merencanakan kehendak-kehendak. Bagi Sukarno yang berada di pucuk pimpinan RI yang merdeka, masa depan nampaknya penuh kesengsaraan.

Inilah situasi yang membentang di muka saya ketika saya mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.

BAB VII

PERJUANGAN MEMPERTAHAN- KAN KEMERDEKAAN

Lahirnya negara Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan lahir batin yang berlangsung berbulan-bulan lamanya: pada rakyat di seluruh Indonesia. Di Jawa, pusat kebangkitan nasional, perasaan ini bahkan lebih kuat. Bendera-bendera dan panji-panji berkibar di setiap tempat yang tinggi dan tentara maupun kelompok liar bersenjata berjalan hilir mudik dengan riangnya, menyandang senjata mereka yang beraneka ragam. Patroli sering diadakan di setiap sudut jalan, semua jalan, dan jalan raya. Begitu pula rintangan jalan diletakkan di sana-sini untuk mengintai musuh-musuh Republik, yaitu bangsa Belanda yang mungkin kembali. Kapal motor dan kapal kecil milik negara memeriksa perahu-perahu dengan kewaspadaan yang tidak mengendur untuk menghindarkan pendaratan kaum kolonial Belanda. Sejumlah besar rakyat jelata, laki-laki dan perempuan, menyandang berbagai senjata yang diambil dari gudang persenjataan Jepang, menjadi tentara pelopor. Bukan keadaan perang, melainkan kewaspadaan militer yang melibatkan peran serta masyarakat. Satu pola yang telah ditentukan, yang mencerminkan revolusi. Meskipun senjata melimpah, disiplin dan kedamaian tetap mewarnai. Damainya senang atau senangnya damai yang muncul setelah merdeka tidak terganggu, hingga pasukan Sekutu tiba.

Lima puluh dua hari setelah Republik lahir, pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Jakarta. Yang pertama mendarat adalah Divisi India Ke-23 yang sebagian besar terdiri dari orang-orang India. Bersama pasukan gelombang pertama inilah saya mendarat sebagai Pengamat Tentara India, untuk melaporkan kegiatan pasukan-pasukan India. Tak ada sambutan selamat datang bagi kami seperti di Birma dan Malaysia. Hanya beberapa kelompok anak-anak melambaikan tangan ketika mereka melihat kapal-kapal besar dan serdadu-serdadu India, yang rata-rata tinggi besar dan berkulit gelap, dengan senapan turun ke bawah melalui jala-jala yang bergerak-gerak di samping kapal-kapal. Suasana tenang yang mencekam dan tidak menyenangkan di situ menunjukkan adanya kecurigaan. Akan tetapi, pada umumnya tentara India merasa bahwa mereka bertemu dengan rakyat yang ada hubungannya dengan mereka di masa yang lalu. Sekarang saya berhadapan dengan revolusi.

Para pemimpin Indonesia sebetulnya menantikan kedatangan pasukan Amerika Serikat. Dan karena itu kedatangan pasukan penjajahan India membuat mereka cemas akan maksudnya. Rencana semula untuk mengirim tentara Amerika diubah dan Mountbatten mendadak diminta untuk mengambil alih tugas melucuti dan mengembalikan serdadu-serdadu Jepang ke tanah air mereka. Masa peralihan memberi kesempatan untuk mengadakan konsolidasi sepenuhnya kepada Republik. Tujuan Belanda ialah hendak memeralat militer Inggris dengan pasukan Indianya untuk mengembalikan secepatnya kekuasaan Belanda di pulau-pulau Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatra, mengingat kekuatan militer Belanda sendiri tidak memadai untuk tujuan itu. Dengan luar biasa cepatnya, Belanda membentuk tentara lokal yang terdiri atas penduduk bangsa Belanda, melepaskan para tawanan perang dan interniran Belanda, dan mendatangkan angkatan laut dan sejumlah kecil

tentara Belanda dari Eropa. Suatu situasi yang bertenangan bagi pemerintah Inggris. Pemerintah Buruh di Inggris tengah merintis jalan menuju dekolonisasi dengan prospek mempercepat terbentuknya Dominion India. Pemerintah Inggris juga bersimpati pada aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia, perasaan yang sering kali dinyatakan di Markas Besar Komando Inggris. Di Jakarta, Pemerintah Inggris terikat oleh ikatan-ikatan tradisional dengan Belanda, dilengkapi dengan persetujuan tanggal 24 Agustus 1945. Inilah latar belakang penyelewengannya yang kita saksikan pada saat Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan hidup pada masa bayinya. Bagi saya situasi ini mengasyikkan sekaligus menarik. Konflik imperialisme sangat menarik perhatian saya.

Karena jumlah pasukannya tidak memadai untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, Panglima Inggris, Letnan Jenderal Sir Philip Christian, mempercayakan tugas itu kepada pemerintah Sukarno, yang dia anggap memegang kekuasaan de facto atas Jawa dan Sumatra. Sebenarnya tentara Indonesia sudah melucuti dan menawan sebagian besar tentara Jepang dan ketika kapal-kapal Jepang tiba di pelabuhan untuk mengangkut mereka kembali ke tanah air, mereka diserahkan ke Markas Besar Inggris sebagaimana mestinya. Keseluruhan operasi dilaksanakan tentara Indonesia secara efisien, sehingga memperoleh penghargaan dari Jenderal Inggris.

Mengambil dari pengalaman pribadinya dengan Aung San di Birma, Mountbatten yang pada dasarnya menyukai gelombang baru di Asia, lebih suka menghindari pertempuran-pertempuran skala besar dengan bangsa Indonesia. Selain itu, di India muncul tuntutan nasional yang dipimpin oleh Nehru (yang baru-baru ini ditolong oleh Mountbatten di Malaysia), yang menyerukan penarikan pasukan India dari Indonesia. Dengan demikian pasukan India tidak dapat digunakan selain untuk

menjaga ketertiban. Oleh sebab itu, Mountbatten nampaknya cenderung untuk mengamankan kerja sama dengan para pemimpin Republik, yang dapat diberi beberapa konsesi politik yang tidak besar yang diiringi dengan perubahan sikap Belanda yang ia harapkan dapat ia pengaruhi.

Pada mulanya Inggris kelihatan puas berurusan dengan pihak Republik dan enggan terlibat dalam hal-hal di luar tugas utama mereka. Sebenarnya kebijaksanaan Inggris pada waktu itu ialah menghindarkan diri dari turut terlibat dalam persoalan di luar wilayah mereka dahulu. Karena mengetahui besarnya kekuatan yang ada di belakang Republik dan konsisten dengan pendapat umum di Inggris, yaitu mengadakan dekolonisasi dan bergerak menuju pembentukan pemerintahan sendiri di India maupun koloni-koloni lainnya. Inggris tidak ingin menjadi Kuda Troya untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Namun dalam waktu dua bulan, ketika bekas Gubernur Jenderal Belanda Van Mook tiba di Jakarta, tampak ada perubahan pada sikap Inggris. Pasukan-pasukan Belanda juga datang, mula-mula dalam jumlah kecil dan kemudian dalam formasi-formasi. Angkatan Laut Belanda mengambil posisi di sekeliling Jawa dan Sumatra. Dikatakan kedatangan pasukan Belanda adalah untuk melindungi para interniran, tetapi nyatanya seluruh gerakan Inggris-Belanda bertujuan untuk memungkinkan Belanda berbicara dengan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang kuat. Mula-mula Inggris memperluas daerah-daerah pendudukan mereka di kota-kota dengan dalih harus melindungi garis pertahanan mereka, dan kemudian setapak demi setapak menambah jumlah kota yang mereka duduki. Pemerintahan Sipil Belanda (NICA – satu kata yang hina bagi bangsa Indonesia) dimasukkan ke tempat-tempat ini dan pasukan Belanda terang-terangan mengambil alih beberapa daerah yang dipilihnya dari tangan Inggris. Saya dan sejumlah pengamat

lain bingung melihat bagaimana, di luar kekuasaan Markas Besar Sekutu di Jakarta, Angkatan Laut Belanda diizinkan mencampuri perdagangan antarpulau di selat-selat yang sempit antara Jawa dan Sumatra. Perdagangan barter ini sangat menentukan bagi Republik untuk melanjutkan ekspornya melalui Singapura dan memperoleh bahan pakaian dan sebagainya bagi rakyatnya.

Kedatangan pasukan Inggris memaksa Republik mengambil taktik keahlian, kesabaran, dan propaganda yang baru sambil memelihara tempo semangat revolusioner yang tinggi. Mereka harus menjaga agar pasukan-pasukan Indonesia yang dibentuk dan dilatih Jepang selalu dalam keadaan siaga penuh, mengingat persenjataan Komando Inggris lebih unggul dan didukung dengan tenaga manusia yang sudah teruji dalam perang. Agar tidak terpedaya, pada tanggal 4 Januari 1946 Pemerintah Republik pindah ke Yogyakarta guna melanjutkan pemerintahan negara dari sana dan meninggalkan satu unit kecil di Jakarta untuk mengadakan diplomasi dengan Markas Besar Inggris dan Belanda kolonial yang mengintip di belakangnya. Patut dipuji bahwa bangsa Indonesia, bahkan pada waktu-waktu itu, tetap berkepal dingin, terus menjaga kesatuan, dan tidak ikut serta dalam usaha-usaha petualangan. Berbagai insiden kejam di Surabaya bulan Oktober 1945 merupakan penyimpangan. Kelompok ekstremis Indonesia yang tidak terkendali dan hasutan Inggris yang tidak perlu membantu terjadinya kebakaran besar pertama di kota itu. Dan golongan komunis Indonesia pun ingin sekali melatih 'revolusi' mereka. Bahkan setelah pihak Republik, dalam wujud Presiden Sukarno, berhasil menyelamatkan situasi dari tangan kelompok ekstremis, Inggris bukannya membantu Republik untuk menonjolkan dirinya, melainkan mempertajam masalah dengan mengadakan serangan menghukum yang menggelejar dari udara, laut, dan darat — yang jelas sekali merupakan usaha untuk mengembalikan prestise yang hilang.

Peperangan kecil di Surabaya itu sudah saya lukiskan. Waktu yang saya lewatkan bersama orang-orang revolusioner dan percakapan yang lama dengan para pemimpin semua kelompok pemuda merupakan bagian dari pendidikan saya. Saya berusaha memahami dalamnya desakan emosi di balik teriakan 'Merdeka' dan dasar pemikiran 'Tutup Belanda', 'Tutup Gurkha' ('Tutup Gurkha', karena adanya salah paham mengira semua tentara India orang Gurkha). Bagaimanapun juga, bukankah saya mengharapkan pengalaman seperti ini? Saya berusaha menembus pikiran para pemimpin muda, baik pria maupun wanita, yang beberapa di antaranya hanya berumur belasan tahun. Saya terperanjat mendengar mereka menggunakan banyak sekali kata-kata revolusi-revolusi klasik yang tidak perlu. Pelajaran yang mereka terima di sekolah nampaknya tidak sia-sia. Saya kagum sekali melihat bagaimana mereka telah bertahun-tahun lamanya dipersiapkan dan dilatih untuk menghadapi kesempatan bagi kegiatan revolusioner. Tugas saya sangat dipermudah karena sebelumnya saya telah bersahabat dengan beberapa di antara mereka di Jakarta. Sikap mereka sekarang benar-benar aneh; secara pribadi mereka tetap ramah seperti dahulu dan mengurus semua keperluan saya di samping menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak habis-habisnya, tetapi di depan umum mereka tidak sopan dan ucapannya kasar-kasar. Kepala pasukan yang 'menawan' kami di Hotel Orange sebenarnya kawan baik saya, tapi ia tidak ragu-ragu untuk memberi perintah secara kasar kepada saya sambil menghunus samurainya. Bukan karena semangat muda dan patriotisme belaka yang membakar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan revolusioner, melainkan juga karena adanya keyakinan yang teguh bahwa kolonialisme harus ditentang sepenuhnya dengan seluruh kekuatan yang ada jika negara mereka yang indah, yang dikaruniai kekayaan alam, mau dijadikan tempat yang membahagiakan bagi diri sendiri dan

keluarga.

Meskipun Inggris melancarkan pembalasan dahsyat di Surabaya, pemimpin-pemimpin Republik terus juga mencari penyelesaiannya dengan jalan perundingan. Bekas Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, yang sudah berada di Jakarta, memulai permusyawaratan-permusyawaratan dan sambil memeriksa pendapat tentang parameter-parameter persetujuan serta mendesak agar kedaulatan Belanda lebih dulu diakui, ia mempertanyakan keabsahan Republik, dan tidak menemukan banyak kesepakatan. Bersamaan dengan itu Van Mook mulai mengadakan tekanan terhadap Republik dan memberitahukan bahwa ia tidak mau berurusan dengan Sukarno-Hatta, yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang! Tapi untuk mengejar kepentingan-kepentingan Republik dalam mengonsolidasikan diri dan lebih memilih perundingan daripada pertempuran, dengan dekrit khusus Sukarno menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat — Parlemen Sementara) yang tadinya diketuai Syahrir. Guna membantu Van Mook, Pemerintah Belanda di Den Haag mengumumkan usul yang tidak jelas: bahwa Indonesia akan menjadi rekan dalam suatu uni Indonesia-Belanda dan semua rekan uni itu memiliki status harga diri yang sama. Sementara Sukarno menolak usul itu di hadapan umum, dalam perundingannya dengan Van Mook Syahrir menuntut agar Belanda terlebih dulu mengakui Republik Indonesia. Sultan Yogyakarta, seorang bangsawan yang terkemuka, berdiri teguh dan setia di belakang Republik.

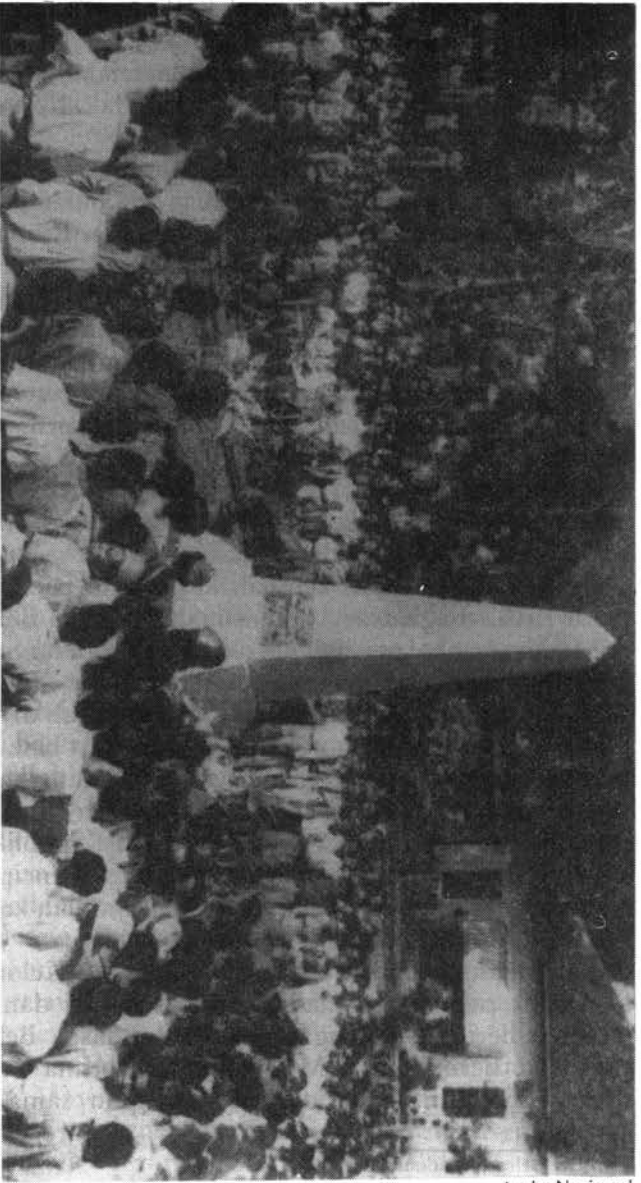
Awal tahun 1946, menyusul tekanan pada Belanda agar mencari penyelesaian yang disepakati bersama, pada tanggal 10 Februari Pemerintah Belanda mengajukan usul untuk mendirikan negara Persemakmuran Indonesia Serikat yang masalah-masalah dalam negerinya ditangani oleh sebuah Parlemen Indonesia dengan mayoritas anggota bangsa Indonesia dan sebuah kabinet

yang diketuai oleh Wakil Ratu Belanda. Usul ini ditolak Indonesia karena sama sekali tidak realistis. Ketiadaan realisme di pihak Pemerintah Belanda saat itu mengakibatkan penderitaan yang tak terperikan bagi jutaan rakyat Indonesia dan meminta banyak korban dari tentara India selama mengusahakan perdamaian. Sebagai pengamat, saya sedih kalau teringat bahwa tanah kelahiran Grotius, pencipta hukum internasional pada zaman modern, sebuah negara yang telah begitu banyak andilnya pada kesenian di Eropa, dan sebuah bangsa yang telah menderita di bawah Nazi tidak menyetujui kemerdekaan bangsa lain. Secara emosional, saya sulit menyatukan kekerasan Pemerintah Belanda dengan kawan-kawan Belanda saya yang masih muda, yang beberapa tahun lamanya bersama saya di markas besar internasional Masyarakat Teosofi di Madras, terutama Conrad Woldringh yang memesonakan saya setiap kali ia memainkan Debussy.

Bulan April 1946 Syahrir berangkat¹⁾ ke Den Haag. Belanda telah memberi tahu pihak Inggris bahwa mereka lebih suka berhubungan langsung dengan orang Indonesia. Syahrir²⁾ menjelaskan secara tegas bahwa titik tolaknya haruslah pengakuan terhadap negara RI sebagai negara yang berdaulat dan setelah itu barulah dimungkinkan untuk mengadakan perundingan bagi kerja sama dengan Pemerintah Belanda di segala bidang. Belanda menjawab bahwa mereka dapat mengakui Republik hanya sebagai salah satu unsur pokok dari Persemakmuran Federal dan wilayahnya hanya meliputi daerah-daerah Sumatra dan Jawa yang tidak diduduki pasukan Sekutu. Jawaban ini mengungkapkan hasrat Belanda untuk menurunkan Republik ke tingkat kedudukan yang tidak berarti dan usul ini tidak realistis dalam konteks situasi di Indonesia. Karena hal itu berada di

1) Menurut Subadio Sastrosatomo, bukan Syahrir yang berangkat ke Den Haag, tapi sebuah delegasi. *Red.*

2) Baca: Delegasi Indonesia. *Red.*



Arsip Nasional

Perhatikan Tugu Proklamasi yang masih berdiri tegak di tengah peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur.



Arsip Nasional

Kehadiran pasukan Sekutu, yang diboncengi tentara Belanda, ternyata hanya memperburuk situasi. Tampak penyerahan senjata Jepang kepada pihak Sekutu di Jakarta, tanggal 15 Mei 1946.

luar mandat yang diberikan oleh Parlemen Indonesia (KNIP), Syahrir¹⁾ dengan sangat kecewa kembali ke tanah air dan menganggap Belanda telah kehilangan kesempatan untuk memulihkan kehendak baiknya di Indonesia.

Situasi politik kembali tidak menentu. Pasukan India yang terakhir harus ditarik mundur pada bulan November 1946, sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah India. Karena itulah terjadi kesibukan untuk menerbangkan pasukan-pasukan Belanda ke daerah-daerah dan kota-kota terpencil oleh Angkatan Udara Inggris karena Belanda tidak mempunyai alat transportasinya. Pasukan-pasukan India juga mengoperkan persenjataan berat mereka, termasuk tank dan alat pengangkut berlapis baja, kepada tentara Belanda.

Pada bulan Februari 1946, saya memutuskan untuk mempertaruhkan nasib saya bersama revolusi di Indonesia. Saya kembali ke India minta untuk dibebaskan dari tugas ketentaraan dan kembali ke Jakarta pada bulan April 1946 sebagai wartawan sebuah harian di Bombay.

Meskipun dihalang-halangi oleh Markas Besar Sekutu, saya berhasil mengadakan perjalanan ke dan dari wilayah Republik dengan bebas. Sawah-sawah di sekeliling Jakarta merupakan penutup yang sangat baik untuk menghindarkan patroli Gurkha yang, kadang-kadang, menyangka saya orang Indonesia. Bulan Juni 1946 merupakan saat yang sangat berat bagi Republik oleh karena kemajemukan partai politik menciptakan tekanan-tekanan baru. Selain itu, ada sejumlah ketidakpuasan umum karena tiadanya kemajuan dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Kelompok-kelompok pemuda menjadi tidak sabar lagi dan lebih memilih bertempur dengan Sekutu, termasuk Belanda, daripada berunding. PM Syahrir menerima kritikan keras walaupun, pada dasarnya, ia pun sama tetap

1) Bica: Delegasi Indonesia

menentang kembalinya penjajahan, namun siap berkompromi dengan Belanda dalam masalah-masalah lainnya. Partai-partai golongan kiri yang ekstrem menghendaki agar revolusi sosial dilakukan bersama-sama dengan revolusi politik. Kelompok Trotsky melancarkan agitasi menentang sejumlah kecil penguasa feodal. Hal ini menempatkan Syahrir pada posisi yang sulit. Sebagai seorang sosialis, Syahrir tidak dapat menentang prinsip agitasi, tetapi sebagai PM ia tidak dapat membiarkan adanya ketidakstabilan dalam Republik pada masa kritis. Syahrir merasa agitasi ini tidak tepat waktunya. Akan tetapi, seperti sudah menjadi sifatnya, Syahrir tidak menyetujui tindakan mempergunakan dukungan rakyat secara besar-besaran untuk membela pendiriannya. Dalam hal ini nampaknya ia pun menghindari tindakan tegas dengan harapan agitasi akan tidak memperoleh dukungan masyarakat. Pemimpin kelompok Trotsky yang terkenal di dunia internasional, Tan Malaka, lalu merencanakan untuk merebut kekuasaan dalam Republik. Mungkin dengan pendapat bahwa dirinya akan dapat memuaskan kekecewaan yang meningkat terhadap kebijaksanaan pemerintah untuk berunding dengan Belanda, Tan Malaka mempergunakan kesatuan bersenjata yang ada di bawah kendalinya dan komando militer setempat yang telah terkena pengaruhnya untuk menculik PM Syahrir beserta dua orang rekan kabinetnya pada waktu mereka berkunjung ke Surakarta, sumber agitasi menentang para penguasa feodal, pada tanggal 27 Juni. Saat itu saya sedang berada bersama Syahrir dan kami tengah berbincang-bincang sekitar tengah malam. Tanpa tembakan dan tanpa kata pemberitahuan penahanan atau perlawanan, sebuah detasemen kecil tentara dengan cepat membawa Syahrir dan ajudannya keluar. Saya mengira Syahrir pergi untuk memenuhi suatu janji, sampai Mayor Angkatan Darat Yusuf, memberi saran kepada saya untuk pindah ke rumahnya, karena situasi kota sedang tegang dan Syahrir telah diculik oleh

beberapa orang ekstremis. Kawan saya yang juga famili Nyonya Sukarno, Sofyan Tanjung, muncul entah dari mana, lalu berkata bahwa saya tidak perlu cemas dan ia-lah yang akan mengawal saya ke Yogyakarta. Penculik menahan Syahrir dan kawan-kawannya selama tiga hari dan melepaskan mereka hanya setelah sebuah kesatuan dari Markas Besar Angkatan Darat di Yogyakarta tiba atas instruksi Presiden Sukarno, yang dengan semangat berseru kepada rakyatnya agar bersatu melawan penculik, "Ini sebuah negara, bukan sebuah perkumpulan, bukan sebuah liga, bukan juga sebuah partai." Ia menghukum elemen-elemen radikal karena telah melangkahi batas-batas agitasi. Dalam waktu singkat, para pemimpin penculik ditangkap. Dua hari kemudian Syahrir kembali ke Yogyakarta untuk menyampaikan usul-usul baru Belanda kepada Presiden Sukarno.

Pada saat itu Inggris tampaknya telah selesai melakukan sebagian besar usaha yang terdapat dalam persetujuan tanggal 26 Agustus 1945 dengan Belanda. Pangkalan terdepan yang sangat penting, yang telah diperoleh Inggris di sekitar kota Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya di Jawa, dan sekitar Palembang, Medan, Padang di Sumatra berada dalam proses diserahterimakan kepada Belanda, yang juga sudah menerima sebagian besar dari daerah-daerah di Kalimantan dan Sulawesi, termasuk pulau-pulau di luarnya dari orang Australia. Di Sulawesi Utara, pasukan kolonial yang dilatih Belanda memberontak dan menyeberang ke pihak Republik. Sementara Belanda mengharapkan Republik akan runtuh sedikit demi sedikit, pendapat dunia yang menentang Belanda makin meluas. Di Amerika Serikat, India, dan Inggris tuntutan yang mendukung kemerdekaan RI dan menentang kembalinya kolonialisme Belanda meningkat. Waktu juga mendesak karena, atas tuntutan pemerintah sementara India pimpinan Nehru di New Dehli, pasukan India harus meninggalkan Indonesia pada bulan November 1946. Dalam situasi ini Inggris medatangkan

Sutan Syahrir dan Prof. Schermerhorn tengah menandatangani naskah Perjanjian Linggajati. Belanda ternyata kemudian ingkar.



diplomata-diplomatnya yang berpengalaman. Meskipun saran-saran Sir Archibald Clark Kerr dibenci Belanda karena dianggap terlalu luas, Komisaris Khusus Inggris di Asia Tenggara, Lord Killearn, berperan lebih sebagai pemimpin dan pengarah ketika Van Mook dengan ditemani tiga Komisaris Jenderal dari Den Haag bertemu dengan delegasi RI di Linggajati, tidak jauh dari Jakarta. Killearn berhasil mempengaruhi Belanda dan tanggal 15 November dicapai kata sepakat. Dalam persetujuan ini Belanda mengakui Pemerintah Republik sebagai penguasa de facto yang menjalankan pemerintahan di Jawa, Sumatra, dan Madura; kedua pemerintah akan bekerja sama mendirikan Negara Indonesia Serikat yang berdasar federal pada tanggal 1 Januari 1949 dan harus merupakan sebuah negara demokrasi yang berdaulat; akan dibentuk Majelis Konstituante dengan wakil-wakil yang dipilih baik dari Republik maupun dari daerah lainnya; dan Negara Indonesia Serikat akan menjadi anggota Uni Belanda. Meskipun Parlemen Sementara Indonesia (KNIP) menentang keras, namun kedua pemerintah mengesahkan juga persetujuan ini pada tanggal 25 Maret 1947. Jelas, perjanjian ini lebih maju dari syarat-syarat yang diajukan kepada Syahrir ketika ia berangkat ke Den Haag pada bulan April 1946.¹⁾

Perjanjian Linggajati segera menghadapi pergolakan-pergolakan sebagai akibat penafsiran yang berbeda-beda. Meskipun Belanda telah mengakui kekuasaan de facto Republik, tapi mereka masih juga berusaha mendirikan negara-negara boneka di Jawa Barat dan Sumatra. Sistem federal adalah apa yang didirikan oleh Van Mook secara sepihak di mana saja yang dianggapnya tepat. Republik menganggap usaha ini sebagai bentuk politik memecah belah yang sudah tidak asing lagi, yang secara dangkal disamarkan dan menjadikan Belanda sebagai

1) Baca: Delegasi Indonesia berunding di Hoge Veluwe. *Red.*

penguasa satu-satunya atas negara baru ini. Van Mook membuat 'Negara Indonesia Timur' sebagai bagian dari negara federal yang diusulkan.

Di pihak Republik, kegiatan Van Mook meningkatkan rasa tidak setuju pada Perjanjian Linggajati. Kelompok Masyumi, PNI, dan Trotsky pimpinan Tan Malaka sebelumnya telah menentang keras ratifikasi KNIP dengan alasan mereka tidak dapat menerima Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Sikap kelompok Trotsky yang didorong oleh keinginan untuk mendestabilisasi pemerintahan Syahrir dapat kita pahami karena merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk memperoleh kekuasaan, tetapi oposisi PNI yang para penasihatnya, Sukarno dan Hatta, telah menyetujui perjanjian itu betul-betul mengherankan. Persaingan untuk merebut kekuasaan muncul dalam tubuh politik Republik.

Masyumi dan PNI merasa dukungan politik mereka sendiri lebih besar daripada dukungan Partai Sosialis Syahrir. Pendukung Perjanjian Linggajati adalah sayap kiri yang terdiri atas Partai Sosialis, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), dan Partai-partai Buruh dan Komunis, selain Partai-partai Katolik dan Kristen yang kecil. Sebenarnya Belanda mengharapkan KNIP tidak akan meratifikasi perjanjian itu, tetapi Sukarno memastikan pengesahannya dengan jalan menambah jumlah anggota KNIP pada tanggal 29 Desember 1946 dengan Dekrit Presiden, dengan dalih perluasan seperti ini telah lama dinantikan. Keinginan Belanda ini jelas terlihat ketika, pada bulan April, dengan secara sepihak mereka menganggap bahwa mereka tetap memegang kedaulatan hingga Negara Indonesia Serikat terwujud.

Banyak tentara India yang bersimpati kepada Indonesia. Sebagai veteran Perang Dunia II, mereka telah menghayati semangat yang mendorong Sekutu untuk memerangi Jerman dan Jepang. Mereka mempercayai sepenuhnya Piagam Atlantik dan pada janji akan

diberikannya Empat Kebebasan dalam susunan dunia baru. Mereka juga mengenal baik berbagai perkembangan yang terjadi di India, perundingan-perundingan antara pemimpin nasionalis India dengan negarawan-negarawan Inggris, serta prospek India yang merdeka di masa yang tak lama lagi akan tiba. Pada waktu yang sama pergaulan dengan pemimpin-pemimpin militer Inggris selama hampir lebih dari satu setengah abad telah mengembangkan dalam diri mereka kesadaran yang kuat akan kewajiban terhadap pemimpin mereka.

Oleh karena itu, setiap kali mereka digunakan untuk melawan pasukan Indonesia, meskipun terjadi konflik emosional dalam diri mereka, mereka bertindak dengan kesadaran yang kuat akan kewajiban mereka terhadap penguasa Inggris, yang mendapat janji kesetiaan mereka. Tetapi, di antara kami sendiri, kami memperdebatkan dan mempertanyakan peran yang terpaksa mereka lakukan ini. Sebenarnya Komando Asia Tenggara (SEAC) Mountbatten tidak dipersiapkan untuk mengemban tugas di Indonesia dan tekanan politik Inggris meminta agar repatriasi pasukan-pasukan Inggris ke Kerajaan Inggris dipercepat. SEAC ditinggal hanya bersama beberapa Divisi India-Inggris untuk melaksanakan tugas menginternir dan merepatriasi tawanan perang Jepang. Dihadapkan pada situasi di Indonesia di luar ruang lingkup tugas ini, orang-orang Inggris dipaksa oleh perjanjian antara pemerintah mereka dengan Belanda untuk menjaga hukum dan ketertiban di Indonesia hingga pasukan Belanda siap mengambil alih. Mula-mula Inggris sama sekali tidak gembira menerima tugas yang kedua ini dan pada umumnya menyerahkan sebagian besar dari tugas untuk bertanggung jawab terhadap hal itu kepada RI. Akan tetapi ketika tekanan-tekanan dari Den Haag memuncak, mereka mengambil jalan melakukan serangan-serangan terbatas terhadap Republik untuk mendirikan pangkalan terdepan bagi pasukan Belanda yang mengikuti di belakangnya. Kare-

na di India belum ada suara yang efektif yang menentang penggunaan pasukan India untuk melawan kaum nasionalis Indonesia, maka Inggris pun tak segan-segan untuk memanfaatkan tentara India yang berada di bawah komandonya, meskipun mereka tahu betul kepada siapa pasukan-pasukan itu — seperti juga kebanyakan perwira Inggris — bersimpati. Karena saya pernah menjadi anggota Tentara India, saya merasa sudah menjadi tugas saya yang nyata untuk memecahkan konflik perasaan dalam barisan Tentara India dan berjuang untuk tujuan itu. Sebelumnya, dalam konflik yang terjadi di Surabaya, seorang Rajput pahlawan di Birma yang sedang berbaring menghadapi maut dengan peluru tentara Indonesia di jantungnya bertanya kepada saya, "Tuan, mengapa kita harus mati untuk Belanda?"

Karena tekanan publik di India agar pasukan India ditarik dari Indonesia meningkat dan Nehru, yang akan ikut serta dalam pemerintahan sementara di bawah perlindungan Inggris sebagai persiapan untuk menghadapi kemerdekaan India, juga menyerukan penarikan itu, peranan untuk melakukan aksi-aksi agresif terhadap Indonesia oleh Inggris dioperkan dari bala tentara India kepada pasukan Gurkha, yang perasaannya kurang terpengaruh. Segera setelah pemerintahan sementara dibentuk di New Delhi, Nehru berhasil menetapkan tanggal yang pasti bagi penarikan seluruh tentara India, termasuk serdadu-serdadu Gurkha.

Sebagian besar pasukan India di Indonesia terdiri dari orang-orang Punjap, Madras, Rajput, Mahrattas, Puthan yang memeluk agama Hindu, Islam, dan Kristen. Walaupun semua membenci peranan mereka di Indonesia, orang-orang Muslim-lah yang paling gelisah. Sekitar enam ratus tentara Muslim India 'membelot' karena dibujuk, kata pihak Inggris yang juga mengakui bahwa beberapa di antaranya karena tidak suka memerangi bangsa Indonesia. Saya sering bertemu dengan mereka di Yogyakarta dan, kadang-kadang, melihat mereka ber-

operasi sendiri-sendiri bersama kesatuan-kesatuan gerilya Indonesia. Mereka bersemangat sekali dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dinilai baik oleh para perwira Indonesia. Bahwasanya ada beberapa orang di antara mereka yang membantunya itu karena terpicat oleh keuntungan materi tidaklah diragukan lagi, tapi ada juga, meskipun tidak banyak, yang telah memberikan jiwanya demi Indonesia. Sungguh menarik bagi saya melihat tentara Indonesia tidak memobilisasi mereka sebagai satu kesatuan; sebabnya jelas, karena mereka tidak ingin membangkitkan amarah orang-orang Inggris. Dan ketika Komando Inggris mengundurkan diri, secara bertahap para 'pembelot' ini dipulangkan ke India.

Kehidupan sebagai wartawan perang sungguh mengasyikkan. Markas Besar Inggris telah membuat sebuah Kemah Pers yang hangat dan nyaman di tempat bekas kediaman Panglima Angkatan Laut Belanda. Kami dilayani dengan baik, dengan makanan dan anggur yang baik, dan beberapa tawanan perang Jepang mengurus kami sebagai perawat dan pesuruh. Saya sekamar dengan seorang mayor Jepang dan perwira lain. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang terputah-putah, mayor itu mengisahkan apa yang terjadi selama masa pendudukan Jepang. Beliau sangat bersimpati kepada orang-orang Indonesia.

Sebagian besar dari kami berkebangsaan Inggris, Australia, Belanda, seorang bangsa Cina, dan seorang bangsa India: yaitu saya sendiri. Orang India lainnya, T.G. Narayanan, meninggalkan Kemah segera setelah perundingan Linggajati. Dia menuju New Delhi untuk bergabung dengan sekretariat PBB. Kemudian Narayanan kembali ke Indonesia sebagai Sekretaris Komisi Jasa-jasa Baik Dewan Keamanan PBB (yang di Indonesia dikenal sebagai Komisi Tiga Negara — *penerjemah*). Noel Buckley dari *Reuter*, Bob Kiek dari Kantor Berita Belanda *Aneta*, dan Graham Jenkins dari *Melbourne Age*

tinggal bersama saya. Mungkin karena Australia bersimpati kepada bangsa Indonesia, saya menganggap Graham Jenkins seorang teman yang penuh pengertian. Kami banyak bertukar informasi di bar Kemah. Bob Kiek dan wartawan-wartawan muda Belanda lainnya benar-benar obyektif dan menunjukkan pengertian terhadap pendirian bangsa Indonesia.

Meskipun dulunya saya ini seorang perwira di Markas Besar Inggris, Markas Besar ternyata merintangi kebebasan kerja saya. FEP mereka, bagian politik Markas Besar, kadang-kadang sangat kaku dan tidak sopan. Petang hari tanggal 9 Mei 1946, Mayor West (yang saya juluki 'Mae West' karena ketampanannya) menghendak saya lewat telepon, "Anda tidak dapat pergi dengan pesawat besok." Saya agak tercengang, tetapi kemudian mengetahui bahwa humas Indonesia telah mencantumkan nama saya dalam daftar wartawan yang akan menyertai PM Syahrir di dalam pesawat terbang Angkatan Laut Inggris besok pagi menuju Yogyakarta guna menemui Presiden Sukarno, yang perbedaan-perbedaan pendapatnya dengan Syahrir semakin besar. Pertemuan ini sangat penting karena amat berarti bagi stabilitas Republik. Markas Besar Inggris mengizinkan wartawan *Reuter*, Buckley, untuk meneruskan perjalanan bersama Syahrir meskipun, seperti saya, dia pun tidak diizinkan kemarin sorenya. Masih terus beradanya Markas Besar Inggris di Jakarta adalah berkat banyaknya pengorbanan tentara India, dan karenanya adalah wajar, kalau sebagai reaksi saya menulis dalam buku harian saya: "Orang-orang Inggris! *Et tu Brute!*" Saya mengajukan protes keras berkenaan dengan adanya diskriminasi ini kepada SEAC. Ketika mereka menjelaskan bahwa kunjungan Buckley tidak sah dan saya seharusnya memberi tahu Jenderal supaya beliau mau memaafkannya, saya menolak mentah-mentah dengan alasan prinsip. Namun, persoalan-persoalan saya dengan Markas Besar segera reda setelah Letnan Kolonel Laurens Van der Post, yang

kelak terkenal sebagai seorang novelis tentang kehidupan Afrika Selatan, yang berpembawaan halus menangani hubungan dengan saya. Beliau bahkan memberi saya 'pas jalan' agar bisa bebas keluar-masuk wilayah Republik dan Inggris.

Sebenarnya humas Belanda memperlakukan saya jauh lebih baik daripada Inggris, setelah yang terakhir ini kembali ke tanah airnya.

BAB VIII

INDIA DAN INDONESIA

Dilihat dari sudut sejarah, antara India dan Indonesia sejak zaman dulu kala telah ada hubungan satu sama lain. Pengembara-pengembara dari berbagai daerah pantai India, baik pangeran, pendeta, maupun pelaut yang pemberani, membawa barang dagangan yang berharga di antara pantai-pantai India dan atau Kepulauan Indonesia. Segenap keluarga kerajaan, serdadu, dan sejumlah pemimpin sekte agama Hindu rupanya telah menjejakan kakinya di Jawa dan Sumatra, bergaul, dan berbaur dengan penduduk setempat. Dalam proses itu, kegiatan-kegiatan besar keagamaan serta kebudayaan berkembang di daerah itu dan memuncak dengan lahirnya beberapa kerajaan yang kuat, seperti Majapahit, Syailendra, dan Mataram. Menurut berita, penguasa kerajaan-kerajaan ini merasa bangga atas hubungan mereka dengan India. Sukarno sendiri sering kali mengingatkan saya bahwa penguasa terakhir Mataram, Diponegoro (*sic.*), jatuh ke tangan Belanda setelah diruntuhkan moralnya dengan bualan Belanda bahwa India telah jatuh ke tangan Inggris.

Di Prambanan dekat Yogyakarta, candi-candi Syiwa menjadi saksi yang mengesankan tentang ikatan kebudayaan dan agama masa lampau antara rakyat kedua negara. Orang suci pelindung India Selatan, Agastya Muni, bahkan juga sekarang masih duduk di dalam batu

yang dipahat dan dengan wajahnya yang ramah menatap pemandangan Jawa Tengah. Tidak begitu jauh dari situ terdapat monumen agung Borobudur, lambang filsafat Budha yang didirikan bersama-sama oleh para rahib agama Budha dari India dan Indonesia, dibantu oleh tukang-tukang batu Jawa yang terampil. Di samping itu, di Dataran Tinggi Dieng di jalan ke Kaliurang, terdapat peninggalan arca kereta perang (*Raths*) Mahabharata. Dan pada saat menikmati wayang, orang menyadari bagaimana epik Hindu, Ramayana dan Mahabharata, telah meresap ke dalam cerita rakyat Jawa. Di Bali yang jauh kita dapati suatu bentuk Hinduisme Tantri dan Budhisme. Melihat bukti-bukti hubungan masa lalu yang menggetarkan ini, saya menyadari bangsa ini adalah sanak saudara kami yang masih menghargai warisan kebudayaan agama-agama kuno India. Saya lebih berbangga dan bangga mendengar agama Islam menyebar ke pulau-pulau di Indonesia melalui para pedagang Muslim dari pantai barat India, yang secara bertahap bermukim di pulau-pulau Indonesia.

Yang sangat berarti ialah bahwa Sukarno (bersama ibunya yang Hindu Bali)-lah yang menentukan suasana untuk menekankan adanya rantai kebudayaan antara kedua negara dewasa ini. Dalam suratnya kepada Jawaharlal Nehru tanggal 19 Agustus 1946, menyusul ulang tahun kedua (pertama? — *penerjemah*) Republik Indonesia, ia mengatakan "Negara dan rakyat Anda terjalin dengan kami melalui ikatan-ikatan darah dan kebudayaan yang sudah ada sejak mula pertama sejarah. Kata 'India' pasti akan selalu menjadi bagian dari hidup kami, karena kata itu membentuk dua suku kata pertama nama yang kami pilih bagi tanah dan bangsa kami — yaitu 'Indo' dalam Indonesia. Yogyakarta, tempat saya menulis surat ini — seperti Jawa, Sumatra, dan kebanyakan nama lainnya — termasuk kata bahasa India; nama saya sendiri menjadi saksi yang mengesankan akan betapa besarnya kami telah mewarisi kebudayaan kuno

negeri Anda yang kaya. . . ." Sebagai isyarat kemauan baik dan persahabatan dengan India, Sukarno memerintahkan agar pada ulang tahun kemerdekaan RI yang pertama, bendera tiga warna India dikibarkan di samping bendera Indonesia. Baik Sukarno maupun Hatta memuji peranan India dan Nehru, dan mendesak rakyat agar selalu ingat bahwa Indonesia tidak sendirian dalam perjuangannya melawan kolonialisme.

PERJANJIAN BERAS INDIA-INDONESIA

Pengakuan de facto kepada Republik Indonesia oleh Panglima Tertinggi Sekutu, segera setelah mendarat di Jakarta pada bulan September 1945, merupakan langkah pertama untuk memperoleh pengakuan internasional. Diplomasi Syahrir yang lihai dimaksudkan untuk memperluas pengakuan seperti itu. 'Pertempuran Surabaya' merupakan salah satu peristiwa utama yang memaksa Komando Inggris mengakui bahwa 'Republik memiliki dukungan umum yang kuat'. Selama dua atau tiga bulan akhir tahun 1945, pertempuran sengit antara pasukan India dari Komando Inggris dan orang-orang Indonesia yang bersenjata berkobar di sebagian besar wilayah Jawa, Sumatra, dan Bali, karena Inggris mendirikan pangkalan-pangkalan terdepan di sekeliling kota-kota besar dan kecil yang penting, bahkan ketika mereka berkali-kali mendudukinya. Kalau saja Inggris sejak awal menyadari adanya dukungan umum bagi Republik ini, berbagai akibat buruk syarat-syarat perjanjian mereka dengan Belanda tanggal 26 Agustus 1945 dapat dihindarkan dan nyawa beratus-ratus orang dapat diselamatkan pada masa, yang pada dasarnya termasuk operasi masa damai. Sementara itu, Pemerintah Buruh di Inggris, yang telah mengarahkan pandangannya kepada kemerdekaan India dan tengah bergerak menuju pemerintahan sementara di New Delhi di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru, mulai menekan Belanda untuk memulai mengadakan perundingan-perundingan dengan Republik.

Pada waktu itulah saya memutuskan untuk melepaskan tugas ketentaraan saya dan kembali ke Indonesia sebagai wartawan yang bebas. Sebelum meninggalkan India bulan Desember 1945, dari pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin Indonesia, khususnya Hatta, saya mengetahui bahwa mereka berharap akan mendapatkan pengakuan 'de yure' dari India segera setelah pemerintahan bebas terbentuk di New Delhi. Hatta berpendapat pengakuan seperti ini dapat membuka jalan bagi rangkaian pengakuan dari negara-negara Islam dan Asia lainnya. Dalam hal ini, Dr. Hatta menaruh harapan besar pada persahabatannya dengan Nehru sejak masa kegiatan Liga Anti Imperialis di Brussel dan ingin, jika mungkin, supaya saya menyampaikan hal itu kepada Nehru. Kesempatan bagi saya segera muncul ketika saya 'meliput' perjalanan Nehru ke Malaysia dan Singapura pada bulan Maret 1946, untuk harian yang bertempat di Bombay. Sebelum itu, saya baru sekali bertemu dengan Nehru, yaitu ketika saya menyampaikan paket berisi laporan yang analitis dan obyektif mengenai Tentara Nasional India kepadanya dari teman saya T.G. Narayanan, dari *The Hindu*, Madras, yang bersama saya di Birma menjadi wartawan perang. Narayanan telah menemui banyak orang di sana, baik panglima Inggris, tawanan perang, orang-orang dari Tentara Nasional India, dan selama lebih dari beberapa bulan bersusah payah menyusun laporan sambil sering kali mencari hubungan di wilayah yang berada di luar kekuasaan tentara Inggris. Pada saat menyeberangi Selat Penang, sebelum terbang kembali ke India, di perahu Nehru membawa saya ke pinggir perahu lalu meletakkan tangannya ke bahu saya — seperti biasa — serta meminta saya melaporkan situasi di Indonesia secara singkat. Setelah saya menyampaikan keinginan dan jalan pikiran Hatta, untuk mendapatkan pengakuan secepatnya dari pemerintah India yang bebas, sebagai jawaban Nehru mengungkapkan keterbatasan kekuasaan pemerintah

sementara di New Delhi, dan karenanya ia tidak dapat menjanjikan akan memberikan pengakuan secepatnya. Selain itu, saya harus meyakinkan Hatta bahwa Nehru akan melakukan apa saja yang mungkin, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, khususnya di arena internasional, untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan cepat Nehru mendiktekan pesan singkat, yang lebih cepat lagi diketik, untuk para pemimpin Indonesia, menandatangani, dan menyerahkannya kepada saya, sebelum kami turun dari perahu dan ia terbang kembali ke India.

Begitu saya tiba di Jakarta pada tanggal 6 April, saya menemui kesulitan untuk menghubungi Dr. Hatta, yang bersama Sukarno telah pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari guna mendirikan pusat pemerintahan Republik di sana. Untunglah PM Syahrir, yang kadangkang tinggal di Jakarta untuk berunding dengan Belanda dan Inggris, dapat saya temui. Ia kelihatan senang, tetapi tidak memberikan reaksi apa pun ketika saya menjelaskan bahwa Nehru mungkin tidak dapat mengusahakan pengakuan secepatnya dari pemerintah sementara di New Delhi. Ia mengatakan penghargaannya. Syahrir memang tidak biasa memberikan reaksi yang bersemangat, kecuali kalau berita itu cukup menggelitik untuk memancing tawa kerasnya. Saya mendapat kesan Syahrir mengandalkan adanya pengakuan ini kepada politisi Inggris dan golongan kiri Belanda. Namun, saya tidak mengungkapkan perasaan was-was saya atas optimismenya, karena hubungan saya dengan Raden Abdul Kadir dan orang-orang yang dekat pada Van Mook membuat saya jadi mengetahui bahwa kebijaksanaan resmi Belanda adalah membuat Republik sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu dari sekian partai politik di Indonesia.

Syahrir amat tertarik oleh perkembangan-perkembangan di India dan saya mempergunakan kesempatan itu untuk memperbaiki beberapa distorsi

yang telah disampaikan kepadanya oleh para pejabat Departemen Luar Negeri Inggris di Jakarta. Tengah saya menjelaskan bagaimana Perang Dunia II mengacaukan pemasokan beras dari Birma ke India, bagaimana beras yang sedikit yang ditanam di India dialihkan untuk konsumsi pasukan-pasukan tentara, dan bagaimana situasi yang dibuat oleh manusia menciptakan bencana kelaparan yang parah di Bengal, dan wilayah India lainnya menuju ke keadaan yang sama, saya menunjukkan kepadanya bahwa Indonesia beruntung dalam hal persediaan pangan meskipun diduduki Jepang. Sementara Syahrir menceritakan bahwa di antara berbagai masalah, pangan kebetulan tidak menjadi masalah bagi Republik, kecuali curah hujan yang rendah di daerah-daerah tertentu yang lebih menjurus pada masalah kemacetan distribusi karena transportasi yang tidak memadai, tiba-tiba timbul pikiran untuk bertanya kepadanya apakah Indonesia, dengan berasnya yang berlimpah-limpah di Jawa yang subur dan panen tiga kali setahun, dapat membantu India sebagai imbalan bagi tekstil dan obat-obatan dari India. Bagaimanapun juga, dalam benak saya nama Jawa selalu bertalian dengan bahan pangan sejenis biji-bijian yang dinamakan Jawa (padi-padian) dan tidak asing lagi sejak masa kanak-kanak saya. Sejenak wajah Syahrir menunjukkan ekspresi lebih dari sekadar senyum kekanak-kanakan; wajahnya berseri-seri, ia memejamkan matanya dan berdiam diri sesaat. Kemudian, sambil menyatakan rasa simpatinya kepada rakyat India, Syahrir menawarkan bantuan setengah juta ton beras untuk rakyat India. Ia ingin India-lah yang mengurus kapal-kapal untuk mengangkutnya. Syahrir menjelaskan bahwa Pulau Jawa baru saja menikmati hasil panen yang luar biasa melimpah dan cukup untuk dibagi dengan India. Namun Indonesia kekurangan tekstil dan bila India dapat membantu mengirim tekstil, hal ini akan disambut baik.

Bagi Syahrir yang cerdas dan pandangannya jauh ke

depan, lepas dari memperteguh kemauan baik India kepada Republik sebagaimana dinyatakan dalam pesan Nehru, kedatangan kapal-kapal India untuk mengangkut beras dari Jawa berarti pukulan telak bagi blokade ekonomi Belanda, yang menghalangi perdagangan antar-pulau dan bahkan perdagangan barter dengan kapal-kecil yang sudah berlangsung turun-temurun dengan Singapura dari Sumatra. Prospek adanya persetujuan perdagangan antara pemerintah RI dengan India membuka pandangan baru yang dapat mengakibatkan meluasnya pengakuan internasional kepada Republik. Namun, Syahrir tidak mengungkapkan hal itu kepada saya, dan membiarkan orang lain mengambil kesimpulannya sendiri.

Kisah tawaran Syahrir ini dimuat di halaman depan harian saya, *Free Press Journal of Bombay*, tanggal 8 April, dengan kepala berita: "Sikap Kehendak Baik Indonesia kepada India, PM Syahrir Menawarkan 500.000 Ton Beras." Tulisan ini kemudian dikutip luas baik oleh pers India maupun oleh pers luar negeri. Redaksi saya di Bombay mengirim kawat, "Tawaran beras Anda benar-benar prestasi yang luar biasa." Jawaharlal Nehru mengirim surat yang menyatakan penghargaannya atas kerja saya sebagai wartawan di Indonesia. Tanggal 12 April, harian-harian di Indonesia memuat berita itu dengan pokok berita dalam huruf-huruf besar yang memenuhi lebar kertas koran dan pesan Nehru kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, yang saya sampaikan kepada Syahrir, di sampingnya. Dalam menyampaikan salam rakyat India kepada rakyat Indonesia yang melakukan perjuangan gagah berani demi kemerdekaan mereka, Nehru mengatakan, "Dalam kunjungan saya ke Malaysia, yang begitu dekat dengan Indonesia, saya sering berpikir tentang perjuangan besar Anda untuk memperoleh kemerdekaan dan membicarakannya dengan banyak orang Indonesia serta teman-teman lain di sini. Dewasa ini kami di India sedang menghadapi

masalah-masalah besar, yang mungkin mempengaruhi masa depan negeri kami. Namun, bagaimanapun eratnya kami terjat dalam berbagai persoalan kami sendiri, kami tetap memikirkan Anda karena kami menyadari perjuangan Anda untuk merdeka berhubungan erat dengan perjuangan kami. Sekiranya terjadi perubahan besar apa pun di India yang menghasilkan susunan pemerintahan nasional, yakinlah bahwa kami akan mempergunakan setiap kesempatan untuk membantu Anda dan menolong sedapat-dapatnya sesuai dengan kemampuan kami.”

Pesan Nehru ini sangat membesarkan hati pimpinan Indonesia dan jutaan rakyat Indonesia bergelora semangatnya karena adanya dukungan terhadap perjuangan mereka. Wartawan-wartawan Barat yang konservatif tidak menganggap berita ini begitu berarti, tapi ia menaikkan alis beberapa orang di Whitehall dan Den Haag. Orang-orang Inggris sedikit tercengang mendengar pandangan Nehru yang terus terang itu, yang dikeluarkan bahkan sebelum pemerintahan sementara terbentuk di New Delhi, sedangkan pemerintah Den Haag mengeluarkan reaksi keras dan menyebutnya sebagai campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri mereka. Di London para pejabat bertanya-tanya apakah yang akan dilakukan Nehru sekarang, mengingat politisi Partai Buruh menyukai langkah yang diambil Nehru. Sejumlah kecil pejabat merasa tindakan Nehru ini tidak memberi harapan baik bagi politik luar negeri Dominion India yang baru (Sebelum berdirinya India yang merdeka, politik luar negeri seluruh Persemaikmuran Inggris dikoordinasi di London). Bagi saya, reaksi-reaksi yang muncul di luar negeri itu menjengkelkan dan sejenak saya merasa telah menimbulkan keributan. Penguasa setempat Belanda menggerutu kepada saya dan kepada Markas Besar Inggris. Direktur Dinas Intelijen Politik, Kolonel Laurens Van der Post, yang biasanya baik hati, tetapi cerdas dan tajam (yang kelak

mengetarkan dunia dengan novel-novelnya mengenai susunan masyarakat di tanah kelahirannya, Afrika Selatan), menanyakan mengapa saya tidak membicarakan dulu kisah Penawaran Beras itu dengan Markas Besar Inggris atau Belanda sebelum mengirimkannya ke harian saya. Saya menjawab tenang bahwa saya tidak perlu memperlihatkan dulu hasil wawancara yang diberikan PM sebuah negara atas nama negara dan pemerintahnya sendiri langsung kepada saya. Selain itu, saya sungguh puas menyaksikan hasil panen padinya karena saya telah mengunjungi wilayah Republik dan menyaksikan keadaan dengan mata kepala sendiri. Van der Post lebih dari tercengang mendengar jawaban saya. Ketika dia berusaha untuk sedikit memaksa, mengingat Belanda telah meminta agar saya 'diusir ke luar Indonesia,' saya juga bereaksi tajam dengan menyatakan bahwa hal itu akan membuat India menyambut kedatangan saya sebagai pahlawan! Sesudah itu saya lebih banyak dibiarkan, hanya saja yang sungguh menjengkelkan saya kebebasan bergerak saya agak dibatasi dan surat-surat saya diperiksa dulu. Reaksi-reaksi Belanda terhadap penawaran beras saya terima tanpa protes. Surat kabar saya di Bombay memuat pernyataan Belanda bahwa, pada hemat mereka, jumlah beras di Jawa tidak cukup untuk dibagi dengan India dan tidak ada beras yang dapat dikeluarkan dari Jawa tanpa izin mereka, karena, menurut mereka, kedaulatan berada di tangan mereka. Sejak saat itu penguasa resmi Belanda benar-benar memusuhi saya, kecuali beberapa kawan Belanda saya yang istimewa.

Sejumlah pertanyaan berkenaan dengan penawaran beras ini diajukan dalam Majelis Rendah Inggris. Jawaban pejabat yang singkat dan tepat menyiratkan bahwa tawaran tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan karena alat transportasi di Jawa tidak memadai, tempat yang ada di kapal dan persediaan beras di Jawa tidak mencukupi. Jawaban serupa disusun oleh

pejabat Inggris di Singapura. Di New Delhi, tempat pemerintahan nasional sementara akan dibentuk, pejabat mengatakan bahwa tawaran beras yang diberitakan itu tidak realistis, mengutip perkataan Komisaris Khusus Inggris untuk Asia Tenggara, Lord Killearn!

Akibatnya terciptalah suasana tidak percaya pada tawaran beras itu. Karena itu redaktur saya di Bombay meminta pernyataan ulang Syahrir mengenai penawaran ini. Syahrir dapat pula mengeluarkan pernyataan pemerintah mengenai hal itu, yang diikuti dengan komunikasi kepada Pemerintah India melalui Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Mula-mula penguasa Belanda menyarankan agar penawaran itu disampaikan melalui mereka, mengingat merekalah yang memegang kedaulatan.

Jelas, pergolakan mengenai masalah ini timbul karena implikasi-implikasi politisnya. Pemerintah Republik menerima tantangan ini. Dalam wawancara pers lainnya, tanggal 21 April, Syahrir mengulangi tawarannya tanggal 7 April kepada saya, yaitu sesudah mengakhiri perjalanan besarnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam wawancara itu Syahrir mengatakan bahwa hasil panen yang melimpah ruah tersimpan di gudang beras Besuki, Jawa Timur, dan yang lainnya menegaskan, bahwa berlimpahnya panen seperti tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keterangan ini ditegaskan dengan pernyataan resmi PM Indonesia tanggal 23 April, yang mengatakan, bahwa wawancara dengan *Free Press of India-FPI* (Pers Bebas India) tertanggal 7 April, yang menawarkan setengah juta ton beras kepada India yang dilanda kelaparan telah "menimbulkan keragu-raguan dunia luar" dan menambahkan, "Saya ingin mengulangi lagi bahwa saya memberikan gambaran yang benar tentang situasi bahan pangan dan kebutuhan kami akan barang impor kepada wakil *FPI*. Perkiraan terendah hasil panen tahun ini adalah 5 juta ton dan perkiraan tertinggi mencapai 7 juta ton." Dengan menekankan bahwa rakyat

Indonesia mengkonsumsi tidak lebih dari 4 juta ton, Syahrir menambahkan, "Bahkan, apabila tidak ada surplus beras, saya kira rakyat siap untuk memberikan 500.000 ton beras untuk tekstil, perkakas, dan peralatan yang sangat dibutuhkan. Saya kira jauh lebih wajar apabila Republik Indonesia melakukan apa yang mungkin untuk meringankan situasi pangan di India. Kami banyak menaruh simpati kepada rakyat India dan akan menyambut baik adanya hubungan ekonomi dan spiritual antara Republik dan India seperti antara bangsa-bangsa yang merdeka." Menteri Penerangan Indonesia serentak meminta rakyat membantu organisasi-organisasi bantuan sosial dalam mengumpulkan kuota beras yang dijanjikan kepada India. Syahrir menunjuk seorang menteri untuk khusus menangani pengumpulan dan pengiriman beras ke India. Usaha mobilisasi di belakang tawaran beras ini didorong oleh propaganda Belanda yang menyerang tawaran beras tersebut, dibantu oleh agen-agen mereka di kalangan rakyat untuk menciptakan oposisi menentang tawaran beras, dan agitasi dalam wilayah Republik oleh elemen-elemen golongan Trotsky pimpinan Tan Malaka, yang menentang tawaran itu sebagai bagian dari usaha umum mereka untuk merusak stabilitas Pemerintah Republik, dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Tanggapan Nehru terhadap tawaran beras dan pernyataan penghargaannya dari pendapat umum India digabungkan dengan implikasi-implikasi politik prospek adanya persetujuan barter dengan pemerintah lainnya sangat menguatkan tekad Syahrir untuk terus melaksanakan tawaran beras dan mengatasi segala yang merintanginya.

Tugas menggembelng bangsa di belakang tawaran beras Syahrir diserahkan kepada Hatta. Dalam suatu siaran kepada rakyatnya di seluruh wilayah Republik tanggal 22 Juni 1946, Syahrir mengatakan tawaran-tawaran spontan dari rakyat telah mencapai 200.000 ton berat bersih dan sikap Indonesia "penting sekali artinya

dan telah membangkitkan perhatian seluruh dunia". Dengan menunjukkan bahwa tawaran itu didasarkan atas peri kemanusiaan, salah satu asas utama nasionalisme Indonesia yang sekarang diabadikan dalam UUD Republik, Syahrir menambahkan, "Persahabatan kita dengan India, yang menjalin hubungan hangat dengan kita sejak masa-masa awal sejarah, berada dalam kategori khusus. India telah luar biasa memperkaya budaya kita; selama berabad-abad India telah memelihara hubungan perekonomian dengan kita dan dalam bidang politik kita telah berhasil belajar banyak dari perjuangan jantan yang dilakukan negara itu melawan imperialisme Inggris. Dari gerakan nonkooperasi India lah kita belajar dan dengan sukses menerapkan prinsip-prinsip yang mengobarkan api semangat patriotisme itu hingga puncaknya . . . baik India maupun kita menentang kapitalisme dan imperialisme dan ada banyak persamaan mendasar dalam hakikat perjuangan kita bersama. Akibatnya, terdapat ikatan batin yang kuat antara kita dan India, yang menjadi dua kali lebih kuat karena persahabatan erat pemimpin-pemimpin nasional kedua negara." Hatta juga mengatakan kepada rakyatnya, "Karena Proklamasi Kemerdekaan belum lama terjadi, kita harus mempertahankan perjuangan yang tidak berkesudahan untuk memenangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan kita, dan bantuan yang telah kita terima sehubungan dengan hal ini tidaklah kecil." Dalam suatu prakiraan mengenai hubungan masa mendatang, yang menjadi sumber gagasan non-blok, Dr. Hatta mengatakan, "Tanda-tanda dan isyarat-isyarat sejarah dewasa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan India sudah dekat. Segera India yang merdeka, yang terjalin dalam ikatan-ikatan persahabatan yang paling intim dengan Indonesia yang merdeka, akan memberikan contoh kepada seluruh dunia tentang bagaimana bangsa-bangsa seharusnya hidup dalam persahabatan dan pengertian. Cita-cita ini telah menjadi pendorong utama

tindakan-tindakan di masa lalu dan akan menjadi dasar tindakan masa mendatang. . . ." Namun, situasi tidak lepas dari penderitaannya. Salah satunya di belakang pasukan-pasukan India yang dipimpin Inggris, terdapat sejumlah komunis India, penganut Trotsky, dan golongan demokrat radikal, yang telah diberi pekerjaan dalam kesatuan-kesatuan khusus Dinas Intelijen Politik Inggris. Beberapa orang di antara mereka digerakkan pada pendapat umum Indonesia untuk mencemarkan nama baik pimpinan nasional Indonesia. Artikel anti-Nehru muncul di harian Republik *Independent* di Jakarta, disunting oleh seorang Tamil Sri Lanka yang telah bekerja untuk Kantor Berita *Domei* maupun Indonesia! Meskipun *Independent* dibiayai oleh Presiden Sukarno, beberapa pokok berita ditempatkan oleh Markas Besar Inggris. Seorang komunis India lainnya, yang pernah belajar di Inggris, berusaha menggambarkan Nehru sebagai seorang munafik ketika ia membicarakan masalah-masalah India dengan Syahrir!

Di setiap tingkat kemajuan tawaran beras, ada rintangan. Tawaran disampaikan pada tanggal 7 April dan pada pertengahan bulan Juni para menteri Indonesia telah mengirimkan jumlah yang cukup banyak ke pelabuhan-pelabuhan untuk dikapalkan. Karena kurangnya alat transportasi bermotor dan beberapa truk Jepang yang sering kali dipakai berada di kesatuan-kesatuan pertahanan, yang mendapatkan prioritas, maka Indonesia telah meminta India untuk meminjamkan atau membarter beberapa truk pasukan-pasukan India yang akan segera kembali. Peralatan berat pasukan India, yang berasal dari Amerika Serikat, sudah dialihkan kepada tentara Belanda. Akan tetapi permintaan ini hanya sampai ke meja perundingan-perundingan di London dan Komisaris Khusus Inggris di Singapura menentang pengiriman beras Indonesia ke India dan sebagai gantinya menawarkan persediaan beras dari Bangkok. Nehru, yang pada waktu itu duduk dalam pemerintahan

sementara di New Delhi tetap bersikeras dan para pemimpin Indonesia mempertahankan desakan mereka. Syahrir juga menerima undangan dari Nehru untuk menghadiri Konferensi Hubungan Bangsa-Bangsa Asia yang historis dalam bulan Maret 1947. Pada awal bulan Juni 1945, Pemerintah India mengumpulkan kapal-kapalnya di Singapura dalam keadaan siap memuat beras di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 27 Juli, ketika semua rintangan telah dipatahkan. Sekretaris Urusan Pangan India menandatangani dan bertukar surat perjanjian dengan Perdana Menteri Syahrir. Dengan perjanjian itu, Republik harus membantu sebanyak 700.000 ton beras sebagai ganti bantuan barang-barang konsumsi sebanyak yang diminta Republik yang nilainya sama dengan harga padi itu. Kebanyakan wakil asing di Jakarta merasa skeptis terhadap tawaran beras ini dan menganggapnya mustahil dilaksanakan. Tapi setelah tawaran ini terlaksana, tidak kurang penghargaan dan kekaguman yang ditujukan kepada Nehru dan Pemerintah India karena ketekunan dan kesabaran mereka dalam menangani masalah ini, dengan menggunakan prinsip-prinsip politik dan praktek internasional yang telah dalam tertanam. Tindakan perikemanusiaan yang sederhana menjadi pengertian politik begitu ia dilahirkan. Bagi saya pribadi, peristiwa ini merupakan pemulihan nama baik 'berita utama' yang pada mulanya dianggap tidak realistis.

Dalam perundingan persetujuan barter, Nehru pada tanggal 7 Mei mengirim kawat kepada Syahrir: "Saya mendapat informasi dari pers, bahwa Anda telah baik hati menawarkan untuk mengirim setengah juta ton beras dari Indonesia ke India guna meringankan bencana kelaparan, asal keperluan pengirimannya telah diatur. Saya juga memahami keperluan Anda yang mendesak akan tekstil India. Kami sangat berterima kasih atas tawaran Anda. Setengah juta ton beras atau bahan pangan pokok lainnya akan membawa perbedaan besar

bagi India dalam bulan-bulan mendatang ini. Sudikah Anda memberikan kepada kami rincian tawaran Anda lebih lanjut, sehingga kami dapat mengadakan persiapan-persiapan berkenaan dengan itu! Di sini pun terdapat kelangkaan bahan sandang, tetapi saya yakin Pemerintah akan berusaha sepenuhnya untuk menyediakan tekstil sebagai penukar bahan pangan. Saya mengharapkan jawaban cepat Anda." Setelah barter itu, PM Syahrir tanggal 27 Mei: mengirim kawat "Kami menantikan kunjungan Anda dengan penuh harap. Anda bersama Mahatma Gandhi dikenal dan dicintai rakyat kami sebagai pemimpin-pemimpin Asia. Perjuangan kemerdekaan Anda selalu mengilhami perjuangan kami. Itulah sebabnya kami kini bahagia karena mendapat kesempatan untuk menunjukkan simpati kami kepada rakyat Anda, dengan cara mengirimkan seluruh beras yang dapat kami berikan untuk menghindarkan bencana kelaparan melanda negeri Anda . . . Saya yakin kesempatan itu sudah dekat, saat kita berada dalam posisi untuk memperluas kerja sama konstruktif yang indah di antara rakyat kita ini dengan bekerja sama di bidang politik dan budaya pula. Kami menaruh harapan besar pada status politik Anda di masa mendatang karena kami sangat menaruh perhatian pada kemerdekaan dan kesejahteraan Anda, seperti Anda memiliki perasaan demikian juga terhadap diri kami. . . ."

Pada bulan Mei-Juni 1946, penawaran beras juga terjerat dalam situasi politik yang memburuk. Pihak Indonesia bersikeras untuk mengadakan barter langsung dengan India, sedangkan Belanda tetap berpendirian bahwa barter itu harus dilakukan bersama mereka. Komandan Luar Biasa SEAC, Marsekal Mountbatten, yang sebelumnya telah menolong Nehru di Malaysia, kini mengunjungi New Delhi guna menemui Nehru dan Raja Muda Inggris sebelum melanjutkan perjalanan menuju London untuk menasihati Pemerintah Inggris berkenaan dengan perkembangan-perkembangan itu. Di Jakarta

semakin banyak tanda yang menunjukkan adanya maksud Belanda untuk secepatnya menggunakan aksi militer terhadap Republik agar beras barter itu tidak akan pernah sampai di India.

Indonesia berhasil memenuhi sebagian besar bantuan beras yang ditentukan dalam perjanjian barter itu ke India. Sebagai gantinya, Indonesia menerima peralatan pertanian, tekstil, dan bermacam-macam barang yang mereka perlukan. Akan tetapi, prestasi yang dicapai di bidang internasional lebih berarti. Aspek-aspek politik dengan ringkas disusun oleh Wakil Presiden Hatta: "Faktor ketiga yang melekat dalam penawaran beras kami ke India adalah aspek politik, yang otomatis menjadi bagian dan paket transaksi. Belanda mengklaim yurisdiksi atas Indonesia. Sebagai bukti, Belanda telah mendirikan sejumlah kantor pemerintahan di Jakarta. Kesemuanya merupakan bangunan lemah dan yurisdiksi Belanda hanya ada di atas kertas semata. Penawaran beras kita telah membocorkan gelembung kepura-puraan Belanda dan mereka kehilangan akal samasekali. Orang-orang Belanda tidak berdaya ketika kita menawarkan beras untuk meringankan penderitaan kelaparan di India. Apa yang dihasilkan oleh tawaran itu? Tawaran itu menunjukkan Republik Indonesia adalah negara yang aktif dan melaksanakan rencananya, bahwa kita mempunyai wilayah yang kita perintah dan pemerintahan yang efisien yang melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan satu pukulan kita telah memberikan *'coup de grace'* kepada klaim-klaim Belanda bahwa Republik kita sedang berada di ambang keruntuhan dan rakyat berkeliaran dengan perut kosong."

Pada ulang tahun pertama Republik (17 Agustus 1946), Presiden Sukarno mengatakan, "Aspek yang paling memuaskan dari kebijaksanaan luar negeri kita adalah perjanjian antara kita dengan Pemerintah India. Dengan cara demikian kita telah memenangkan persaha-

batan dan membangkitkan rasa persaudaraan orang-orang India serta menempa mata rantai pengertian yang akan bermanfaat sekali bagi kita, manakala India mengambil tempatnya yang sebenarnya sebagai salah satu bangsa terbesar di dunia. Di samping itu, kita juga memperoleh bukti yang meyakinkan bahwa satu bangsa besar menganggap kita sebagai bangsa yang mempunyai tempat yang mapan di dunia, bahwa ia mempercayai kita dan memperlakukan kita sebagai bangsa yang dewasa." Saat itu saya berdiri pada jarak beberapa kaki dari Sukarno sehingga kata-katanya merasuk menggetarkan jiwa saya hingga ke tulang dan memberikan kepuasan bahwa suatu peran yang murni jurnalistik pada awal mulanya telah memuncak menjadi keberhasilan suatu usaha yang menguntungkan beberapa bangsa dan kepentingan perdamaian dan kemajuan. Penting sekali bahwa perjanjian internasional pertama yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik yang tengah berjuang diadakan dengan pemerintah negara yang, sejak fajar sejarah, rakyatnya telah mempunyai hubungan komersial, batin, dan budaya dengan rakyat Indonesia. Redaktur saya mengirim kawat dari Bombay: ". . . Tawaran Beras Anda prestasi luar biasa"

Pengakuan de facto India yang sebenarnya atas Republik sangat mempertinggi semangat juang bangsa Indonesia. Meskipun terdapat kekusutan-kekusutan dalam kebijaksanaan resmi Pemerintah Inggris, Markas Besar Militer Inggris di Jakarta telah berurusan dengan Pemerintah Republik yang dianggap sebagai penguasa de facto di Jawa dan Sumatra. Karena besarnya tekanan dari rekan-rekan Persemakmuran Australia dan India serta pendapat umum di negara mereka yang secara positif menghendaki penyelesaian damai ke arah kemerdekaan Indonesia, maka Pemerintah Inggris yang berkuasa pada kurun waktu itu lalu mengadakan serangkaian usaha untuk membujuk Belanda agar memulai lagi perundingan dengan Republik menyusul krisis baru yang

muncul akibat tafsiran yang berlainan atas Perjanjian Linggajati dan hasrat Belanda untuk memaksakan kehendaknya secara cepat memulai aksi militer.

BAB IX

SAKSI KEADAAN DARURAT

Dengan pengangkatan Nehru sebagai Wakil Presiden pemerintah sementara di New Delhi dan yang menangani urusan luar negeri, suatu fase baru diplomasi untuk mendukung Republik Indonesia muncul. Hubungannya yang luas dengan orang-orang di Inggris dan Eropa, dan yang kini diperkuat dengan hubungan resminya dengan Pemerintah Inggris, Nehru berhasil memanfaatkan alat-alat diplomatik untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia lebih jauh. Di ibu kota India terdapat sejumlah misi Amerika dan Belanda, lalu langkah-langkah diplomatik diambil untuk mempercepat penyerahan kekuasaan secara damai di Indonesia. Tindakan Inggris saat ini pantas dipuji karena mengizinkan adanya evolusi kebijaksanaan luar negeri bagi India yang baru oleh pemerintah sementara, bahkan sebelum kemerdekaan, kecuali kadang-kadang memasok informasi untuk menjaga keseimbangan dalam pendekatan.

Berhasilnya pelaksanaan perjanjian beras antara India dan Indonesia merupakan permulaan dari adanya misi diplomatik Indonesia di New Delhi. Walaupun India hanya memberi pengakuan de facto kepada Republik, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menyusul Perjanjian Linggajati, pada permulaan pembentukan misi diplomatik ini di ibu kota India, ia diberi bantuan seperlunya olehnya. Misi diplomatik ini ternyata

bisa mengembangkan sayapnya dengan jalan mengirinkan wakil-wakilnya ke berbagai ibu kota dunia lainnya yang terpilih dan ke Markas Besar PBB. Wakil Indonesia yang pertama, Dr. Sudarsono diperkenalkan kepada Nehru dan pejabat-pejabat India lainnya, yang terus membina hubungan dengannya.

Bertambah terkenalnya Republik di dunia internasional betul-betul menggelisahkan Belanda. Hubungan diplomatik antara Republik dan Persemakmuran Inggris meningkat sesudah adanya perjanjian beras dengan India. Indonesia ikut serta dalam Konferensi Hubungan Bangsa-Bangsa Asia di New Delhi pada musim panas tahun 1947. Dalam konferensi itu, Syahrir mendapat sambutan hangat dan dukungan besar dari banyak negara Asia. Utusan negara-negara Islam, termasuk Mesir, berdatangan mengunjungi Republik dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Sukarno di Yogyakarta. Karena terkesima melihat perkembangan ini dan merasa khawatir situasi akan terlepas dari tangan mereka, Belanda mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Republik. Menyadari hal ini, Pemerintah Republik bersikap sangat bersahabat dalam melaksanakan Perjanjian Linggajati dan memberi beberapa konsesi dalam menafsirkannya. Akan tetapi Belanda memilih perbedaan pendapat yang gawat mengenai kedaulatan Republik, dengan maksud untuk mengakhiri perundingan dan melanjutkannya dengan menggunakan kekerasan. Tujuan mereka adalah melemahkan kekuatan militer dan perekonomian Indonesia, sehingga moral rakyat yang mendukungnya merosot, dengan harapan akhirnya Pemerintah Republik akan turun derajat menjadi Partai Republik.

Pada bulan Mei 1947 Belanda bersikeras bahwa Perjanjian Linggajati memberi mereka hak untuk bersama-sama menjaga ketertiban wilayah Republik guna memadamkan apa yang mereka sebut pelanggaran hukum. Wajar bila Indonesia tidak dapat menyetujui

pendapat ini. Karena Markas Besar Inggris sebentar lagi akan ditarik, baik Inggris maupun Amerika Serikat yang muncul pada waktu ini ingin sekali melihat adanya penyelesaian yang akan memungkinkan Pemerintah Indonesia berfungsi dalam kerja sama dengan Belanda. Syahrir dan politisi Belanda beberapa kali mengadakan tukar pikiran sehubungan dengan susunan pemerintah sementara dan pihak Amerika tampaknya sudah merasa bahwa begitu pemerintah seperti itu didirikan, kepercayaan dan kerja sama yang muncul dalam situasi yang realistis akan dapat memecahkan masalah-masalah dengan lancar. Namun, ada rintangan berkenaan dengan gelar kepala pemerintah sementara. Belanda bersikeras agar yang menjadi kepala pemerintah itu wakil Ratu Belanda di Jakarta dan Syahrir secara pribadi, dapat menerima usul itu karena merasa dalam pelaksanaannya dapat diadakan persetujuan-persetujuan yang sehat untuk memungkinkan berfungsinya demokrasi seperti di India, yang pemerintah semmentaranya sudah berfungsi bersama Raja Muda Inggris yang mengetuai hanya sebagai formalitas saja. Ketika Syahrir menyampaikan usul ini ke KNIP (Parlemen Sementara), semua partai, kecuali partainya sendiri, menentang keras. Oleh sebab itu, Syahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tanggal 27 Juni 1947. Sebelum Syahrir menemui KNIP, para diplomat Amerika telah siap menjamin berfungsinya pemerintah sementara yang berdasar demokrasi. Komunikasi Amerika datang terlambat untuk bisa membantu Syahrir secara efektif. Pada saat yang genting ini, terjadi kesalahan dengan diplomasi Amerika Serikat dan ini betul-betul merupakan titik balik. Satu kesempatan bagi tercapainya Indonesia merdeka dengan jalan evolusi yang damai hilang dengan konsekuensi kekalahan yang tak terperikan bagi pihak Belanda dan banyaknya jiwa dan harta benda yang hilang dan rusak bagi bangsa Indonesia. Karena jabatan saya di New Delhi pada waktu itu sebagai wartawan khusus, maka

saya hanya dapat membisikkan kekecewaan saya kepada diri sendiri mengapa rakyat Indonesia tidak menghargai kearifan Syahrir.

Sementara itu berbagai peristiwa bergerak dengan cepatnya di Indonesia. Belanda kelihatannya enggan melaksanakan Perjanjian Linggajati. Dalam Konferensi Hubungan Bangsa-Bangsa Asia di New Delhi pada bulan Maret 1947, yang bersidang dengan Nehru sebagai ketua tidak resmi, delegasi Indonesia yang dipimpin Sutan Syahrir menjadi pusat perhatian, dan perjuangan Indonesia mendapat dukungan besar dari wakil bangsa-bangsa yang hadir. Syahrir beserta rekan-rekannya bertemu dengan berbagai delegasi dan menerima banyak simpati dan dukungan. Masalah Indonesia kini menjadi fokus di panggung dunia.

Syahrir segera disusul Hatta pada bulan Agustus 1947. Wakil Presiden Hatta tiba di ibu kota India setelah secara diam-diam diterbangkan ke luar Yogyakarta dengan pesawat Dakota oleh seorang pilot sipil India yang pemberani, Biju Patnaik, yang beberapa tahun kemudian menjadi menteri di New Delhi. Karena alasan-alasan diplomatik kunjungan Hatta kepada kawan lamanya, Nehru, dirahasiakan untuk beberapa hari. Karena ketika itu saya berada di New Delhi, Nehru meminta saya untuk mengawal Hatta ke mana-mana. Hatta tekun berusaha untuk mendapatkan pengakuan *de jure* India, yang dapat diikuti oleh beberapa negara Islam.

Pada saat itu saya bekerja sebagai wartawan di ibu kota India dan mengawal Wakil Presiden Indonesia beserta rombongan kecilnya untuk menemui Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri India, yang menerima memorandum Hatta, yang berisi garis besar situasi di Indonesia dan permintaan pengakuan *de jure* Pemerintah India kepada Republik. Rupa-rupanya protokol mengharuskan warga negara atau organisasi India memperbincangkan persoalannya terlebih dahulu lalu memperkenalkan kelompok Indonesia yang 'memberon-

tak' kepada Pemerintah India. Nehru-lah yang memberikan kehormatan ini kepada saya. Menyusul kunjungan Hatta, dicapailah kata sepakat bahwa India akan memberikan setiap bantuan kepada Republik Indonesia, sedangkan permintaan akan pengakuan penuh terhadap Republik ditangguhkan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, hal itu tidak akan merintangai bantuan yang dijanjikan. Rupa-rupanya Nehru pada waktu itu telah tahu, bahwa walaupun Republik Indonesia telah memenuhi norma-norma umum untuk menerima pengakuan *de jure*, setiap tindakan yang tergesa-gesa ke arah ini akan merugikan kesempatan penyerahan kekuasaan secara damai melalui usaha-usaha diplomasi dan menggunakan perlengkapan PBB yang berpengalaman dan terlatih beserta Dewan Keamanannya. Saat itu cukup jelas, meskipun Republik dapat terus mengadakan perlawanan bersenjata atau lainnya terhadap Belanda, RI tidak akan berada pada posisi yang kuat untuk menciptakan pemecahan yang menentukan demi kepentingannya. Dr. Hatta memberi kesan bahwa beliau menghargai sepenuhnya alasan-alasan yang mendasari pemikiran India dan benar-benar puas dengan hasil kunjungannya. Rupanya, di Yogyakarta yang terkucil, permainan berbagai kekuatan dunia pada saat itu dan kemampuan cara-cara diplomatik belum begitu terasa seperti di New Delhi. Syahrir, yang bersama saya sempat membicarakan perkembangan yang terjadi setelah itu, bersyukur karena pandangannya telah didukung lagi. Satu-satunya kekecewaan saya dalam 'meliput' Revolusi Indonesia sebagai wartawan adalah saya tidak berhasil mengadakan wawancara pers yang ekstensif mengenai hal itu dengan Mahatma Gandhi. Itulah saat berlangsungnya Agresi Belanda yang pertama. Walaupun Gandhi biasanya menyatakan bersimpati pada perjuangan di Indonesia dan menerima Hatta dan Syahrir, beberapa pertemuan saya dengannya tidak menghasilkan tulisan apa pun. Akhirnya Gandhi setuju untuk menja-

wab pertanyaan apa pun yang saya tulis. Akan tetapi, ketika serangkaian pertanyaan itu diberikan kepadanya, tokoh anti-kekejaman ini tidak menjawab. Sebaliknya saya menerima sehelai kartu pos dengan tulisan tangannya sendiri, "Maafkanlah saya karena saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan." Sikapnya itu menjadi jelas bagi saya ketika, beberapa hari kemudian, Nehru mengacu pada pertanyaan-pertanyaan saya sambil tersenyum. Jelas sudah, Mahatma Gandhi tidak ingin menginjak-injak bidang yang sudah lama sekali beliau akui sebagai hak istimewa Nehru, yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri di samping Perdana Menteri di New Delhi. Sejauh yang saya ketahui, sikap tulus seperti ini jarang sekali dimiliki para politisi.

Genderang perang Belanda kini mulai bertalu. Pada bulan Mei 1947 mereka mengeluarkan ultimatum yang menuduh Republik memperkosa Perjanjian Linggajati. Meskipun Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat mengimbau agar jangan diteruskan, tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap Republik. Dalam waktu singkat mereka menduduki semua daerah di Jawa, Sumatra, dan Madura yang memiliki arti ekonomis penting, meninggalkan bagi Republik daerah-daerah yang berjauhan di Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, dan pelabuhan-pelabuhan di Sumatra. Tindakan Belanda ini melanggar Perjanjian Linggajati Pasal XVIII, yang berbicara tentang perwasitan jika timbul perselisihan dalam penafsiran. Sebelumnya, Belanda telah menolak permintaan Indonesia untuk mengajukan kertas-kertas yang ada hubungannya dengan ketentuan ini. India dan Australia membawa masalah Agresi Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB, yang pada tanggal 1 Agustus menyerukan kedua belah pihak agar mengadakan gencatan senjata dan menyelesaikan pertikaian mereka secara damai. Namun, seruan Dewan Keamanan PBB ini tidak memin-

ta penarikan pasukan Belanda dari wilayah Republik. Agaknya Belanda bertujuan dan mengharapkan agar Republik kehabisan pangan sehingga keropos dari dalam. Di pihak lain, tentara Republik yang mengantisipasi gerakan Belanda telah menyebar ke segala jurusan, mengusik pasukan-pasukan Belanda, dan menimbulkan kesulitan bagi Belanda. Dengan resolusi lebih lanjut tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan membentuk Komisi Jasa-jasa Baik yang terdiri atas wakil dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan pertikaian. Pembentukan komisi ini merupakan langkah yang berarti, dan kebijaksanaan Amerika setelah itu terang-terangan ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada antara Indonesia, yang memerlukan bantuan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi mangsa ambisi komunisme internasional, dan Belanda, yang karena merupakan faktor penting dalam usaha merehabilitasi bangsa-bangsa Eropa Barat, juga harus dibantu guna melindungi kepentingan ekonominya yang vital di Indonesia.

Melalui agresi tanggal 21 Juli, Belanda menduduki sumur-sumur minyak yang amat penting, yaitu Palembang dan Medan di Sumatra termasuk perkebunan karetinya, di samping memperoleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hanya daerah-daerah Yogyakarta pusat, ujung barat Jawa, dan sebagian besar Sumatra tetap berada di tangan Republik. Karena Belanda kekurangan tentara untuk menjaga ketertiban di seluruh Indonesia, namun ingin sekali mempertahankan cengkeramannya terhadap Republik, maka strategi yang dipergunakan oleh pasukan Republik ialah tidak menghadapi kesatuan Belanda yang bersenjata lebih lengkap itu secara frontal, melainkan merembes ke daerah yang diduduki Belanda dalam kelompok-kelompok kecil, mengusik mereka, dan membuat pemerintahan tidak berjalan. Syahrir berhasil melarikan diri ke India, dan dari sana melanjutkan perjalanannya ke New York guna menyampaikan kasus

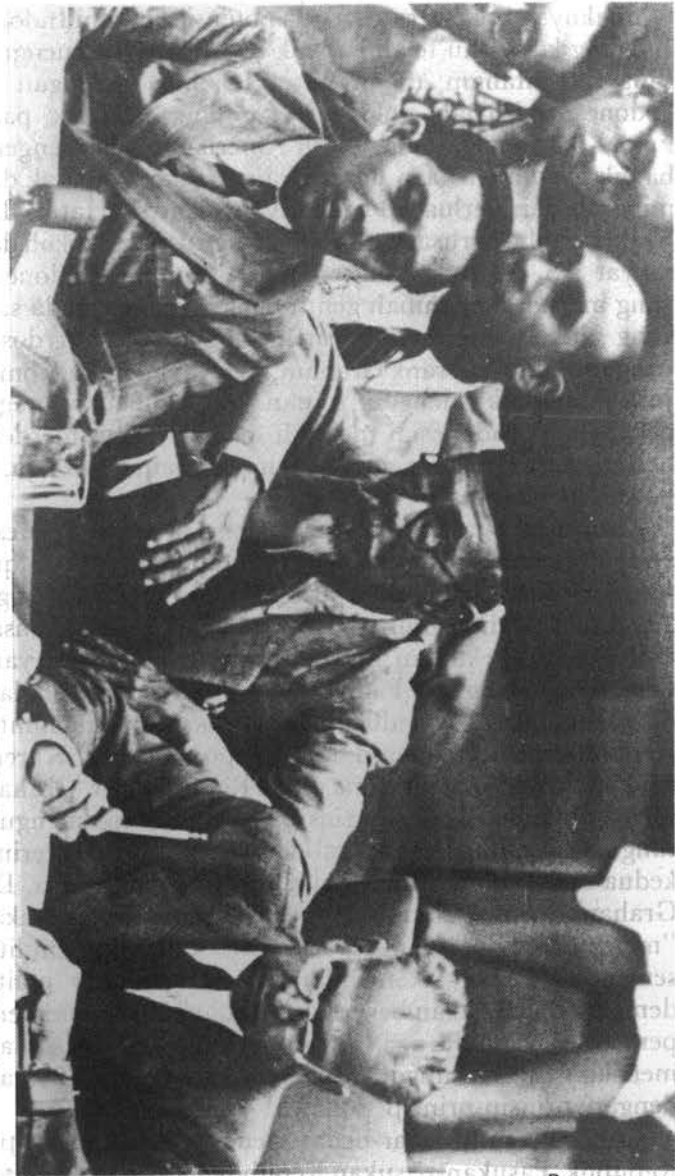
'negaranya kepada Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947, yang setelah mendapat laporan mengenai duduk perkaranya dari tangan pertama, menunjuk Komisi Jasa-jasa Baik di atas.

Meskipun saya telah kembali ke New Delhi untuk meliput perkembangan-perkembangan di ibu kota bagi surat kabar saya, ternyata tak lama kemudian saya lebih tertarik pada Indonesia dan menerima pekerjaan sebagai wartawan untuk kantor berita Indonesia *Antara*. Namun, begitu Pemerintah India memutuskan untuk membuka misi di Jakarta dan memilih seorang wakil sebagai Konsul Jenderal, pada bulan Oktober 1947 saya oleh Nehru diminta untuk menemaninya sebagai Atase Persnya. Penunjukan ini melemparkan saya ke dalam putaran angin diplomatik Jakarta, di samping melanjutkan hubungan saya dengan teman-teman saya di Republik Indonesia. Peran baru ini memberi saya kesempatan untuk mendengarkan dan menilai pendapat resmi Belanda, di samping mengikuti pandangan-pandangan Belgia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tugas perdamaian PBB dalam usaha memecahkan masalah antara Indonesia dan Belanda sangat menarik saya karena ia merupakan bagian terpenting tempat menaruh kepercayaan yang sebesar-besarnya dalam politik India saat itu.

Meskipun PBB berusaha sekuat-kuatnya dan Pemerintah Amerika Serikat tekun berusaha, beberapa aspek sifat manusia yang tak berbelas kasihan menang di lingkungan penguasa Belanda. Kemunduran serius terjadi dan Belanda menempuh jalan Agresi Kedua. Saya benar-benar bingung melihat negara besar seperti Amerika Serikat tidak dapat memaksakan kehendaknya pada peristiwa-peristiwa di Indonesia.

Dengan dibentuknya Komisi Jasa-jasa Baik, inisiatif dan perhatian AS kepada masalah Indonesia menjadi lebih besar. Lepas dari kepentingan strategis global, AS

Syahrir dalam rapat Dewan Keamanan PBB mengugah perhatian dunia akan kelicikan Belanda.



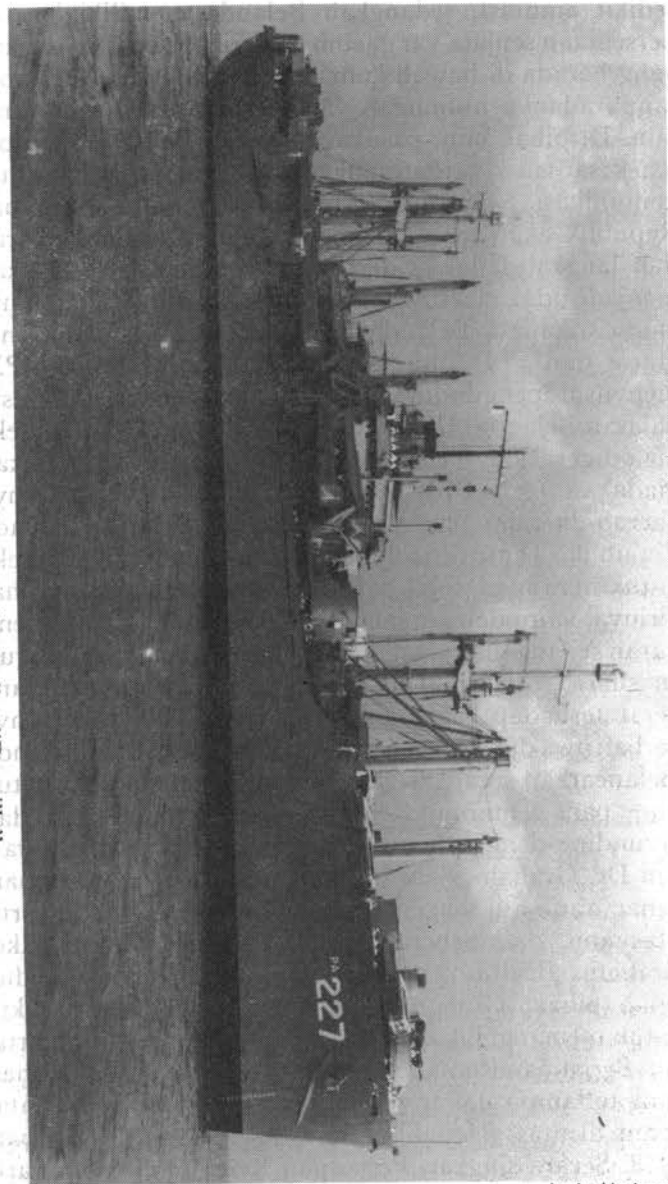
Repro Tempo

tampaknya sangat tertarik pada potensi ekonomi Indonesia yang kaya dan telah banyak investasi yang menguntungkan ditanam di Sumatra. Semua golongan di Indonesia, kecuali golongan komunis, tertarik pada modal dan tenaga-tenaga ahli Amerika untuk mengembangkan sumber daya negerinya yang kaya minyak dan mineral, dan perluasan keduanya. Sukarno, Hatta, dan Syahrir mulai berusaha merebut simpati tokoh-tokoh dan rakyat AS. Sikap tenang golongan komunis Indonesia yang militan menambah gentingnya keadaan. Pada saat yang sama, pemerintah AS mencalonkan seorang dosen yang ramah, Dr. Frank Graham, sebagai anggota Komisi Jasa-jasa Baik, dengan tujuan untuk menjaga agar perubahan Indonesia menjadi negeri yang merdeka berlangsung dengan penuh kedamaian dan, tentu saja, di bawah pengarahannya AS.

Komisi Jasa-jasa Baik tidak berhasil mencapai gencatan senjata dalam waktu singkat. Tetapi, garis status quo sesuai dengan kedudukan masing-masing pada tanggal 29 Agustus dipertimbangkan sebagai garis pemisah antara kedua kekuatan. Suasana diliputi kedamaian yang tidak menyenangkan. Pada bulan Desember 1947, Belanda mengajukan usul dua belas prinsip dan menuntut Republik menerimanya dalam tempo tiga hari. Karena usul ini tidak dapat diterima pihak Republik, Dr. Graham menggabungkan enam prinsip lainnya yang menguntungkan Republik dan membuat peleburan ini diterima kedua belah pihak. Dalam memujikan rumusannya, Dr. Graham mengatakan bahwa prinsip-prinsip itu akan "mengalihkan perjuangan dari garis demarkasi militer sementara, yang akan hilang, menuju garis politik demokrasi yang akan bertahan." Dalam usahanya mempengaruhi Republik agar menerima usul itu, Dr. Graham menekankan hubungan Perjanjian Gencatan Senjata dengan prinsip-prinsip politik.

Situasi saat itu benar-benar menekan para pemimpin Republik. Pasukan-pasukan Republik hanya mempunyai

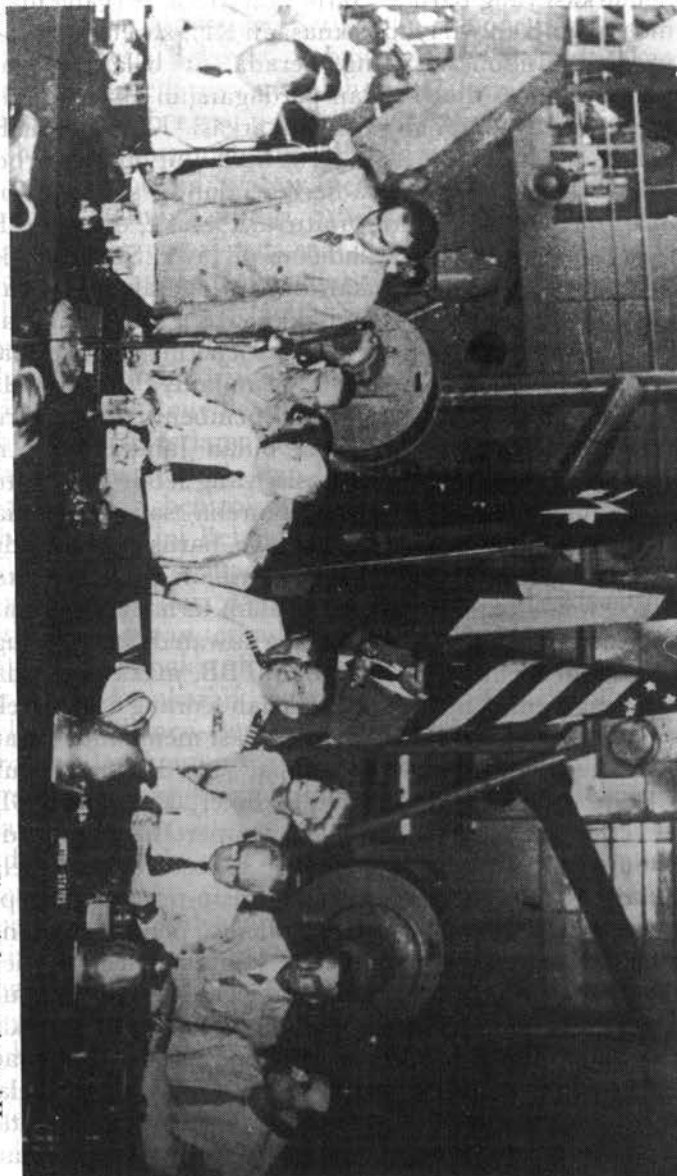
Saksi sejarah: kapal api Amerika Serikat "Renville".



Arsip Nasional

sedikit amunisi, sedangkan Belanda memiliki banyak persediaan senjata yang lebih canggih. Pasukan-pasukan yang berada di bawah komando Republik juga tersebar tanpa adanya hubungan yang terorganisasi satu sama lain. Di pihak lain, pasukan-pasukan Belanda merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai fasilitas-fasilitas komunikasi. Sekiranya permusuhan dimulai lagi, pihak Republik akan menderita kekalahan yang lebih parah dan langkah-langkah di Dewan Keamanan PBB akan menjadi tidak efektif oleh veto Prancis untuk membantu kaum kolonialis Belanda. Dalam keadaan ini, Sukarno-Hatta dan PM Amir Syarifuddin (yang menjadi PM menyusul pengunduran diri Syahrir) menerima usul balasan Belanda. Dalam mengambil langkah ini mereka juga digerakkan oleh harapan bahwa plebisit yang akan diadakan oleh PBB akan menyebabkan kembalinya daerah-daerah luas yang dikuasai Belanda kepada Republik. Tentu saja Dr. Graham mendorong mereka untuk mau menerima pakatnya dengan cara yang khas dirinya, yaitu dengan jalan menekankan bahwa pertempuran sedang dialihkan "dari peluru ke kotak pemungutan suara". Sadar akan tanggung jawab mereka yang berat terhadap rakyat, dalam artian akan banyaknya korban jiwa dan kerusakan kekayaan seandainya Belanda melancarkan serangan lain – yang memang siap untuk itu – para pemimpin Republik memilih jalan damai dan berunding dengan jalan menerima paket yang ditawarkan Dr. Graham. Saat itu merupakan saat yang benar-benar traumatik bagi Republik. Dalam KNIP, Syahrir, Masyumi, dan beberapa seksi PNI menentang paket Graham. Begitu prinsip-prinsip itu disepakati kedua belah pihak, Graham tidak membuang-buang waktu untuk memanggil kapal AS, Renville, ke pantai Jakarta, dan Perjanjian Renville serta 12 dan 6 Prinsip Tambahan yang terlampir dalam perjanjian itu pun lalu ditandatangani di atas geladak kapal, pada tanggal 17 Januari 1948. Secara singkat, Perjanjian Renville memuat garis

Suasana perundingan di kapal "Renville", 8 Desember 1947. Perjanjian ini pun disusuli dengan Agresi II.



demarkasi yang baru – Garis Van Mook – (yang makin menyempitkan wilayah kekuasaan RI), karena pasukan-pasukan Indonesia yang berada di belakang garis Belanda harus ditarik, dan perdagangan akan diperbolehkan menyeberangi garis demarkasi. Kedaulatan Belanda atas Indonesia akan terus berlanjut hingga terbentuknya Negara Indonesia Serikat, dan di situ Republik akan menjadi salah satu unitnya. Plebisit, dengan PBB sebagai penyelia, akan diadakan di Jawa, Sumatra, dan Madura untuk menentukan daerah-daerah mana yang ingin menjadi bagian Republik. Saat itu nyata bagi saya bahwa syarat-syarat Renville jelas-jelas merupakan suatu kemunduran bagi Republik. Seandainya enam bulan yang lalu mereka menerima usul pembentukan pemerintah sementara Belanda, pada bulan Januari 1948 ini mereka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk berunding dengan Belanda. Karena saya kemudian menjadi diplomat di Jakarta, saya harus berdiam diri dengan bijaksana, namun secara pribadi ikut merasakan kekecewaan Syahrir yang mendalam terhadap perubahan keadaan itu. Karena beberapa kawan dekat saya juga bekerja di Komisi Jasa-jasa Baik PBB, maka saya tidak ragu-ragu untuk memberi tahu salah seorang dari mereka bahwa Komisinya melakukan operasi membantu Belanda. Tetapi ia menangkis pendapat saya dengan menunjukkan batas-batas yang dapat dikerjakan oleh PBB.

Perjanjian Renville berhasil mempertahankan perdamaian – meskipun tidak mudah – selama hampir sebelas bulan. Republik menganggap prinsip-prinsip bagi penyelesaian politik yang dilampirkan itu penting. Sedangkan Belanda selain mendirikan sejumlah negara klien, mengambil langkah-langkah sepihak ke arah pembentukan Negara Indonesia Serikat tanpa mengikutsertakan Republik dalam pembicaraan. Republik akan menjadi suatu komponen Negara Indonesia Serikat. Setelah selang waktu yang ditentukan, di mana kedaulatan Belanda akan berlanjut namun pemerintah sementara

akan berfungsi, kedaulatan Belanda akan diserahkan kepada Negara Indonesia Serikat. Juga Konstituante dan Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda akan dibentuk. Sebenarnya masalah-masalah ini sudah muncul dalam beberapa pembicaraan sebelumnya antara Syahrir dan utusan khusus Belanda yang diberi kekuasaan penuh sebelum Syahrir mengundurkan diri. Sejarah memiliki jalannya sendiri. Seandainya akal sehat dapat mengalahkan emosi pada saat itu, Republik akan berada pada posisi yang lebih kuat dan tidak harus menyerahkan wilayahnya kepada Belanda. Namun hal ini tidak terjadi. Bagi Belanda, tindakan agresinya hanya memperlambat rehabilitasi industri-industri mereka di Indonesia.

Perjanjian Renville menghasilkan periode gencatan senjata yang terlama selama berlangsungnya konflik antara pihak Belanda dan Indonesia, lepas dari terjadinya sejumlah bentrokan kecil patroli. Tetapi, selama sebelas bulan ini Belanda terus memperbesar kekuatan militer mereka. Propaganda Belanda berusaha melemahkan Republik dari dalam. Di dalam Republik sendiri, ketidakpercayaan terhadap pemakaian jalan perundingan terus meningkat. Rakyat semakin tidak puas dengan kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh blokade Belanda. Elemen-elemen petualang, seperti kelompok Trotsky dan komunis, mengerahkan kekuatan dan merencanakan untuk menantang kepemimpinan Sukarno-Hatta. Melihat situasi yang menguntungkan ini dan sadar akan kekuatan militer mereka sendiri, Belanda memperlihatkan sikap enggan merundingkan 'modus operandi' kemerdekaan, seperti yang digariskan dalam Prinsip-prinsip Politik Renville. Situasi saat itu benar-benar mematahkan semangat Republik. Pemimpin golongan Trotsky, Tan Malaka, menyerukan agar penduduk menolak kepemimpinan Sukarno-Hatta yang, menurut Tan Malaka, terlalu banyak menggantungkan diri pada negara-negara Barat dan perundingan dengan Belanda yang tidak membawa hasil apa pun. Menurut

Tan Malaka kemerdekaan hanya dapat diraih dengan kegiatan revolusioner. Saat yang kritis, sedangkan kontrol dan pengarahannya revolusi Indonesia dari pemerintah pusat melemah. Suatu fase yang traumatik, terutama bagi Sukarno. Propaganda Belanda di Amerika Serikat melukiskan Republik seolah-olah ia 'berada di bawah kendali komunis' dan karena tidak ingin kehilangan simpati rakyat AS, Pemerintah Republik berusaha membersihkan badan-badan pentingnya dan mengeluarkan orang-orang komunis beserta para simpatisannya dari badan-badan pemerintahan.

Pada saat perundingan-perundingan terhenti sama sekali, para anggota Komisi Jasa-jasa Baik dari AS dan Australia berusaha untuk memecahkan kemacetan dengan jalan mengajukan usul kompromi baru pada tanggal 10 Juni 1948. Republik menerima usul ini, sedangkan Belanda menolaknya.

Beberapa bulan yang amat mengecewakan merayap tanpa melunaknya sikap keras kepala Belanda. Wakil AS yang baru dalam Komisi Jasa-jasa Baik, Merle Cochran (yang akan memainkan peranan yang menonjol dalam perundingan-perundingan akhir yang akan memberikan kemerdekaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi kepada Indonesia), menyampaikan rancangan baru berupa naskah perjanjian bagi penyelesaian politik secara menyeluruh pada tanggal 10 September 1948. Rancangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah diterima, sebagaimana terlampir pada Perjanjian Renville. Walaupun pada umumnya rancangan ini sesuai dengan rencana du Bois-Critchley sebelumnya, ada beberapa segi baru yang membuatnya dapat diterima oleh pihak Belanda yang enggan menerima. Tetapi, begitu pembicaraan dilanjutkan, Belanda mulai menyarankan serangkaian perubahan dengan maksud memperlambat jalannya perundingan dan dengan harapan waktu dan kesulitan yang berkelanjutan akan makin melemahkan Republik. Belanda menuntut agar tekanan prioritas diberikan pada

gencatan senjata. Republik menyarankan agar perundingan-perundingan terus dilanjutkan berdam-ping dengan perundingan-perundingan Komisi mengenai kata atau terhadap persetujuan gencatan senjata. Republik menciptakan berbagai masalah bagi Belanda di daerah-daerah yang telah mereka duduki melalui patroli gerilya yang mengganggu lintasan komunikasi. Perdagangan di daerah negara boneka bentukan Belanda macet total karena adanya pemboikotan yang diorganisasi oleh para pendukung Republik.

Kemelaratan dan perundingan-perundingan yang memakan banyak waktu yang tidak memberikan harapan, yang tidak menambah kokohnya kemerdekaan, menambah jumlah masalah yang harus dihadapi Republik dan ketidakpuasan rakyat memuncak. Kini Republik menghadapi tantangan terhadap kekuasaannya dari PKI, yang melancarkan pemberontakan pada pertengahan bulan September 1948. Dengan cepat PKI merebut Madiun dan memproklamasikan 'negara Soviet' di sana. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang komunis Indonesia yang bernama Muso, yang baru saja pulang dari luar negeri dan belum lama tinggal di Indonesia. Atas permintaan Komunis Internasional, Muso memecat Alimin, pemimpin lama dan populer, dari kepemimpinan partai. Pemecatan ini merupakan usaha petualangan yang sebagian besar dipimpin oleh orang-orang komunis yang baru kembali ke tanah airnya setelah lama tinggal di Negeri Belanda dan Moskow, dan karena itu merupakan bagian dari pandangan Komunisme Internasional. Meskipun mereka mungkin berpendapat bahwa kondisi sudah matang untuk mengadakan revolusi sosial model komunis, namun mereka rupanya telah keliru menilai suasana hati penduduk, kesetiaan tentara RI, dan pengaruh karismatik Sukarno terhadap rakyatnya. Hatta, yang mengambil alih kedudukan Perdana Menteri pada awal tahun 1948 dari Amir Syarifuddin yang terlalu bersandar pada kaum komunis, mengumumkan berlaku-

nya keadaan perang dan memerintahkan untuk memadamkan pemberontakan secara tuntas. Bala tentara Republik memerlukan waktu hampir enam minggu untuk menumpas habis pemberontakan komunis. Banyak orang kecewa karena bekas Menteri Pertahanan, yang ketika menduduki jabatan ini berjuang untuk membentuk tentara Republik yang terpadu, Amir Syarifuddin, bergabung dengan kaum komunis. Seperti Muso, Amir Syarifuddin pun dieksekusi tentara Republik pada akhir pemberontakan. Aneh, seorang pemimpin dan orator yang populer – pemeluk agama Kristen di negara yang mayoritas beragama Islam – dan seorang pengelola yang cakap, yang mengabdikan kepada Republik berturut-turut sebagai Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri, serta rekan dan sahabat Syahrir yang simpatik dan penuh pengertian dalam pergerakan sosialis, secara berangsur-angsur harus hanyut ke arah Komunisme Internasional. Pengakuannya sebelum ajal menyongsong bahwa dia itu selamanya seorang komunis, dan sebelumnya ia hanya menyamar, menambah dalamnya kekecewaan kawan-kawan dan pengagumnya, antara lain saya sendiri. Amirlah yang dibiayai Belanda untuk mengorganisasi gerakan bawah tanah melawan Jepang. Dalam menekan golongan komunis, Pemerintah Republik dibantu oleh Masyumi, PNI, dan Partai Sosialis Syahrir. Pimpinan Republik biasanya akan berpikir dua kali dulu sebelum meniadakan kelompok pendukung yang paling efektif di antara kekuatan-kekuatan revolusioner yang melawan kembalinya kolonialisme Belanda dan itu terjadi pada fase kritis dalam kehidupan Republik. Tetapi karena tantangan itu justru ditujukan pada keberadaan Republik, Sukarno dan Hatta tidak mempunyai pilihan lain kecuali menindasnya dengan semua pasukan yang ada di bawah perintahnya. Tawaran bantuan Belanda untuk menindas pemberontakan komunis dengan sendirinya ditolak oleh Republik. Pemerintah-pemerintah yang bersahabat, seperti India

menghargai ketegasan dan kemampuan Republik dalam menangani pemberontakan itu. Pemerintah dan pendapat umum AS memberikan reaksi yang menyenangkan hasilnya dan kemauan baik AS yang semakin bertambah setelah itu sangat menguntungkan Republik.

Menyusul penumpasan pemberontakan komunis dan karena bertambahnya tekanan AS kepada Belanda, Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Stikker, tiba di Jakarta pada tanggal 1 November 1948 untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Hatta. Pihak Republik tidak merasa optimistis akan hasil pembicaraan itu karena pemilu tahun 1948 di Negeri Belanda menghasilkan berkuasanya partai kolonial yang konservatif. Akibatnya, tuntutan akan 'penyelesaian yang cepat' berkenaan dengan masalah Indonesia di Negeri Belanda meningkat, dan tak pelak lagi sejalan dengan pandangan kelompok mayoritas yang menghendaki penghapusan Republik melalui kekerasan. Bagi saya dan pengamat lain, tampaknya nasib misi Stikker sudah ditentukan sebelum dimulai. Bagaimanapun juga, Stikker sendiri dianggap seorang liberal yang simpatik oleh pimpinan Republik. Pembicaraan langsung ini gagal mencapai kata sepakat mengenai kekuasaan istimewa Perwakilan Tinggi Belanda selama masa pemerintah federal sementara. Belanda bersikeras menghendaki agar Perwakilan Tinggi diberi kekuasaan untuk menggunakan pasukan Belanda atas wewenangnya sendiri di daerah-daerah yang dianggapnya kacau. Di pihak lain, Republik tetap pada pendiriannya bahwa gangguan dalam negeri harus ditangani oleh tentara Pemerintah Federal Indonesia, namun pemerintah tersebut dapat meminta bantuan pasukan Belanda jika dipandang perlu. Mereka siap pula menganggap Pemerintah Belanda berdaulat di seluruh Indonesia selama masa pemerintah sementara. Dan ini merupakan konsesi yang amat besar. Mengizinkan Perwakilan Tinggi menggunakan pasukan Belanda atas wewenangnya sendiri akan berarti Republik harus menganggap

revolusi sebagai tidak pernah ada, dan mengorbankan wewenang serta kekuasaannya yang telah dibangunnya dengan pengorbanan besar. Lebih lanjut, Angkatan Bersenjata Indonesia, yang juga merupakan kekuatan politik yang harus diperhitungkan tidak akan pernah menyetujui penggunaan pasukan Belanda dalam wilayah Republik.

Tujuan Belanda untuk melemahkan Republik dan mengurangi peranannya di Indonesia yang akan datang sekali lagi diperkuat, ketika tanggal 11 Desember 1948 Belanda memberi tahu Komisi Jasa-jasa Baik PBB bahwa tidak mungkin dicapai kata sepakat dengan pemimpin-pemimpin Republik dan tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan perundingan dengan bantuan Komisi. Mereka juga mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk meneruskan pembentukan pemerintah federal sementara, namun tanpa Republik. Kelak, akan disediakan tempat dalam pemerintah federal itu bagi Republik.

Republik melancarkan gerakan balasan tanggal 13 Desember. Komisi diminta untuk meneruskan kepada Belanda bahwa Republik mengakui kedaulatan Belanda selama masa pemerintahan sementara, tetapi menginginkan agar Belanda mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada dirinya sendiri selama menjalankan wewenangnya pada masa itu. Pesan yang berasal dari PM Hatta berbunyi, "Kami siap sepenuhnya untuk mengakui bahwa Perwakilan Tinggi (Belanda) mempunyai hak veto terhadap tindakan-tindakan berbagai alat pemerintah federal sementara. Kami hanya meminta agar standar yang pasti dinyatakan, atau diberikan rumusan yang tepat tentang kategori tindakan yang pasti agar Perwakilan Tinggi mempunyai pegangan dalam menjalankan kekuasaan vetonya. . . Kami siap mengakui lebih lanjut bahwa Perwakilan Tinggi diberi kekuasaan darurat untuk bertindak dalam keadaan perang, keadaan terkeping, atau keadaan tidak aman. Sebagai bagian dari

seluruh perjanjian, kami siap menetapkan bahwa Perwakilan Tinggi sendiri menjadi penilai terakhir kebutuhan untuk menjalankan kekuasaan luar biasa dalam keadaan-keadaan ini. Sekali lagi, kami hanya meminta agar standar yang pasti ditetapkan untuk mengarahkan keputusan-keputusan Perwakilan Tinggi." Surat Hatta sangat menawarkan perdamaian dan menyediakan kesempatan bagi persetujuan segera melalui perundingan, namun Belanda tidak mengambil manfaat dari penawaran ini. Sebaliknya, mereka memberi kesan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengadakan serangkaian tindakan, yaitu secara sepihak mendirikan pemerintahan federal sementara tanpa Republik. Pada masa ini, Hatta yang dalam periode ini telah berhubungan dengan Nehru, sudah mempelajari sepenuhnya cara pemerintahan sementara India berfungsi di New Delhi, kekuasaan Raja Muda Inggris, dan pengertian tentang ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kekuasaan itu. Dalam konferensi pers tahun 1946 di Jakarta, Kuasa Penuh Belanda Van Mook, mengatakan pada saya bahwa sama sekali tidak ada persamaan antara perkembangan politik di India dan Indonesia!

Sayang sekali, sekali lagi kesempatan untuk berdamai disia-siakan Belanda. Mereka gagal mengambil perspektif yang luas dari peristiwa-peristiwa itu dan tidak menanggapi keadaan jiwa Republik. Di pihak lain, mereka menganut pandangan bahwa Republik dapat dipaksa untuk tunduk melalui aksi militer yang cepat, mengingat saat itu Republik sedang dikelilingi oleh masalah-masalah dalam negeri yang serius, baik masalah politik maupun ekonomi. Para pengamat melihat dengan jelas bahwa Belanda mengabaikan Komisi Jasa-jasa Baik PBB, kecuali bila kepentingannya memerlukan bantuannya.

Kemudian, datang lagi ultimatum Belanda. Saat itu tanggal 17 Desember 1948. Kali ini ultimatum dialamatkan kepada Komisi Jasa-jasa Baik PBB, yang diminta



Repro Tempo

Meskipun kedua pemimpin bangsa, Sukarno dan Hatta, sudah ditawan Belanda, semangat juang rakyat terus berkobar.

supaya mendapatkan persetujuan Republik terhadap tuntutan-tuntutan Belanda mengenai kekuasaan Perwakilan Tinggi Belanda dan menyerahkan kendali atas segenap kekuatan bersenjata selama masa pemerintahan sementara kepadanya. Wakil AS dalam komisi itu, Merle Cochran, memberikan jawaban tepat dengan mencela apa yang bagi dia tampak sebagai ultimatum dan menyatakan bahwa Republik tidak dapat diharapkan akan setuju tanpa perundingan lebih lanjut untuk membicarakan tuntutan yang telah mereka tolak. Cochran meminta agar Belanda melanjutkan perundingan. Drama ini semakin memuncak ketika keesokan harinya, tanggal 18 Desember pukul 23.30, Cochran sebagai ketua Komisi yang baru menerima komunikasi lebih lanjut dari pejabat-pejabat Belanda, yang memberitahukan bahwa Pemerintah Belanda tidak akan lagi mematuhi Perjanjian Gencatan Senjata Renville, karena Republik telah gagal mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata! Tanpa menunggu tanggapan badan yang dipercaya oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian, tepat tengah malam, yaitu setengah jam setelah membuat surat kepada Cochran — pasukan-pasukan Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran dari darat, laut, dan udara terhadap pasukan pertahanan Republik yang senjatanya tidak lengkap.

Para pemimpin Republik tampaknya terkejut juga oleh waktu yang diambil Belanda untuk serangan militernya walaupun mereka telah menduganya. Karena mempercayai hingga batas tertentu prognosis Cochran, bahwa Belanda mungkin tidak akan menempuh jalan kekerasan dan mengharapkan AS — bagaimanapun juga — akan membantu mencegahnya, Sukarno-Hatta mengira serangan militer itu hanya akan terjadi setelah pemerintahan sementara didirikan secara sepihak Belanda akan mengajukan dalih pemerintah sementara meminta mereka untuk mengambil tindakan terhadap Republik, karena diduga keras telah melakukan pelanggaran perba-

atasan. Pada saat itu, tampaknya orang-orang Republik tidak kenal Belanda. Mereka mengira Belanda lebih suka menciptakan perang saudara antara negara-negara boneka melawan Republik daripada menentang PBB. Rencana keberangkatan Presiden Sukarno ke India untuk kunjungan muhibah atas undangan PM Nehru pada tanggal 19 Desember, membingungkan Belanda sekaligus mempercepat agresi Belanda yang kedua. Belanda tidak memberi izin kepada pesawat India yang telah tiba di Singapura untuk menjemput Sukarno. Beberapa fakta diabadikan dalam catatan-catatan resmi India yang hingga sekarang masih dirahasiakan, tetapi beberapa orang Indonesia yang berpengaruh selalu merasa ada kesalahan entah di mana. Belanda menangkap Sukarno, Hatta, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim di Yogyakarta, dan Syahrir di Jakarta. Sementara mereka menawan Hatta dan Agus Salim di Pulau Bangka, yang kemudian juga merupakan tempat Syahrir dan Sukarno setelah sebelumnya ditahan di Berastagi, Sumatra, tentara Indonesia di bawah panglima tertingginya, Jenderal Sudirman, menyingkir ke bukit-bukit dan rimba seperti telah direncanakan sebelumnya, dengan maksud untuk mengusik Belanda melalui perang gerilya. Pasukan gerilya yang berjumlah kira-kira 145.000 orang ini telah dilatih Jepang khusus untuk tujuan ini.

Menyusul penangkapan pemimpin-pemimpin Pemerintah Republik, sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, di Bukit Tinggi Sumatra didirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang terus-menerus memberi instruksi melalui radio kepada rakyat yang mengadakan perlawanan pasif di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Sering kali komunikasi Belanda diputuskan, dan gerakan pasukan-pasukan Belanda menjadi terbatas akibat kegiatan-kegiatan gerilya Indonesia. Korban di pihak Belanda meningkat. Lebih penting lagi, di Negara Pasundan dan Indonesia Timur yang didukung Belanda pemerintahnya mengundurkan diri seba-

gai protes terhadap aksi militer Belanda.

Lama setelah peristiwa ini, suatu saat saya dan Syahrir merenungkan mengapa Presiden dan Wakil Presiden, Sukarno dan Hatta, tidak dibawa ke pegunungan bersama dengan tentara Indonesia, mengingat hal ini dapat memberikan perlawanan yang lebih besar terhadap pendudukan Belanda. Syahrir seakan menyiratkan, bahwa atas saran Pemerintah Indialah Presiden maupun Wakil Presiden menyerah kepada tentara Belanda pada tanggal 19 Desember. Karena saya pada waktu itu berada di Jakarta dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi antara perwakilan India di Yogyakarta dan New Delhi, saya tetap tidak mempunyai bukti mengenai apakah menyerahnya Sukarno-Hatta atas kemauan sendiri kepada Belanda itu karena adanya saran yang diakui sebagai datang dari New Delhi.

BAB X

INDIA MENGERAHKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Kunggulan Belanda yang kedua kalinya atas Republik dalam bidang militer hanyalah kemenangan yang terlalu banyak makan korban. Tujuan untuk melenyapkan Republik sebagai kekuatan pemersatu nasionalisme tidak tercapai ketika Pemerintah Darurat Republik, di bawah pimpinan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara, muncul di Bukit Tinggi, Sumatra, dan menganjurkan kepada rakyat untuk menjalankan perlawanan pasif terhadap pendudukan Belanda. Pemerintah dalam pengungsian – sesuai dengan rencana – memelihara hubungannya dengan dunia luar melalui perwakilan Indonesia di Singapura dan New Delhi.

Penggunaan kekuatan militer Belanda untuk kedua kalinya terhadap Republik ini menimbulkan reaksi internasional yang hebat dan celaan seluruh dunia.

Walaupun kecewa melihat sikap negara-negara Barat, kekecewaan bangsa Indonesia kepada AS lebih mendalam karena mereka banyak menyandarkan diri pada bantuan AS sejak saat Republik diproklamasikan, seperti dinyatakan dalam manifestonya. Tidak disangsikan lagi, para penyusun kebijakan AS berada dalam posisi yang tidak menyenangkan; antara keharusan peranan Belanda dalam NATO, kepentingan-kepentingan ekonomi jangka panjang AS, dan kematian kolonialisme yang tidak dapat dielakkan lagi. AS tampaknya telah gagal untuk memberi pimpinan yang tepat pada waktunya dan terombang-

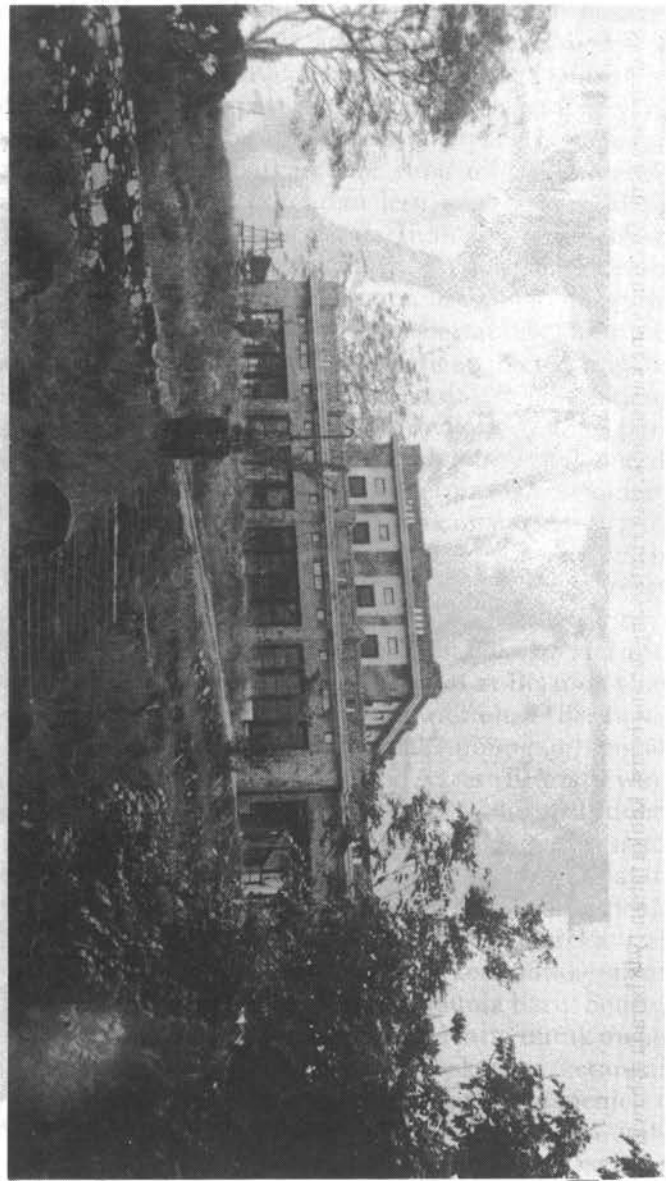
aming. Hal ini tak pelak lagi dengan tepat tercium oleh Komunisme Internasional dan, karenanya, timbullah pemberontakan PKI Madiun yang gagal dan tidak tepat waktu itu. Pihak Belanda pun sama, mengetahui bahwa AS sedang menghadapi dilema, lalu mengikuti keinginan hatinya berupa kedua petualangan militernya untuk melawan Republik, tapi ternyata tidak memecahkan masalah. AS mencoba mencari sesuatu yang kelihatannya seakan-akan seimbang yang memberikan keleluasaan kepada bangsa-bangsa lain untuk menjalankan pilihan mereka, padahal sebenarnya AS dapat membuat pernyataan tegas bahwa ia setuju pada kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara damai dan dalam kerja sama dan persahabatan dengan Belanda. Langkah seperti ini akan membantu membentuk pendapat umum bersama Belanda 'yang keras kepala' – di antara mereka terdapat kelompok-kelompok berpengaruh yang bersimpati pada aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia – dan mengendalikan ambisi Komunisme Internasional. Selain itu, pihak Indonesia, baik bangsa maupun wilayahnya, dapat diselamatkan dari penderitaan besar. Kebijakan AS untuk menunggangi dua kuda pada saat yang bersamaan, mula-mula gagal total. Bersamaan dengan berjalannya waktu, AS menganggap bahwa memakai ekonomi sebagai alat untuk memaksa Belanda adalah penting untuk bisa maju ke arah tujuan. Tentu saja dipandang dari segi kepentingan AS, tekanan seperti itu dilakukan kepada Belanda 'yang keras kepala' yang, akibatnya, menjadi lebih lunak.

Kira-kira pada saat itulah saya, sekali lagi, ditarik ke dalam pusaran perkembangan, suatu peran yang tadinya saya harapkan telah berakhir begitu saya menjadi diplomat dan sudah terbiasa dengan pekerjaan anonim di belakang kebijaksanaan pemerintah serta jauh dari tatapan mata publik. Karena alasan yang hanya mereka sendiri yang tahu, pemerintah saya meminta saya melepaskan jabatan sebagai Atase Pers di Jakarta dan

berangkat ke Saigon untuk mengambil alih kedudukan Konsul Jenderal di sana. Perasaan saya betul-betul tak keruan. Saya dipindahkan ke tempat panas lainnya, mungkin sebuah kawasan perang yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun bertugas dalam ketentaraan dan mengalami sendiri peristiwa di Surabaya, saya benar-benar capai melihat kekejaman. Akan tetapi, ada kesempatan untuk menyaksikan pudarnya kekuatan kolonial lainnya. Penyakit wartawan dalam diri saya mendesak keinginan untuk membandingkan "catatan" mengenai Indonesia dan Indocina.

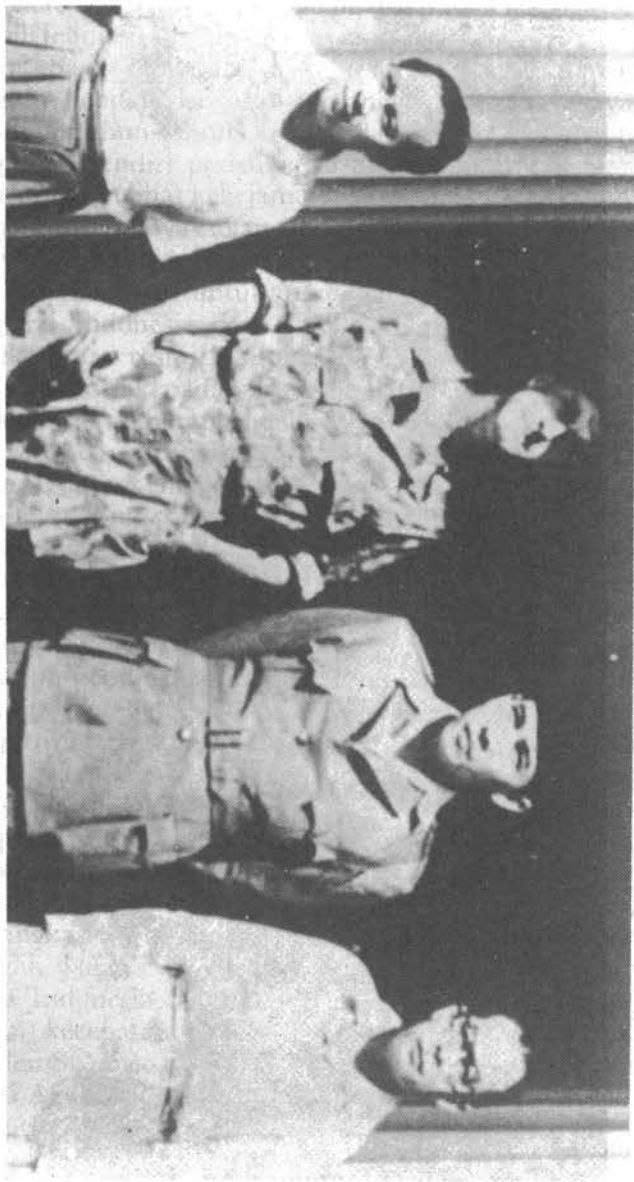
Baik secara resmi maupun secara tidak resmi, saya telah minta diri kepada para diplomat dan kawan-kawan di Jakarta serta mempelajari lagi bahasa Prancis tingkat dasar saya dengan bantuan beberapa kawan wanita. Di Bandar Udara Kemayoran saya naik pesawat KLM yang menuju ke Singapura. Seorang rekan dekat Syahrir, Subadio, yang juga seperti dirinya tidak pernah punya rasa dendam, menarik saya ke samping tangga, dan hanya dalam dua menit ia memberi tahu saya bahwa pesawat itu akan singgah di Pulau Bangka, tempat pemimpin-pemimpin Republik ditahan Belanda; seorang pemandu akan membawa saya menemui mereka, dan selanjutnya terserah kepada saya tindakan apa yang akan saya lakukan. Saya mengenal baik Badio dengan rasa humor dan olok-oloknya, sehingga saya tidak mau mempercayainya. Baru setelah dia menekan kedua telapak tangan saya, saya sadar akan kata teguran revolusi dan tahulah saya bahwa ia benar-benar serius. Di Bangka, begitu kami turun untuk singgah selama setengah jam, saya disapa oleh panglima Angkatan Udara Indonesia, Marsekal Udara Suryadarma, yang dengan kecepatan tinggi membawa saya ke tempat Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan Syahrir yang sudah berkumpul menantikan saya. Para pengawal Belanda yang berjaga di dekat rumah bahkan tidak menghentikan mobil untuk

Lagi, sebuah saksi sejarah: tempat pengasingan para pemimpin bangsa di daerah Bangka.



Repro Tempo

menggeledah saya. Rasanya seperti dalam film di layar putih atau mimpi yang adegan-adegannya bergerak cepat. Saya kehabisan akal dan Suryadarma pun tidak dapat menjelaskan apa arti semua ini. Di tempat yang saya kira akan berupa sebuah penjara yang bersuasana tegang, saya mendapatkan *villa* yang dihuni keluarga; bukan wajah-wajah serius dan lesu yang saya hadapi, melainkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tersenyum, mengobrol, dan bersenda gurau. Rupanya Belanda sekarang sudah tahu bagaimana harusnya mengurus tahanan terhormat mereka setelah bertahun-tahun melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengasingkan mereka ke Boven Digul agar merana dalam kamp-kamp penjara atau mati karena demam malaria. Selain para pejabat Belanda dan pemimpin Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Belanda, saya termasuk sekelompok kecil diplomat pertama yang diizinkan menemui para pemimpin Indonesia yang ditawan, dan itu pun bukan atas permintaan saya. Rupanya, saya pada waktu itu juga berperan sebagai seorang kawan Republik. Segera saya menyadari bahwa kunjungan saya ke Bangka ini merupakan bagian dari usaha sekelompok pejabat Belanda yang berpengaruh, yang percaya pada perlunya berdamai dengan Indonesia dan telah ada hubungan dengan Syahrir dan kelompok sosialisnya. Agresi Belanda yang kedua menimbulkan rasa tidak puas di seluruh Indonesia dan sejumlah besar orang Belanda menentang aksi itu. Saya selalu berhubungan dengan orang-orang Belanda yang berakal sehat di Jakarta, yang sadar akan penghargaan saya terhadap tradisi dan kultur mereka, dan akan keyakinan teguh saya bahwa kerajaan-kerajaan kolonial akan hancur dalam susunan dunia baru. Setelah berbincang-bincang, yang digunakan Hatta untuk menerangkan bagaimana Republik jatuh karena serangan Belanda yang tak diduga-duga pada saat itu, ia menjelaskan bahwa mereka tadinya merasa bahwa aksi militer Belanda akan dapat dihalang-halangi sampai



Repro Tempo

Syahrir yang liain, Sukarno yang karismatik, dan Hatta yang tenang berisi, ketika tahun 1948 berada di bawah pengawasan Belanda.

tercapai suasana yang lebih baik bagi Indonesia di Negeri Belanda melalui diplomasi AS dan Komisi Jasa-jasa Baik PBB. Di akhir pembicaraan Hatta menyusun sebuah memorandum yang disetujui oleh Sukarno dan Agus Salim. Surat ini ditandatangani oleh Sukarno-Hatta dan diberikan kepada saya sebagai cara pengiriman yang terbaik kepada Nehru. Syahrir agak acuh tak acuh, sehingga timbul kesan pada saya bahwa hubungan di antara Syahrir dan Sukarno telah merenggang. Selama masa penahanan singkat mereka di Berastagi, menurut apa yang saya dengar di Bangka, Syahrir telah mengeluarkan kata-kata yang sarkastis tentang kegemaran Sukarno untuk berlari-lari pada pagi hari selama dalam tahanan! Keanehan-keanehan perseorangan ini rupanya menambah bahan bakar pada perbedaan politik mereka kelak pada masa Indonesia merdeka dan menimbulkan banyak kerugian ketika adanya stabilitas di negeri itu pada fase yang genting merupakan hal yang penting.

Ketika saya kembali ke pesawat, ternyata kapal udara itu telah berhenti hampir satu jam untuk memungkinkan saya merampungkan misi di Bangka. Rupanya sekelompok orang yang ada dalam pemerintahan Belanda tertarik pada usaha-usaha perdamaian, dan ingin memanfaatkan pengaruh New Delhi terhadap Republik sebaik-baiknya. Tengah saya merenungkan bagaimana peristiwa-peristiwa itu menyusul saya di luar kemauan saya bagaikan taufan, getaran pesawat ketika akan mendarat di Singapura menyadarkan saya bahwa saya telah memainkan peranan historis pada saat genting bagi Republik. Misi akhir saya di Indonesia adalah membawa pesan para pemimpin Republik yang ditawan kepada PM India. Dalam surat itu, mereka memohon bantuan Nehru untuk menolong keadaan mereka yang amat memprihatinkan karena ketiadaan sumber daya militer, ekonomi, dan diplomatik guna melanjutkan perjuangan, dan menyatakan kepercayaan penuh mereka pada kemampuan serta kecakapan Nehru untuk menggerakkan opini

internasional guna mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bagi nama baik India dan rakyat India yang kekal-lah bahwa pemimpin mereka, Nehru, menanggapi masalah Indonesia ini dengan semangat besar dalam mencari bantuan-bantuan untuk Republik, dalam bentuk dukungan diplomatik, logistik, keuangan, dan materi. Dan semuanya diberikan dengan segera, tanpa ragu-ragu. Bagi Nehru, perjuangan Indonesia adalah perjuangan umum seluruh Asia untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Di tempat penyimpanan dokumen rahasia pemerintah India, tersimpan satu catatan pendek yang belum dipublikasikan, yang memuat seluruh jenis bantuan yang diberikan kepada Republik Indonesia. Sampai nanti disebarluaskan, kiranya sudah cukup kalau dinyatakan di sini, bahwa tak satu pun permintaan Republik pada saat kritis itu yang diabaikan oleh Nehru. Saat itu tidak pernah ada pemikiran untuk mengharapkan balasan dari Indonesia dalam benak Nehru, karena beliau memandang tindakan-tindakan India yang terbatas itu sesuai dengan keyakinannya bahwa kemerdekaan semua rakyat yang dijajah tidak dapat dibagi-bagi menurut negeri dan hanya tinggal menunggu tumbang-benteng-benteng kolonialisme satu per satu.

Episode Bangka mengacaukan rencana New Delhi bagi karier saya. Menyusul pokok berita besar-besar di Singapura mengenai kunjungan saya ke Bangka, yang sumbernya bukan dari saya tapi orang lain, saya mendapat kabar bahwa penugasan saya ke Saigon diubah atas permintaan Prancis. Dan anehnya, seorang pejabat Eropa dari Palang Merah Internasional, yang pernah lama menetap di Saigon, menemui saya sebentar di Singapura, pura-pura hendak menjelaskan secara ringkas keadaan di Saigon. Tapi teringat oleh saya, bahwa hal itu terjadi setelah penempatan saya diubah, dan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menilai saya untuk orang lain. Takdir mempunyai kekuatannya



Repro Tempo

Jawaharlal Nehru. Ia berperan aktif untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi negara muda, Republik Indonesia.

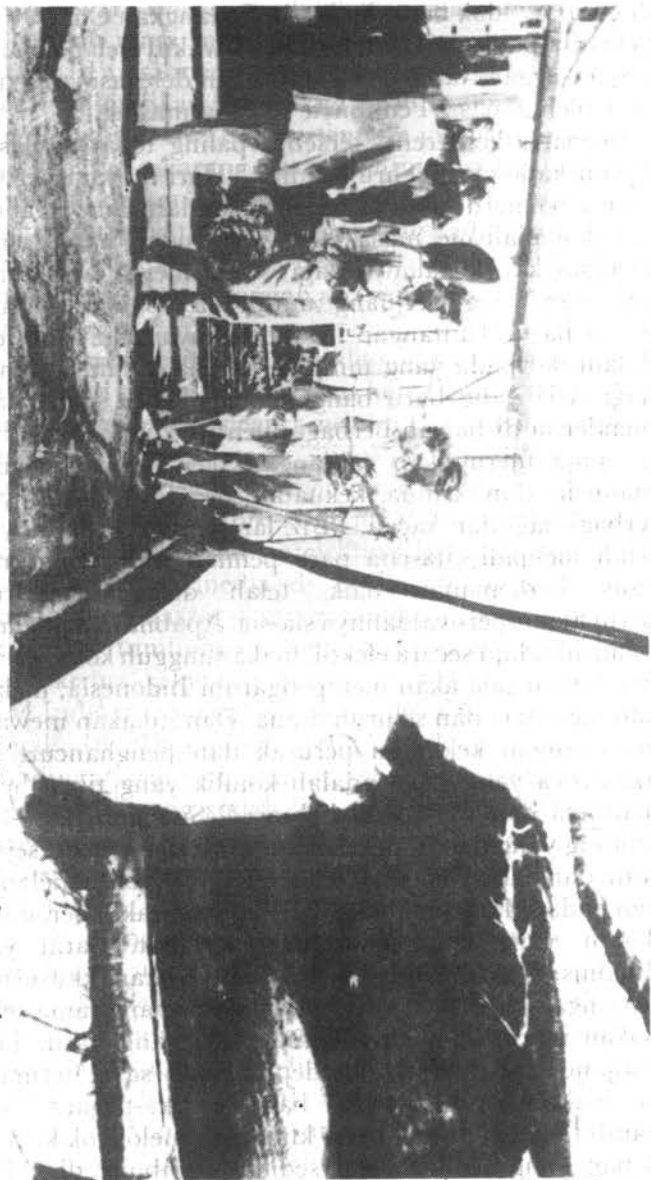
sendiri, dan saya tidak dapat melepaskan diri dari Indonesia semudah sikap kawan-kawan Indonesia saya terhadap diri saya kelak. Setiba di New Delhi, saya harus membuat konsep dokumentasi untuk Konferensi Sembilan Belas Bangsa mengenai Indonesia, yang dipimpin Nehru di New Delhi pada minggu ketiga bulan Januari 1949, dengan tujuan untuk menemukan cara membantu Republik. Saya juga membantu Sekretaris Konferensi dalam perundingan sehari-hari untuk mempersiapkan notulen dan konsep resolusi-resolusi. Kesempatan ini mendebarkan hati saya karena merupakan karunia Tuhan dan karenanya saya berikan semua yang terbaik yang saya punyai, baik pengetahuan maupun pengalaman, bagi maksud yang saya cintai dan karena kepercayaan saya yang besar kepada kepemimpinan Nehru. Tugas yang luar biasa yang sama sekali baru bagi saya, namun seperti Sekretaris Konferensi mengatakan dalam pujiannya – satu-satunya pujian yang pernah diberikan oleh pemerintah kepada saya, "Jika tidak karena ketekunan dan dorongannya di belakang layar, sekretariat tidak akan berfungsi selancar ini." Saya merasakan pula kepuasan karena pengetahuan dan pengalaman saya mengenai Indonesia telah dimanfaatkan sepenuhnya, seperti yang dikatakannya, "Saya sangat beruntung telah dapat memanfaatkan sepenuhnya energinya, antusiasmenya, dan pengetahuannya tentang para tokoh dan peristiwa-peristiwa di Indonesia."

Konferensi itu diadakan atas permintaan PM Birma, Thakin Nu. Beliau menyatakan bahwa, sebagai PM India, Nehru seharusnya mengundang negara-negara Asia untuk memikirkan masak-masak Agresi Kedua Belanda terhadap Indonesia. Delapan belas negara Asia atau yang mempunyai kepentingan di Asia diundang dalam konferensi itu: Afganistan, Australia, Birma, Sri Lanka, Cina, Mesir, Etiopia, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Muang Thai, Suriah, Yaman, Nepal, dan Selandia Baru. Turki, yang juga



Repro Tempo

U Nu. Dialah yang mengambil prakarsa adanya Konferensi Sembilan Belas Negara untuk mencari penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi Indonesia.



"Diplomasi Beras" Syahrir: mematahkan blokade ekonomi Belanda sekaligus memperluas pengakuan internasional terhadap RI.

Repro Tempo

diundang, tidak bersedia hadir. Sedangkan Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muang Thai diwakili oleh pengamat, negara-negara lainnya mengirimkan delegasi yang diketuai oleh Kuasa Penuhnya masing-masing.

Skenario konferensi tersebut paling tepat dijelaskan dalam kata-kata Nehru sendiri: "Hari ini kita bertemu karena kemerdekaan salah satu saudara kita terancam dan kolonialisme masa lalu yang sudah hampir mati mengangkat kepalanya lagi serta menantang semua kekuatan yang berjuang untuk membangun tatanan dunia baru. Tantangan ini mempunyai arti yang lebih dalam daripada yang tampak, karena inilah tantangan bagi Asia yang baru bangkit, yang telah sekian lama menderita di bawah berbagai bentuk kolonialisme. Hal ini juga merupakan tantangan bagi semangat umat manusia dan semua kekuatan progresif dunia yang terbagi-bagi dan kacau. PBB, lambang satu dunia yang telah menjadi cita-cita para pemikir dan orang-orang yang berkemauan baik, telah dicemoohkan dan pernyataan-pernyataannya sia-sia. Apabila tantangan ini tidak dihadapi secara efektif, maka sungguh konsekuensinya bukan saja akan mempengaruhi Indonesia, melainkan juga Asia dan seluruh dunia. Dan itu akan mewakili kemenangan kekuatan perusak dan penghancur, dan akibatnya yang pasti adalah konflik yang tiada hentihentinya dan malapetaka dunia." Sungguh, kata-kata seorang yang dapat membayangkan masa depan, sejarawan, dan nabi. Dengan nada yang sama Nehru melanjutkan pada sidang pembukaan, "Kita mewakili peradaban Timur yang kuno maupun peradaban Barat yang dinamis. Secara politis, kita melambangkan, khususnya, semangat kemerdekaan dan demokrasi yang sama sekali bukan merupakan ciri penting Asia yang baru. Jalan panjang sejarah lewat di depan mata saya, termasuk perubahan-perubahannya bagi negara-negara Asia. Sambil berdiri di tepi masa kini, saya melongok ke masa depan yang sedikit demi sedikit membuka diri. Kita

adalah pewaris sejarah masa lalu yang panjang, sekaligus pembangun masa mendatang yang tengah membentuk diri. Beban masa mendatang harus kita lahirkan dan kita harus membuktikan bahwa kita berharga untuk memikul tanggung jawab itu. Jika pertemuan ini mempunyai arti untuk masa sekarang, arti pentingnya justru akan bertambah dalam harapan akan masa mendatang. Asia yang terlalu lama tunduk, bergantung pada, dan menjadi benda permainan negara-negara lain tidak akan lagi membiarkan campur tangan apa pun terhadap kemerdekaannya."

Cita-cita kemerdekaan dan demokrasi yang mulia ini dan tatanan dunia berdasarkan kerja sama antara Asia yang bangkit dengan negara-negara Barat sebagai "pembangun masa mendatang" tidak cukup dihargai dan dipahami oleh pemimpin-pemimpin Barat pada masa itu. Nehru dianggap pro-komunis dan anti-Barat, anggapan yang bagi kaum intelektual Barat menggelikan. Tetapi, berbagai media di negara Barat sering kali menimbulkan hasrat dan prasangka yang, sayangnya, merintang tumbuhnya hubungan yang lebih intim antara kedua kekuatan demokrasi terbesar dunia.

PM India itu menggambarkan Agresi Belanda Kedua, tanggal 18 Desember 1948, ketika perundingan-perundingan sedang berlanjut, sebagai berikut: "Bahkan nurani dunia yang sudah lesu dan tumpul menanggapi serangan ini dengan rasa terperanjat dan heran." Ketika memberikan penghargaan kepada bangsa Indonesia, Nehru mengatakan, "Setiap orang yang mengenal semangat rakyat Indonesia atau Asia dewasa ini mengetahui, bahwa usaha untuk menekan nasionalisme rakyat Indonesia ini dan keinginan bangsa Indonesia yang berkobar-kobar untuk merdeka pasti gagal. Akan tetapi, bila agresi terbuka dan tanpa malu ini tidak diselidiki, malahan dimaafkan oleh kekuatan-kekuatan lain, maka harapan akan musnah dan rakyat akan menempuh jalan dan cara lain, bahkan dapat menimbulkan bencana yang hebat.

Satu hal yang pasti: tidak akan dan tidak akan pernah tunduk kepada agresi, dan tidak akan mau menerima diterapkannya kembali penjajahan." Nehru tidak hanya mengenal baik Barat dan halaman-halaman sejarah, tetapi juga, karena telah bergaul dengan rakyat-rakyat yang dijajah dan mengikuti perjuangan mereka, ia dapat membayangkan masa mendatang dengan baik.

Semua negara yang ikut konferensi dengan secara bulat mengutuk agresi Belanda. Selain Nehru, Solomon Bandarānaikē dari Sri Lanka dan Dr. Burton dari Australia memainkan peranan penting dalam menyusun konsep resolusi. Pertemuan dan hasil yang dicapai itu menarik minat dunia luas. Di AS, yang semula merasa khawatir mendengar adanya konferensi itu, baik pejabat maupun publik tampak puas dengan sifat moderat resolusi. Di Eropa Barat, yang kaum intelektualnya tertarik pada Nehru, orang lebih dari sekedar merasa puas bahwa kepribadian Nehru sebagai negarawan dunia telah muncul dan kekhawatiran yang tidak beralasan bahwa Nehru akan menghasut Asia untuk melawan Barat ternyata hanya alasan palsu belaka. Seluruh Asia didorong untuk berbuat sesuatu oleh pertemuan bersejarah yang memberitahukan keputusannya untuk mengembangkan kehidupan baru. Di Indonesia konferensi ini menjadi pendorong semangat juang kekuatan-kekuatan Indonesia melawan tentara pendudukan Belanda, dan para pemimpin Republik yang ditawan melihat munculnya harapan-harapan baru dari konferensi di New Delhi ini.

Resolusi-resolusi konferensi berisi anjuran kepada Dewan Keamanan supaya Pemerintah Republik, pemimpin-pemimpin Republik lainnya, dan semua tahanan politik segera dilepaskan, pemulihan Pemerintah Republik di Keresidenan Yogyakarta beserta segala fasilitas untuk komunikasi dan kebebasan berkonsultasi; pengembalian kepada Pemerintah Republik paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949 wilayah-wilayah yang

dikuasainya pada tanggal 18 Desember 1948; pasukan-pasukan Belanda harus segera ditarik dari Keresidenan Yogyakarta, dan yang ada di daerah-daerah Republik ditarik berangsur-angsur; menghapuskan dengan segera pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh Belanda kepada perdagangan Republik dan seraya menantikan terbentuknya Pemerintah Sementara pada tanggal 15 Maret 1949, Republik harus diberi semua fasilitas untuk berkomunikasi dengan dunia; Pemerintah Sementara harus memegang kekuasaan penuh, termasuk kendali atas angkatan-angkatan bersenjata, menyelesaikan pemilihan Majelis Konstituante pada tanggal 1 Oktober 1949, dan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke tangan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1950.

Resolusi utama konferensi itu sesuai dengan permintaan Sukarno-Hatta kepada Nehru dari tempat tahanan mereka di Bangka.

Lima hari setelah konferensi New Delhi berakhir, Dewan Keamanan dalam resolusinya yang baru tanggal 28 Januari 1949 menyerukan supaya segera diadakan gencatan senjata; semua tahanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 supaya dilepaskan tanpa syarat, dan mengembalikan dengan segera Pemerintah Republik beserta para pejabatnya ke Yogyakarta. Resolusi ini juga menyarankan agar kedua kelompok secepat-cepatnya mengadakan perundingan-perundingan dengan bantuan Komisi PBB untuk Indonesia (dalam resolusi yang sama Komisi Jasa-jasa Baik telah diubah menjadi Komisi PBB untuk Indonesia) guna mendirikan pemerintah Negara Indonesia Serikat yang berdaulat, merdeka, dan federal sesegera mungkin. Dikemukakan pula bahwa pemerintah federal harus didirikan paling lambat tanggal 15 Maret 1949 dan pemilihan bagi Majelis Konstituante harus dirampungkan pada tanggal 1 Oktober 1949, penyerahan kedaulatan ke tangan Negara Indonesia Serikat harus dilakukan sesegera mungkin dan, bagaimanapun juga, tidak melebihi tanggal 1 Juli 1950. Resolusi Dewan

Keamanan PBB ini tidak memenuhi anjuran New Delhi, ditinjau dari bobot pendapat internasional seperti yang direalisasikan dalam Konferensi New Delhi.

Sebagai tanggapan, Belanda secara resmi berpendapat bahwa PBB tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri Belanda. Pemerintah Darurat Republik di Sumatra juga menolak resolusi PBB dan menganjurkan agar pasukan-pasukan gerilya beserta rakyat bangkit melawan Belanda. Tantangan terhadap Belanda mulai tumbuh di daerah-daerah yang didudukinya. Menyabot jalan-jalan permanen, pemasangan ranjau di jalan-jalan raya, dan penyerangan atas perkebunan-perkebunan yang dikelola Belanda merupakan hal yang biasa. Bersamaan dengan tekanan AS yang meningkat, dalam lingkungan pejabat Belanda timbul kesadaran bahwa aksi militer kedua tidak memecahkan masalah, tetapi justru menciptakan lebih banyak persoalan.

Tanpa menunggu keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB, Pemerintah Belanda telah lebih dahulu melakukan usaha-usaha baru. Para Kuasa Penuhnya di Jakarta memindahkan Sukarno dan Syahrir dari Berastagi ke Bangka guna memungkinkan pemimpin-pemimpin Republik berunding di antara mereka sendiri sebelum mengizinkan BFO, Panitia Penasihat Federal yang dibentuk oleh orang-orang Belanda di semua negara dan organisasi yang disponsori Belanda, pergi ke Bangka untuk bertukar pikiran dengan para pemimpin Republik mengenai susunan Pemerintah Sementara Federal. Jelas Belanda kini berada dalam suasana untuk menyesuaikan diri dengan perintah Dewan Keamanan tanpa menerimanya. Ada tiga hal yang memaksa Belanda bertindak seperti itu; bobot pendapat internasional seperti yang terlihat dalam Konferensi New Delhi yang didukung Dewan Keamanan PBB, tekanan dari AS yang meningkat, kesadaran pada elemen-elemen non-Republik yang disponsori Belanda bahwa mereka tidak dapat berfungsi tanpa adanya kemauan baik dari pemimpin-pemimpin

Republik dan adanya perubahan pendapat umum, meskipun tidak terlalu nyaring, di Negeri Belanda yang menginginkan penyelesaian secara damai di Indonesia.

Menyusul pendekatan yang lunak kepada Republik melalui mula-mula dengan kunjungan delegasi BFO dan kunjungan-kunjungan para pejabat penting Belanda lainnya ke Bangka dan menunjukkan adanya perubahan arah dalam sikap di Den Haag, orang-orang Belanda kini mengeluarkan rumusan baru (yang diberi nama menurut nama PM Belanda, Dr. Beel), yang mempertimbangkan dipercepatnya penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat, yaitu pada bulan April atau Mei 1949, segera sesudah Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag tanggal 12 Maret 1949, yang akan dihadiri oleh BFO, Republik, dan wakil-wakil lainnya. Komisi PBB untuk Indonesia akan diundang pula untuk "memberikan bantuan sehingga dicapai hasil yang positif". Pada saat itu tidak jelas bagi saya sampai sejauh mana Belanda telah dipengaruhi oleh Rencana Mountbatten tahun 1947, di New Delhi, yang memuat pernyataan bahwa Mounbatten mempercepat kemerdekaan India (dan Pakistan) dengan jelas menetapkan batas akhir tanggal 15 Agustus 1947 dan penyobekan setiap tanggal dari kalender ketika mendekati batas akhir memberikan paksaan-paksaan tersendiri kepada para pemimpin politik. Belanda di Jakarta selalu mengingkari adanya persamaan antara situasi di India dan Indonesia.

Rencana Beel merupakan pendekatan yang sama sekali baru; suatu peristiwa penting dalam perundingan-perundingan yang berbelit-belit selama tiga tahun lebih yang diselingi dengan sejumlah aksi militer yang bersifat menghukum dan tampaknya benar-benar rencana ini merupakan usaha sehat pertama pihak Belanda untuk memecahkan masalah Indonesia dan mencapai kata sepakat dengan Republik. Belanda telah gagal dalam usaha-usahanya untuk membujuk, memaksa, dan menakut-nakuti Republik dengan jalan mendirikan se-

jumlah negara boneka yang para pemimpinnya terpaksa, karena tekanan pendapat umum, menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap Republik dan penyerahan kedaulatan yang sebenarnya. Dalam prosesnya, kesatuan seluruh rakyat Indonesia menjadi nyata dalam pengabdian mereka untuk merdeka. Dr. Beel beserta pemerintahnya dengan bijaksana menyadari perlunya Belanda mengadakan pendekatan yang sama sekali baru untuk memelihara kepentingan politik dan ekonominya di Indonesia dengan bekerja sama dengan bangsa Indonesia.

Karena bulan Februari berlalu tanpa dilepaskannya para pemimpin Republik dari Bangka dan mengembalikannya ke Yogyakarta, maka Dewan Keamanan PBB pun lalu mengadakan sidang pada minggu kedua bulan Maret 1949 dan, setelah membicarakan masalah Indonesia selama dua minggu, mengeluarkan Resolusi Kanada, yang memerintahkan diadakannya pembicaraan-pembicaraan pendahuluan di Indonesia mengenai: (a) pemulihan kekuasaan Republik di Yogyakarta dan (b) mengadakan sidang Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan tujuan mendirikan negara federasi Indonesia yang merdeka. Permintaan Dewan Keamanan PBB agar kedua kelompok merundingkan pemulihan kekuasaan Pemerintah Republik di Yogyakarta merupakan langkah mundur, mengingat melalui resolusinya tanggal 28 Januari 1949 badan ini sudah menuntut pemulihan seperti itu. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa yang telah ikut membuat resolusi Konferensi mengenai Indonesia di New Delhi bergerak untuk membawa masalah ini ke hadapan Sidang Majelis Umum PBB bulan April 1949. Masalah ini diterima oleh Majelis Umum untuk dimasukkan dalam agendanya, tetapi sementara itu karena ada laporan bahwa telah dicapai beberapa kata sepakat antara delegasi kedua pihak di hadapan Komisi PBB di Jakarta, maka diputuskan untuk membahas masalah itu dalam Sidang Majelis bulan September 1949. Lima belas

bangsa penanda tangan resolusi Konferensi New Delhi mengenai Indonesia mengadakan sidang tidak resmi di New Delhi pada tanggal 13 April dan memutuskan seandainya tidak segera ada penyelesaian di Jakarta, wakil-wakil mereka di PBB harus mendesak lagi Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi kepada Belanda setelah mengutuk kegagalan Belanda untuk mematuhi resolusi tanggal 29 Januari. Bangsa-bangsa ini juga merencanakan untuk meniadakan fasilitas transit Belanda melalui beberapa wilayah mereka, seperti yang telah dilakukan Pemerintah India terhadap penerbangan KLM yang menuju dan melintasi wilayah India pada tanggal 27 Juli 1949 (1947. *Red.*) menyusul Agresi Belanda yang pertama.

Selama kurun waktu inilah AS memanfaatkan pengaruhnya atas Pemerintah Belanda secara efektif. Pada tanggal 30 Maret, Menteri Luar Negeri AS Dean Acheson, memberi tahu Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker, di Washington, bahwa Departemen Luar Negeri AS terpaksa akan menghentikan alokasi ECA kepada Belanda kalau Pemerintah Belanda tidak mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selain tekanan AS, tekanan-tekanan para pengusaha Belanda meningkat, karena mereka menyadari bahwa keadaan makin lama makin tidak menguntungkan kepentingan jangka panjang mereka di Indonesia. Salah seorang diplomat Belanda yang paling cakap tiba di tempat. Segera setelah kedatangannya, Van Royen, kepala Misi Belanda di PBB, mengadakan hubungan lagi dengan orang-orang Indonesia. Mula-mula Van Royen mengatakan bahwa Republik akan dipulihkan hanya hingga kota Yogyakarta dan sekitarnya, tidak meliputi seluruh keresidenan. Namun, di bawah tekanan AS, Van Royen mengubah sama sekali pendiriannya dalam dua belas jam dan menegaskan bahwa Republik akan dipulihkan hingga Keresidenan Yogyakarta! Dan semua persetujuan tidak resmi ini secara resmi diteguhkan di

hadapan Komisi PBB pada tanggal 7 Mei.

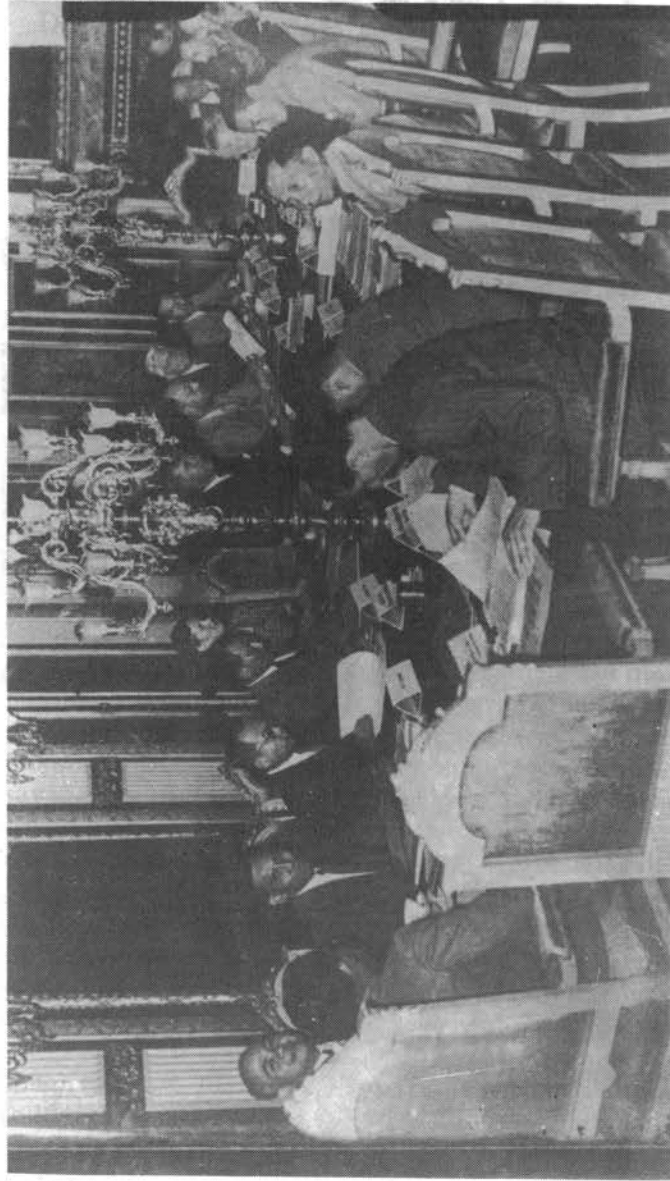
Belanda kini menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret. Dengan demikian pihak Belanda berubah sama sekali dan menerima usul-usul PBB bagi perkembangan menuju Negara Indonesia Serikat. Golongan Federal yang sebelumnya menolak untuk ambil bagian dalam Konferensi Den Haag kalau Republik tidak ikut serta, kini menyambut baik perkembangan yang terjadi. Jadi, persatuan antara golongan Federal dan Republik merupakan ciri Revolusi Indonesia yang penting dan menunjukkan kekuatan nasionalisme Indonesia. Para pemimpin Republik memperlihatkan kebijaksanaan mereka yang luar biasa dan kecakapan mereka sebagai negarawan dalam berurusan dengan golongan Federal. Sikap ini menunjukkan kematangan mereka sebagai negarawan. Kepribadian Hatta yang tenang dan tidak mudah gelisahlah yang berhasil mengatasi saat-saat yang melelahkan. Tidak lama kemudian, delegasi Republik dan Federal bertemu dan mencapai kata sepakat mengenai: (a) pembentukan negara federal, (b) pembentukan Pemerintah Federal Sementara sampai ada pemilihan umum untuk membentuk pemerintah pilihan rakyat, (c) Pemerintah Sementara untuk menggambarkan Negara-negara Bagian dan memilih wakil-wakil Negara Bagian dalam badan legislatif yang terdiri dari dua dewan, dan (d) mempunyai bentuk pemerintahan kabinet. Cukup membesarkan hati menyaksikan hanya bangsa Indonesia yang menentukan pendirian negara merdeka mereka di kemudian hari.

Begitu Belanda melakukan langkah yang sudah lama dinantikan dan tidak dapat dihindarkan lagi, peristiwa-peristiwa berlangsung cepat. Keresidenan Yogyakarta dikembalikan lagi kepada Pemerintah Republik dan para pemimpinnya terbang dengan pesawat Komisi PBB pada tanggal 7 Juli, dan pada tanggal 13 Agustus perintah gencatan senjata dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Republik menghadapi kesulitan besar dalam me-

nyelenggarakan gencatan senjata, bukan hanya disebabkan karena kurangnya komunikasi, melainkan juga karena pada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Sudirman, masih melekat sifat keras dan disiplin tentara Jepang yang telah melatihnya. Tanpa mempunyai ambisi pribadi, Sudirman berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan menolak mengakui kekuasaan Presiden Sukarno karena Presiden berada dalam pengasingan setelah menyerah kepada tentara Belanda, dan bukannya tinggal tetap bersama Angkatan Bersenjata Republik sebagai Panglima Tertinggi, dan oleh karena itu ia tidak akan mematuhi seruan gencatan senjata dari Presiden. Peruntungan atau takdir lagi-lagi membawa saya ke dalam pusarannya. Saya menjadi saksi mata di Yogyakarta pada saat-saat yang mendebarkan itu, ketika diadakan permusyawaratan antara Panglima Tertinggi dan Presiden dengan perantaraan Ali Budiarto, yang sejak semula telah bergaul dengan organisasi angkatan bersenjata dan karenanya merupakan satu-satunya orang sipil yang banyak pengaruhnya kepada kelompok mereka. Beliau membidikkan introspeksi khas Jawanya yang digabungkan dengan sifatnya yang tenang dan tidak mudah gelisah, sifat yang juga dimiliki Hatta dan Syahrir yang sangat akrab dengannya. Sifat-sifat yang saya kagumi pada banyak kawan Indonesia saya, baik pria maupun wanita. Ali Budiarto memasuki masalah dengan lihai dan sangat bijaksana. Ia berhasil membujuk Sudirman untuk menerima kekuasaan Sukarno atas dasar keabsahan dan moral, tanpa mengganggu prinsip-prinsip dan integritas Sudirman. Selain itu, prestise dan kewibawaan Presiden juga tak ternoda. Di samping itu Republik pun beruntung dengan adanya gencatan senjata dalam bergerak ke depan menuju kemerdekaan. Bagi saya, Yogyakarta, tempat tugas saya yang baru, tidak pernah sepi dari kegembiraan. Saya dikirim Pemerintah India sebagai wakilnya di Yogyakarta, menggantikan pendahulu saya yang diungsikan oleh

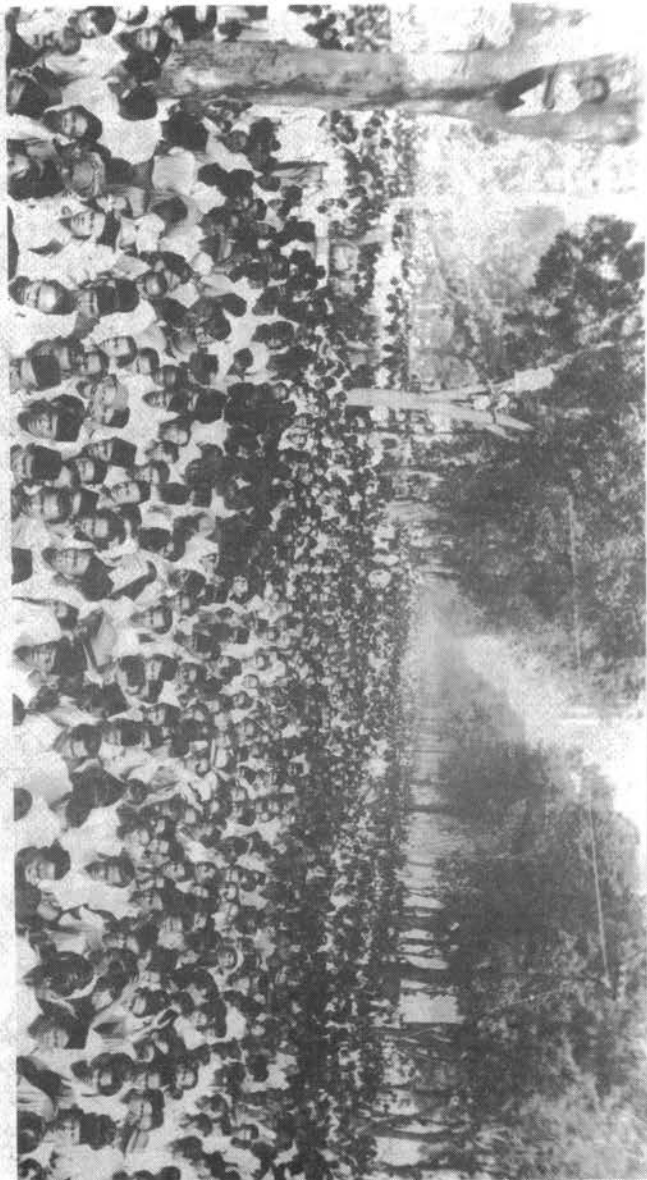


Jenderal Sudirman — lihat garis mukanya yang mencerminkan keteguhan hati — didampingi Kolonel Simatupang menghadap Presiden dan Wakil Presiden sekembali dari medan gerilya.



Rapat Komisi Pusat KMB di Den Haag tanggal 6 September 1949 yang mengakhiri kolonialisme di Indonesia.

Gelombang manusia di sekitar Gambir, Jakarta, saat mendengarkan pidato Proklamasi Kemerdekaan ke-4 yang disampaikan Presiden Sukarno melalui RRI Yogyakarta.



Arsip Nasional

Belanda pada masa Agresi Kedua.

Dengan kembalinya PM Hatta dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 4 November, satu-satunya masalah yang masih ada adalah persiapan-persiapan untuk kembali ke Jakarta guna meresmikan Negara Indonesia Serikat. Perdana Menteri Hatta yang baru ditunjuk kembali ke Den Haag dan pada tanggal 27 Desember menerima langsung dari tangan Ratu Belanda dokumen-dokumen resmi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Negara Indonesia Serikat. Pada hari yang sama Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta mengosongkan kantornya, bersamaan dengan penurunan bendera Belanda dan penaikan Merah Putih di puncak Kantor Gubernur. Sukarno, sebagai Presiden Negara Indonesia Serikat yang baru saja ditunjuk, terbang dari Yogyakarta menuju Jakarta. Sebagai tanda sikap bersahabat, Sukarno mengundang saya untuk menemaninya dalam penerbangan menuju Jakarta. Sungguh suatu kehormatan bagi wakil India untuk Republik Indonesia, tetapi bagi saya pribadi, hal ini berarti puncak petualangan yang mendebarakan hati dan ada harganya bagi kepentingan kemerdekaan suatu bangsa dan rakyat yang ramah dan murah hati. Hati saya lebih dari sekadar tergetar ketika di akhir perayaan peresmian Negara Indonesia Serikat, Presiden Sukarno mengatakan pada waktu kunjungan perpisahan saya, "Kami sudah mencapai kemerdekaan melalui perjuangan yang pahit dan berlangsung lama dan Anda dapat merasa bangga dengan misi Anda sebagai sahabat."

Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan yang lama, yang memakan waktu empat tahun empat setengah bulan yang sulit bagi RI untuk meraih tujuan-tujuannya sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang meminta pengorbanan jiwa ribuan pemuda dan penderitaan hebat rakyat Indonesia yang biasanya hidup tenteram dan damai. Meskipun demikian, patut dipuji bahwa selama per-

juangan yang lama ini para pemimpin, Sukarno-Hatta, mempertahankan prinsip-prinsip mulia kemanusiaan dan internasionalisme, yang diabadikan dalam Proklamasi Kemerdekaan. Bahkan, ketika kekejaman militer Belanda membangkitkan amarah rakyat, para pemimpin dan pemerintah menghindarkan rasa benci kepada rakyat Belanda. Perang itu kejam dan saya pribadi telah menyaksikan kekejaman pasukan-pasukan bersenjata. Sementara bagian dunia lainnya tengah menyerukan perdamaian dan menyembuhkan luka-luka akibat perang yang membawa bencana, perang yang lain terjadi melawan bangsa Indonesia yang tidak bersenjata lengkap namun cinta kemerdekaan, karena ketamakan yang masih melekat dan nafsu kekuasaan zaman lampau, yang telah dihancurkan oleh bencana dunia. Karena banyak kekejaman manusia terhadap sesamanya dilakukan dengan sepengetahuan dan tenggang rasa bangsa-bangsa yang hanya mementingkan diri sendiri, saya sering merasa remuk mengingat masa depan umat manusia dan sistem dunia. Keadaan ini merupakan pelajaran pula untuk mengetahui keefektifan atau ketidakefektifan PBB dalam memelihara perdamaian, satu komoditi yang mungkin akan tetap tergantung pada seimbang atau tidak seimbangnya bangsa-bangsa yang berkuasa, kecuali bila manusia mengubah cara berpikinya.

Selama lima tahun berhubungan dengan Indonesia, saya bersyukur melihat para pemimpin Indonesia tetap berkepal dingin dan tabah selama mereka harus bekerja tanpa henti-hentinya guna mencapai kompromi yang tidak membahayakan kehormatan dan kemerdekaan mereka. Berbagai cara mereka gunakan pada berbagai saat, namun mereka tidak pernah mengorbankan kesejahteraan rakyat. Mereka tidak pernah menunjukkan kebencian terhadap orang-orang yang tidak sekata dengan mereka dan berharap kehendak rakyat akhirnya akan menyatakan dirinya. Tapi lebih besar lagi penghargaan saya kepada ratusan pemuda dan pemudi, pria

dan wanita, yang telah dengan suka rela membantu Indonesia yang merdeka menjalankan roda pemerintahannya, untuk mengisi angkatan bersenjatanya, untuk menjalankan komunikasinya, menjalankan siaran radio dan menjaga agar bangsa ini terus maju tanpa mengharapkan penghargaan, pujian, maupun karier, kecuali uang saku yang amat kecil atau ransum makanan untuk memelihara tubuh mereka. Namun, semangat Bangsa Indonesia, Semangat Merdeka memelihara jiwa mereka.

REFLEKSI

Mengingat RI saat itu hanya memiliki sedikit sumber daya setelah tiga tahun masa pendudukan Jepang yang telah menggoyahkan perekonomian, sungguh merupakan prestasi luar biasa bagi para pemimpinnya mampu mempertahankan roda negara selama empat tahun dalam menghadapi dua serbuan Belanda dan perang ekonomi Belanda melalui blokade angkatan lautnya, bahkan juga terhadap perdagangan antarpulanya yang minimal. Sementara Sukarno mengangkat tinggi-tinggi panjangnya dan terus memelihara semangat revolusioner rakyat, Hatta-lah yang bekerja keras menghadapi berbagai masalah sehari-hari rakyat menyangkut makanan dan keperluan-keperluan yang esensial. Sukarno berbicara mengenai revolusi, menghidupkan dan menggerakkan revolusi, sementara Hatta bersama kelompok ekonom dan pengelolanya yang penuh pengabdian membanting tulang agar bangsa ini tetap bergerak sejauh mungkin dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Hatta adalah pengelola yang cakap, cepat, dan jelas dalam mengambil keputusan, dan tegas dalam bertindak. Pada waktu itu Sukarno selalu menghormati kebijaksanaan Hatta yang luar biasa sampai, pada masa sudah merdeka, keduanya berselisih pendapat mengenai peran Masyumi, partai yang berideologi Islam yang paling banyak pengikutnya di seluruh Indonesia. Ada aspek unik dalam diri Hatta, yaitu beliau hanya mempunyai sedikit waktu

untuk berdiskusi panjang lebar dan sering baru mengambil keputusan sesudah masalah-masalahnya dibentangkan kepadanya. Pikirannya yang tajam, bagaikan komputer, menganalisa situasi dengan luar biasa cepatnya. Bahkan di tengah berbagai peristiwa revolusi yang mengerikan Hatta selalu berbicara lembut dan tidak pernah menunjukkan amarah pada saat-saat yang membingungkan. Hatta seorang humanis yang baik dan benar-benar mengasihi semua orang. Persamaan sifat Hatta ini hanya kita jumpai pada Syahrir yang selalu tersenyum, teman lama dalam perjuangan kemerdekaan sejak masa mereka menuntut ilmu di Negeri Belanda. Pada waktu mereka merencanakan, merindukan, dan menggambarkan Indonesia yang merdeka, terlihat bahwa pemikiran Syahrir penuh mawas diri dan mewarisi segi-segi terbaik budaya dan filsafat Barat, namun mempertahankan pendekatan pragmatis terhadap masalah bangsa terjajah yang terbelakang. Perhatiannya terutama dicurahkan pada pemuda Indonesia dan mengerti bagaimana menggerakkan kelompok ini. Ia memandang hina pada kebesaran, kemegahan, keangkuhan, dan pamer kekayaan maupun kecakapan, dan dengan itu menunjukkan dirinya sebagai seorang sosialis sejati kepada banyak pengagumnya. Sebagai diplomat Syahrir menunjukkan pengabdian yang besar kepada Republik yang masih muda dengan memberikan segala pikiran dan kekuatannya bagi revolusi. Keadaan apa pun tidak dapat menggelisahkannya. Ia selalu tenang dan tetap optimistis. Syahrir menggabungkan taktik dengan strategi dan tahu bagaimana dan kapan konsesi harus diadakan guna mencapai tujuan. Seperti Nehru, Syahrir memiliki potensi untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Di Dewan Keamanan PBB, menyusul Agresi Belanda Kedua, Syahrir — yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Republik yang belum lama lahir — meninggalkan kesan abadi melalui ketegasannya, sikap moderatnya, dan semangatnya untuk menolong.

Hingga saat akhirnya, tiga serangkai: Sukarno, Hatta, dan Syahrir merupakan tim ideal bagi revolusi, dan pada waktu itu merupakan yang terbaik. Seperti semua revolusi, sekali berlalu, tujuan-tujuan hilang karena nafsu akan kekuasaan! Kepemimpinan retak dan nasionalisme menjadi lemah. Tidaklah benar menilai Revolusi Indonesia dengan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya dan kesengsaraan yang ditimbulkannya di berbagai kawasan setelah kemerdekaan Republik diakui secara internasional. Prestasi yang diraih selama revolusi benar-benar hebat dan mulia.

Tidak ada revolusi yang mempertahankan arahnya lurus seperti sungai besar di tengah banjir. Harapan-harapan Lenin bagi Revolusi Rusia telah diingkari, meskipun dalam "Pernyataan Revolusi"-nya Lenin merencanakan revolusi anti-Tsar yang akan diikuti oleh berdirinya negara kapitalis seperti di Eropa, yang setelah masa sementara yang lama akan berkembang menjadi Revolusi Sosialis di bawah kepemimpinan partai Marxis dan yang pada akhirnya akan membawanya ke negara demokratis yang sebenarnya. Seperti itulah tampaknya Revolusi Indonesia telah keluar dari rel-rel Panca Sila-nya begitu kemerdekaan tercapai.

Bantuan India pada Revolusi Indonesia dan perjuangan kemerdekaan sungguh besar. Penggemblengan perjuangan nasional Indonesia dengan rasa kebersamaan dan menjadikannya perjuangan yang lebih luas melawan penindas umum kolonialisme, pemberian bantuan materi, dan logistik di samping inisiatif diplomatik Pemerintah India, India di bawah Nehru-lah yang bertindak meyakinkan untuk memastikan bahwa bantuan India cukup berarti, mencukupi, dan efektif. Karena rincian bantuan ini dengan sendirinya masih harus menunggu penerbitan dokumen-dokumennya oleh pemerintah India, kiranya cukup bagi saya untuk menunjukkan bahwa tidak pernah timbul pikiran "*quid pro quo*" (sesuatu yang diberikan dengan pamrih) dalam benak Nehru saat itu, biarpun

beberapa pencela India dan musuh nasionalisme Indonesia menganggap adanya motif pada Nehru. Pada dasarnya bantuan itu merupakan jati diri pandangan dan penyelarasan pandangan-pandangan mengenai perjuangan bersama melawan kolonialisme, yang menggerakkan Nehru untuk memberikan bantuan nyata – lebih daripada bantuan moral – kepada Republik Indonesia yang baru lahir. Seandainya India mengharapkan sesuatu, itu hanyalah terjalannya hubungan kemauan baik yang timbal balik. Karena saya diikutsertakan dan merupakan saluran beberapa hubungan timbal balik antara pemimpin kedua negara, saya berani menyatakan dengan tegas dan pasti, bahwa tidak ada pemaksaan pandangan-pandangan India kepada bangsa Indonesia. Dengan konsep yang mengagumkan, yang sering kali dibuat oleh Nehru pribadi, pandangan India mengenai berbagai masalah – baik mengenai pengakuan terhadap Republik Rakyat Cina (Republik Indonesia? *Red.*), maupun bentuk hubungannya di masa mendatang dengan Negeri Belanda dalam Uni di bawah Ratu Belanda, sesuai dengan asosiasi India dengan Persemakmuran Inggris – dinyatakan dengan jelas bahwa terserah kepada pemimpin-pemimpin Republik sendiri untuk merumuskan kebijaksanaannya. Misalnya, ketika diberi tahu pandangan-pandangan India mengenai pengakuan RRC, Sukarno mengatakan kepada saya bahwa Pemerintah Republik akan mengambil tindakan serupa; dua kali saya menemui Hatta untuk mencari tahu bagaimana pendapatnya, dengan maksud untuk mendapatkan kepastian bahwa kebijaksanaan Pemerintah Indonesia telah digariskan.

Nehru tidak hanya memenuhi janjinya "untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendukung Anda sedapat-dapatnya" dan "bagaimanapun eratnya kami terjerat dalam masalah-masalah kami sendiri, kami memikirkan Anda karena kami menyadari perjuangan kemerdekaan Anda terjalin erat dengan perjuangan

kami"; semua ini bukan sekadar kata-kata berani dari kawan pemimpin yang amat mengagumi "perjuangan besar untuk kemerdekaan" Indonesia, seperti yang beliau sendiri katakan.

Betapa berubah-ubahnya dan betapa tidak terduganya perasaan bangsa satu terhadap yang lain, tak ubahnya sebagai perasaan manusia! Bukanlah oleh saya, melainkan oleh orang lainlah peristiwa-peristiwa setelah Januari 1950 yang memisahkan India dan Indonesia harus diteliti dan dianalisis.

INDEKS

A

Abdulgani, Roeslan, 77
Agresi Belanda, 134, 168; - Pertama, 51, 133, 173, - Kedua, 136, 152, 159, 163, 167, 179, 183
Aksi Nasional, 79-80
Alimin, 54-55, 145
Anti-Belanda, 31
Anti-Jepang, 74, 77
Anti-kolonial, 13, 34
Anti-Nehru, 123
Asosiasi Pelayanan Jawa, 73

B

Bandaranaike, Solomon, 168
Beel, Dr., 171-172
Bose, Netaji Subash Chandra, 9, 35, 61
Budha, 5-6
Budi Utomo, 31, 39, 43
Budiarjo, Ali, 7, 175
Bung Tomo, *lihat* Tomo, Bung
Burton, Dr., 168

C

Ciptomangunkusumo, Dr., 139
Cochran, Merle, 144, 151
Cokroaminoto, Said, 31, 38
Critchley, Du Bois, 144

D

Demokrasi, 36, 58-59, 131, 166-167;

- politik, 58, 138; - ekonomi-politik, 58; - ekonomi, 58; - Barat, 58-59; negara-, 104
Dialektis, 52, 54
Domei, Kantor Berita, 83, 86

F

Furnival, J.S., 37
Free Press Journal of Bombay, 28, 117

G

Gabungan Politik Indonesia (GAPI), 44
Gandhi, Mahatma, 3, 9, 34-35, 37, 39, 55, 57, 125, 133-134
GAPI, *lihat* Gabungan Politik Indonesia
Gasset, Ortega Y, 49
Golongan Merdeka, 40
Gotong royong, 52, 59; bentuk, 58; negara-, 59
Graeff, (Gubernur Jenderal) De, 40
Graham, Dr. Frank, 138, 140
Gurkha, 7, 25, 27, 95, 100, 107

H

Hamengku Buwono, Sultan, 8; *lihat juga* Sultan Yogyakarta
Hatta, Mohammad, 4-5, 11, 35, 40-41, 43, 47-51, 55, 61, 68-72, 74, 77-78, 82-84, 86, 88-89, 96, 105,

113-115, 121-122, 126, 132, 133, 138, 140, 143, 145-149, 151-153, 156, 159-160, 169, 174-175, 179-180, 182-185

Hegel, 49, 55

Hindu, 6, 8, 35, 46-47, 51, 56, 107, 111-112; - Tantri, 53, 112

Humanisme, 57

I

Imperialis, 30; sistem-, 34

Imperialisme, 14, 29, 92, 122

Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), 38

Internasionalisme, 57-59, 180

ISDV, *lihat* Indische Sociaal Democratische Vereeniging

Islam, 31, 46, 53, 56, 59, 72-74, 107, 112, 146, 182, Sufi-, 35; negara-, 59, 114, 130, 132; hukum-, 74

J

Jawa, 5-6, 14, 19, 28, 31, 38, 47, 51-57, 68-69, 72, 77, 88, 90-94, 97, 102, 104, 111-113, 116-117, 119, 127, 134-135, 142, 175; - Tengah, 6, 24-25, 120, 134-135; - Barat, 25, 104, 134; - Timur, 53, 120, 135; - kuno, 46; mistik-, 54-56, 79, 81

Jawa Hokokai, 74

Joyoboyo, 53, 68-69, 87

Juares, Jean, 58

K

Kant, 49, 55

Kapitalis, kaum, 58; negara-, 184

Kapitalisme, 122

Kehendak Nasional, 79-80

Kepercayaan kepada Tuhan, 59

KMB, *lihat* Konferensi Meja Bundar

KNIP, *lihat* Komite Nasional Indonesia Pusat

Kolonial, 29-30, 34, 39, 48, 68, 87, 90, 94, 102, 156, 159; kaum-, 45,

140; partai-, 147; penguasa-, 52; taktik-, 74; -paternalisme, 29

Kolonialisme, 29, 52-53, 55, 79, 95, 102, 113, 146, 154, 161, 166, 184-185

Komisi Jasa-jasa Baik PBB, 108, 135-136, 138, 142, 144, 148-149, 160, 169; *lihat juga* Komisi Tiga Negara

Komisi Tiga Negara, 108

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 96, 100, 104-105, 131, 140; *lihat juga* Parlemen Sementara

Komunis, 14, 19, 23, 28, 38-39, 54-55, 94, 123, 138, 143-146; kaum-, 40, 145-146; organisasi-, 72; partai-, 38, 54; pemberontakan-, 48, 146-147

Komunisme, 54, 135

Komunisme Internasional, 145-146, 155

Konferensi Meja Bundar (KMB), 171-172, 179

Konferensi Sembilan Belas Bangsa, 163

Konstitusional, 31, 42, 44, 84

Kristen, 31, 107, 146; Partai-, 105

L

Lenin, 184

Liberal, 40, 49, 147

Liga Anti-Imperialis, 34, 114

Linggajati, Perjanjian, 104-105, 108, 128-130, 132, 134

M

Maeda, Laksamana, 77, 84, 86

Mahabharata, 47, 56

Majelis Rakyat, 42; *lihat juga* Volksraad Malaka, Tan, 48, 55, 101, 105, 121, 143-144

Mallaby, Brigadir, 15, 19-20

Marhaenisme, 53

Marx, Karl, 49, 55

Marxis, 7, 54, 184

Marxisme, 52, 54

Masyumi, 105, 140, 146, 182

Mistik, 35, 46, 52-53, 55

Mook, Van, 93, 96, 104-105, 115, 149; Garis-, 142

Mountbatten, 86, 91-93, 106, 125, 171

Muslim, 107, 112; kaum-, 59, 74

Muso, 145-146

N

Narayanan, T.G., 10, 108, 114

Nasionalis, 19, 31, 38-39, 57, 84, 106; kaum, 14, 34, 37, 40-45, 68, 70-71, 74, 107; Islam, 17; gerakan-, 40-41, 68, 88; gagasan, 71

Nasionalisme, 15, 25, 27, 29-31, 41, 52-53, 57, 59, 70, 72, 77, 79, 122, 154, 167, 174, 184-185

Negara Indonesia Serikat, 104-105, 142-143, 169, 171, 174, 179

Nehru, Jawaharlal, 9, 50-51, 92, 102, 107, 112-115, 117-118, 121, 123-125, 129-130, 132-134, 136, 149, 152, 160-161, 163, 166-169, 183, 185

NICA, 93

Nietzsche, 49

Non-koperasi, 35, 39-40, 122

Nu, Thakin, 163

P

Panca Sila, 50, 56-57, 59

Panitia Persiapan Kemerdekaan, 57, 77, 82-83

Parindra, *lihat* Partai Indonesia Raya

Parlemen Sementara, 88, 96, 104, 131

Partai Indonesia (Partindo), 40-41

Partai Indonesia Raya (Parindra), 43

Partai Komunis Indonesia (PKI), 38-39, 89, 145, 155

Partai Sosialis Syahrir, 105, 146

Partindo, *lihat* Partai Indonesia

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), 152, 154, 170

Pemerintah Sementara, 169, 174

Perang Dunia II, 3, 25, 28, 45, 105, 116

Persatuan Sosial Demokratis Hindia, *lihat* Indische Sociaal Democra-

tische Vereeniging

Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), 39-41, 44, 105, 140, 146

Piagam Atlantik, 43, 45, 105

PKI, *lihat* Partai Komunis Indonesia

PNI, *lihat* Perserikatan Nasional Indonesia

Post, (Letnan Kolonel) Laurens van der, 109, 118-119

Prawiranegara, Syafruddin, 154

Putera (Pusat Tenaga Rakyat), 71, 74, 77

Q

Quit India, 34-35

R

Ratu Belanda, 43, 105, 143, 179, 185; wakil-, 97, 131

Renville, 140, 142; Perjanjian-, 140, 142-144, 151; politik-, 143

Resolusi Kanada, 172

Revolusi, 3-4, 8-11, 27, 29, 47, 50-52, 61, 72, 74, 79, 90-91, 94-95, 100, 144, 148, 182-184; - sosial, 145, 156

Revolusi Indonesia, 4, 10, 28, 46, 51, 78, 133, 174, 184

Revolusi Prancis, 58

Revolusi Rusia, 38, 184

Revolusi Sosialis, 184

Revolutioner, 10-11, 34, 39, 49, 70, 82-84, 94-95, 144, 146, 182

Royen, Van, 173

Rustam, 7, 24-25

S

Saleh, Chaerul, 77

Salim, Haji Agus, 43, 152, 156, 160

Sarekat Islam, 31, 37-39

Sekutu, 11, 72, 74, 82-83, 87, 89-91, 94, 97, 100, 105, 113

Semangat Nasional, 79-80

Sosialis, 8, 37, 49, 101, 146, 159, 183

Sosio-demokrasi, 60

Sosio-nasionalisme, 59

Sudirman, Jenderal, 152, 175

Sudirohusodo, Dr. Wahidin, 31
 Sukarno, 4-5, 11-12, 17, 19, 23-24, 35, 39-44, 46-48, 51-61, 68-72, 74, 77-79, 81-84, 86, 88-89, 92, 94, 96, 102, 105, 109, 111-113, 115, 123, 126-127, 130, 138, 140, 143-146, 151-153, 156, 160, 169-170, 175, 179-180, 182, 184-185; Nyonya—, 24, 102
 Sultan Yogyakarta, 96; *lihat juga* Hamengku Buwono, Sultan
 Sutomo, Dr., 43
 Syarifuddin, Amir, 23, 89, 140, 145-146
 Syahrir, Sutan, 4-5, 7, 11, 35, 37, 40-41, 43, 48-50, 61, 68-70, 72, 82, 86, 88-89, 96-97, 100-102, 104-105, 109, 113, 115-117, 120-125, 130-133, 135, 138, 140, 142-143, 146, 152-153, 156, 159-160, 170-175, 183-184

T

Tagore, Rabindranath, 5, 31
 Tanjung, Sofyan, 7, 24, 102
 Tentara Nasional India, 9, 35, 61, 107, 114
 Terauchi, 82
 Tomo, Bung, 19
 Tri Sila, 59
 Trilogi, teori, 79
 Trotsky, 48, 55, 101, 105, 121, 123, 143

V

Volksraad, 42-44; *lihat juga* Majelis Rakyat

Y

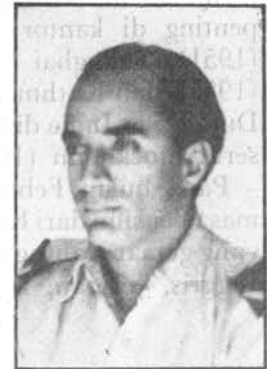
Yogyakarta, 51, 81, 94, 102, 107, 109, 111-112, 115, 130, 132-133, 135, 152-153, 168-169, 172-175, 179

Z

Zain, Yetty, 7, 24-25

Riwayat Penulis

Shri P.R.S. Mani yang dilahirkan bulan Februari 1915 ini pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Madras, India, sampai tingkat Sarjana Muda. Kariernya diawali sebagai perwira penerangan tentara India, sebelum terjun ke lapangan jurnalistik, sampai akhirnya berkecimpung dalam dunia diplomatik. Selama sekitar berlangsungnya Perang Dunia II, Mani banyak melaporkan pergolakan pada periode awal revolusi rakyat di berbagai negara kawasan Asia Tenggara.



Aktivitas Mani tersebut, pada gilirannya menyebabkan ia mengenal baik para pemimpin, kalangan pers, serta hampir semua lapisan masyarakat di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ia semula bertugas di Indonesia sebagai perwira penerangan tentara India, sebagai bagian dari pasukan Sekutu, yang mendarat di Surabaya menjelang akhir tahun 1945. Tahun berikutnya ia menjadi koresponden perang di Indonesia untuk *Free Press Journal of Bombay* (India), sekaligus untuk kantor berita ANTARA.

Sejak Oktober 1947 ia menjabat atase pers India di Jakarta, dan mulai Januari 1949 ia bertindak selaku

konsul dan wakil resmi Pemerintah India di Yogyakarta. Sekitar waktu itu pula, Januari 1949, ia aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Konferensi Sembilan Belas Bangsa yang membahas masalah Indonesia di New Delhi. Mani memang banyak berjasa mencari dukungan internasional untuk Republik Indonesia, juga berkenaan dengan kerja sama antara Indonesia dan India.

Atas saran Jawaharlal Nehru, Mani kemudian masuk Kementerian Luar Negeri India, mengabdikan untuk kepentingan India di ibu kota beberapa negara. Ia pernah menjalani masa dinas singkat sebagai konsul atau pejabat penting di kantor Kedutaan Besar India di Manila (1951), Shanghai (1952), Hong Kong (1953), Bonn (1955), dan Kathmandu (1958). Ia juga pernah menjadi Duta Besar India di Colombo (1961), Mauritania (1964), serta Stockholm (1970).

Pada bulan Februari 1973, P.R.S. Mani memasuki masa pensiun dari Kementerian Luar Negeri India. Mani yang gemar olahraga golf dan yoga ini menguasai bahasa Inggris, Jerman, Indonesia, dan Prancis.

Buku ini berisi kesaksian pribadi P.R.S. Mani tentang episode sejarah bangsa Indonesia selama kurun 1945-1950. Semula datang ke Indonesia selaku perwira penerangan tentara India, secara berturut-turut Mani kemudian menjabat koresponden *Free Press Journal of Bombay*, India, dan atase pers India, keduanya di Jakarta, dan terakhir sebagai konsul dan wakil resmi Pemerintah India di Yogyakarta.

Kesaksian Mani tentang jalannya Revolusi Fisik dengan segala kemelutnya ini diperkaya dengan pandangannya mengenai para pemimpin bangsa, berikut keistimewaan pribadi masing-masing. Secara terus terang ia menyatakan, "Sesungguhnya, saya sangat terpengaruh oleh karisma Sukarno, kecerdasan Hatta yang tenang dan sopan, dan pemikiran Syahrir yang tajam dan analitis." Mengaku banyak belajar politik dan masalah-masalah internasional dari Syahrir, maka "Wajarlah jika saya . . . mempersembahkan buku ini kepadanya," tulis Mani.

P.R.S. Mani dilahirkan pada bulan Februari 1915 dan berpendidikan hukum pada Universitas Madras, India. Sebagai diplomat, ia pernah bertugas sebagai Duta Besar India di Mauritania dan Swedia.